

**PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**



RAT
Kemiskinan

2023

Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ini bisa diselesaikan sesuai rencana. Tahun 2022 merupakan Tahun yang berat bagi seluruh masyarakat di dunia karena belum berakhirnya masa pandemi COVID 19. Hal ini tentu saja berdampak pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk menghadapi pandemi COVID 19 tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya dengan tujuan utama adalah penanganan COVID 19 beserta dampak yang ditimbulkannya. Selain tetap konsisten menjalankan program penanggulangan yang sudah ada (reguler), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga menjalankan program pengaman sosial dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat miskin, rentan serta masyarakat lainnya yang terdampak COVID 19.

Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2023 berisi penjelasan mengenai kondisi kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat beserta target program dan anggarannya selama Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Sekretariat TKPK Provinsi Sumatera Barat serta kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan yang ada pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Akhirul kalam, ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan ini. Semoga bermanfaat sebagai bahan perencanaan dan penganggaran pembangunan ke depan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat.

Padang, Februari 2023
Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Selaku Sekretaris TKPK
Provinsi Sumatera Barat,

MEDI ISWANDI, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 1999031004

DAFTAR ISI

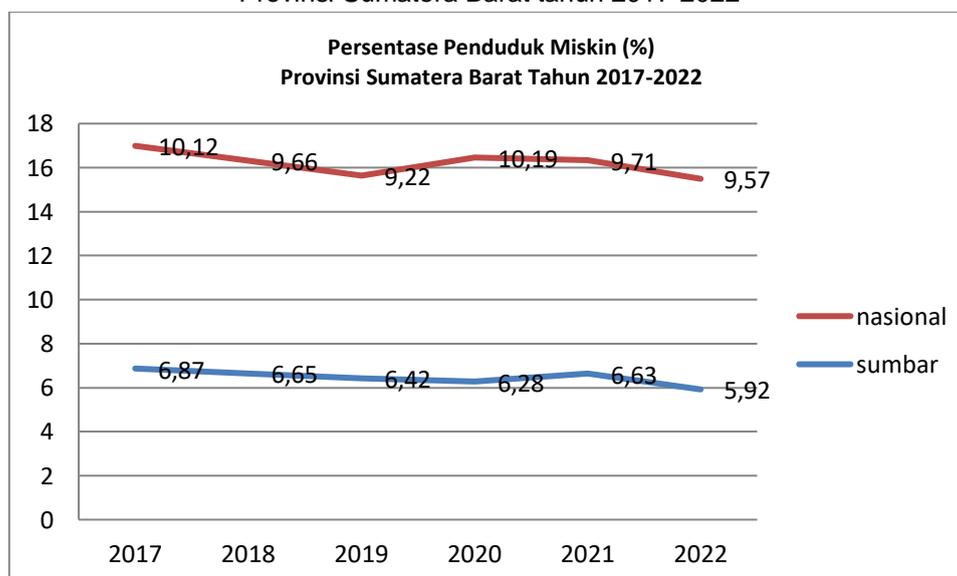
DAFTAR ISI.....	I
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA.....	5
2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.....	5
2.2 Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan.....	20
2.3 Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan	22
2.4 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan.....	23
2.5 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar.....	26
2.6 Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Non Konsumsi	31
BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN BERJALAN	41
3.1 Penentuan Lokasi Prioritas Program.....	41
3.2 Target Penurunan Persentase Kemiskinan	54
3.3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023	89
BAB IV RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023.....	56
4.1 Strategi dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat tahun 2023	56
4.2 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid 19	57
4.3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023	58

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan baik secara nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya harus bersifat lintas sektor dan lintas program. Penurunan tingkat kemiskinan nasional dalam lima tahun terakhir ini cenderung mengalami pelambatan. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran penurunan kemiskinan secara jangka menengah terutama apabila penanganan program penanggulangan kemiskinan tidak mengalami perubahan yang signifikan atau melakukan “business as usual”, padahal diharapkan upaya dan kebijakan penanggulangan kemiskinan pemerintah dan para pihak dapat menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, serta mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi penurunan tingkat kemiskinan secara nasional. pihak, upaya penurunan angka kemiskinan dua tahun terakhir seakan tidak ada artinya bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, hal itu disebabkan pada awal tahun 2020 adanya pandemi Covid-19. Pandemi tersebut yang menyerang kesehatan tubuh manusia yang menyebabkan kematian, selain menyerang kesehatan manusia juga berdampak pada perekonomian masyarakat. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan nasional

Grafik 1.1
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS Provinsi Sumbar 2023

Dalam grafik persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dengan nasional tahun 2017-2022 terlihat pada tahun 2017 persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,87 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 10,12 persen, Tahun 2018 persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,65 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,66 persen. Pada tahun 2019 persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,42 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,22 persen. Pada tahun 2020 persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,28 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 10,19 persen. Dan pada tahun 2021 persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,63 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,71 persen. Pada tahun 2022 persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,92 persen dibandingkan dengan nasional sebesar 9,57 persen.

Bila dibandingkan tingkat kemiskinan Nasional dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 nasional mengalami kenaikan persentase kemiskinan tapi Provinsi Sumatera Barat tetap terjadi penurunan persentase kemiskinan menjadi 6,28 persen, ini merupakan persentase terkecil dalam penurunan angka kemiskinan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal tersebut diakibatkan adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dimana sangat berdampak pada kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, setelah pemerintah mengumumkan keberadaan kasus Covid-19 dan beberapa waktu kemudian pemerintah menerapkan berbagai kebijakan baik di dalam negeri maupun kebijakan luar negeri karena adanya Pandemi Covid-19. Kebijakan di dalam negeri dalam upaya menanggulangi Covid-19 dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk sejumlah provinsi. PSBB ini menyebabkan perubahan perilaku sosial dan budaya dalam masyarakat, dampaknya dirasakan semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok masyarakat yang berada pada golongan menengah sampai dengan golongan yang paling bawah. Untuk membantu ekonomi masyarakat pada golongan yang paling bawah agar tidak terlalu semakin parah maka pemerintah menyalurkan program bantuan sosial. Selain itu yang harusnya menjadi perhatian adalah masyarakat golongan menengah, karena pada masa Pandemi Covid-19 jangan sampai ekonominya turun menjadi masyarakat golongan bawah.

Selain itu adanya ketidakpastian sampai kapan Pandemi berakhir sehingga semakin membuat ketidakpastian terhadap penurunan pendapatan atau semakin bertambahnya jumlah pekerja yang dirumahkan ataupun malah di PHK sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi adanya Pandemi Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk membantu perekonomian masyarakat melalui perlindungan sosial dan bantuan sosial melalui kebijakan-kebijakan mendorong berjalannya perekonomian masyarakat. Dengan berbagai program tersebut diharapkan mampu mengerem potensi kenaikan jumlah penduduk miskin sebagai dampak hilang atau berkurangnya pendapatan masyarakat terutama masyarakat rentan miskin. Selain itu berbagai program yang mampu mengurangi pengeluaran penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan penduduk miskin senantiasa menjadi prioritas untuk dilaksanakan.

Namun selain itu yang menjadi kendala pada masa Pandemi Covid-19 adalah data tentang penduduk miskin mesti diperbarui. Penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi harus dimasukkan dalam data terkini dimana masih terjadinya Inclusion dan exclusion error pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan masih perlu adanya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena belum adanya kepadanan antara DTKS dengan NIK penerima Jaring Pengaman Sosial. Ini terkait program jaring pengaman sosial yang akan digulirkan. Ketepatan dan kesesuaian target, menentukan sukses tidaknya program jaring pengaman sosial yang disalurkan. Upaya Jaring Pengaman Sosial ini adalah untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Tidak kalah penting adalah pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil. Program ini menyasar utamanya pada level usaha mikro kecil menengah yang paling rentan terdampak akibat Covid-19. Mereka mesti dibuatkan program yang memungkinkan bertahan dalam kondisi krisis. Selain itu berupaya untuk menjalin sinergi program penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya supaya lebih terarah penanggulangan kemiskinan terutama di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Provinsi Sumatera Barat menyusun dokumen RPKD (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah) tahun 2021-2026, serta dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2023 dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang “Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota”, TKPK Provinsi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya TKPK Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, perlu diselenggarakan fungsi penyusunan Rencana Aksi Provinsi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020. Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka dipandang perlu menyusun dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Provinsi Sumatera Barat Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum dan Kebijakan Operasional

Dasar hukum penyusunan Dokumen RAT (Rencana Aksi Tahunan) tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggungan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.
2. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program – program percepatan penanggulangan kemiskinan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian.
4. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program – program rakyat.
5. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan satu tahun kedepan.
2. Sebagai salah satu referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran perangkat daerah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan,
3. Memberikan arah untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

Tujuan disusunnya Dokumen RAT Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Kemiskinan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga perlu menyusun konsep antisipasi terhadap perubahan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik nasional maupun di daerah,
2. Mengevaluasi hasil capaian kinerja pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun sebelumnya per bidang/urusan,
3. Menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan tahun berjalan per bidang/urusan serta target keberhasilan indikator penanggulangan kemiskinan beserta lokasi prioritas program;
4. Melakukan penjabaran prioritas program yang tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 menjadi Rencana Aksi Provinsi Sumatera Barat bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2023;

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA
BAB III	: KEBIJAKAN DAN STRATEGI TAHUN BERJALAN
BAB IV	: RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2023

BAB II

HASIL EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN SEBELUMNYA

2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan pembangunan dan sosial kemasyarakatan yang perlu diatasi melalui pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan perekonomian. Kemiskinan saat ini adalah sebuah konsep yang bersifat multidimensi dan sulit didefinisikan dalam definisi yang bersifat tunggal. Banyak pakar dari beragam disiplin ilmu telah mencoba mendefinisikan konsep kemiskinan ini. Namun, belum ada yang menyepakati definisi kemiskinan ini dalam satu definisi yang disepakati bersama.

Menurut Adji dkk. (2020) mengutip publikasi Bank Dunia yang berjudul: *Attacking Poverty*, mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan dengan standar kehidupan layak tidak tercapai. Bank Dunia menggunakan ketidakcukupan sandang, pangan, dan papan; ketidakmampuan untuk mengakses perawatan kesehatan; dan rendahnya akses terhadap pendidikan, sebagai indikator untuk menandai seseorang dikategorikan miskin atau tidak.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarkan kemiskinan sebagai kondisi yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. PBB mengajukan beberapa indikator teknis yang lebih spesifik dapat digunakan sebagai penanda miskin atau tidaknya seseorang, seperti kurang gizi, buta huruf, kesehatan yang buruk, pakaian dan perumahan yang tidak layak, dan ketidakberdayaan.

Ini berarti bahwa perspektif yang digunakan menentukan miskin dan tidaknya seseorang pun beragam, mulai dari perspektif ekonomi, sosiologi, hingga perspektif moralitas. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi sanitasi dan lingkungan. Bila kita mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan, definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan

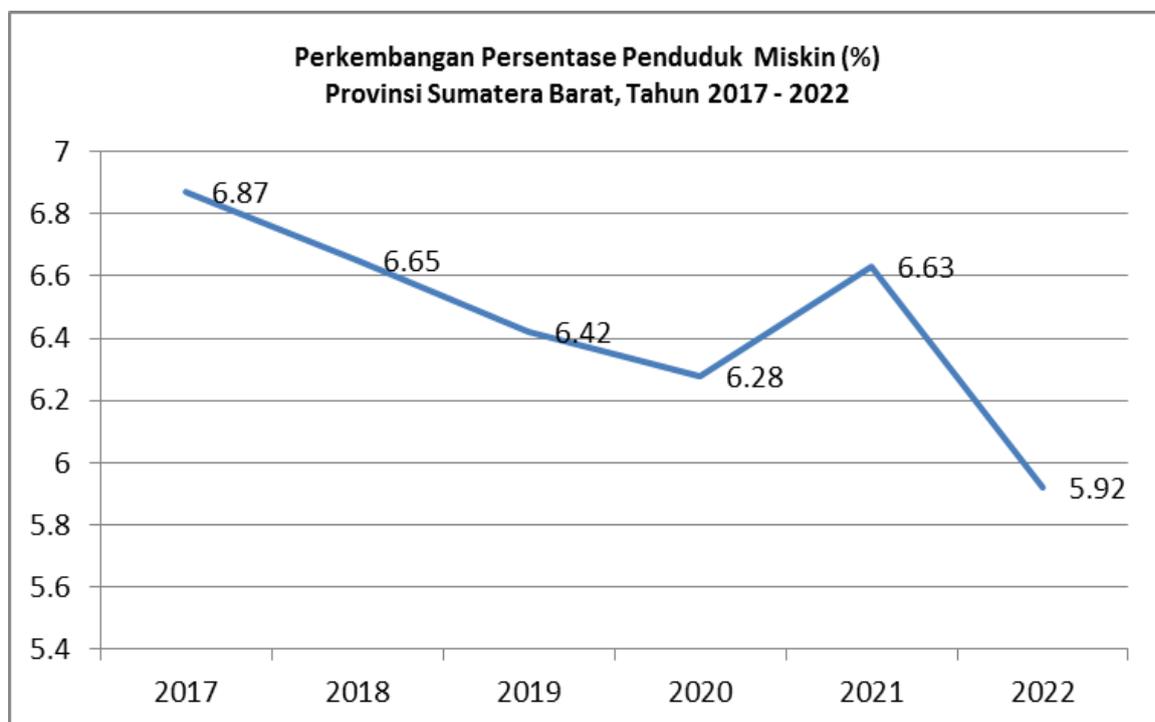
atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Berdasarkan konsep tersebut di atas maka dalam penyusunan dokumen RPKD Provinsi Sumatera Barat, TNP2K membagi profil kemiskinan daerah menjadi dua kelompok bidang besar yakni kemiskinan bidang konsumsi dan kemiskinan bidang non konsumsi, serta beberapa sub bidang dan indikator kinerja (berisi realisasi/capaian dan target) yakni pengeluaran/konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, ekonomi, fiskal, pendapatan dan belanja daerah, serta indikator daerah lainnya.

2.1.1 Persentase Penduduk Miskin (P0)

Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,87. Pada tahun 2018 persentase penduduk miskin Sumatera Barat pada titik 6,65 persen atau berkurang 0,22 persen dibandingkan pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,42 persen. Dan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,28 persen atau turun sebesar 0,14 persen dan pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Sumatera Barat sebesar 6,63 persen naik sebesar 0,35 persen dibandingkan pada tahun 2020. Persentase penduduk Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 5,92 persen turun sebesar 0,71 persen dibandingkan Tahun 2020. Persentase penduduk kemiskinan Sumatera Barat dari tahun 2017 sampai 2020 terus mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 persentase naik 0,35 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu 0,71 persen.

Grafik 2.1
Perkembangan persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS

Gambar 3.1
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan September tahun 2021, persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berada di bawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional, dimana nilai perbedaan persentase tersebut mencapai 3 digit. Dari 34 Provinsi di Indonesia terdapat 20 Provinsi yang mengalami penurunan persentase Kemiskinan Ekstrem dan 14 Provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem. Secara Nasional Provinsi Sumatera Barat nomor 6 terendah dari 34 Provinsi yaitu sebesar 5,92% (BPS, Maret 2022) dan di Tingkat Regional Pulau Sumatera, Sumatera Barat peringkat 2 tersendah Kemiskinannya setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,45%

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan dari 7,14 Tahun 2016 menjadi 6,04 persen Tahun 2021, yang berarti setiap tahun mengalami penurunan 0,22 persen. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat cukup efektif. Efektivitas pelaksanaan intervensi tersebut sudah menunjukkan hasil yang maksimal dengan dilihat dari tahun ketahun mengalami penurunan yang relatif stabil dalam periode 2016-2021. Ini juga diperkuat oleh data persentase penduduk miskin Sumatera Barat pada bulan Maret 2022 dengan angka 5,29 persen yang menunjukkan angka penurunan dari bulan September 2021 lalu dengan angka 6,04 persen.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 10,70 persen tahun 2016 menjadi 9,22 pada tahun 2019 dan sedikit meningkat menjadi 9,71 persen tahun 2021.

Demikian pula persentase penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami penurunan yang stabil dari tahun 2016 dengan angka sebesar 7,14 menjadi 6,04 sampai September 2021 dan mengalami penurunan lagi menjadi 5,29 pada Maret 2022. Kondisi tersebut menunjukkan terdapat relevansi kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

2.1.1.1 Kemiskinan Perdesaan

Berdasarkan kewilayahan, Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat berada pada posisi 7.97 persen. Pada Tahun 2018 penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat sebesar 7,90 persen menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 0,7 persen. Tahun 2019 pesentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat sebesar 7,69 persen menurun 0,11 pesen dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase penduduk miskin perdesaan tahun 2020 sebesar 7,83 persen naik dibandingkan Tahun 2019 sebesar 0,14 persen. Dan persentase penduduk miskin pedesaan Sumatera Barat tahun 2021 sebesar 7,23 persen menurun dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,60 persen. Persentase penduduk miskin pedesaan Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 7,20 persen turun dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,3 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perdesaan Sumatera Barat Tahun 2016 sampai Tahun 2019 terdapat penurun sebesar 0,28 persen kemudian naik sebesar 0,14 pada Tahun 2020 dan turun sebesar 0,63 persen pada Tahun 2022.

Grafik 2.2
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-Desa
Sumatera Barat tahun 2017 – 2022



Sumber : BPS Sumbar

Gambar 2.3
Analisis Identifikasi Permasalahan Persentase Penduduk Miskin-Desa
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa pada data kemiskinan bulan September tahun 2021, persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berada (7,23 persen) di bawah rata-rata persentase penduduk miskin nasional (12,53 persen). Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke enam persentase penduduk miskin terendah, setelah Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah. Di tingkat regional Pulau Sumatera, persentase penduduk miskin desa di Provinsi di Sumatera berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.3 di atas menunjukkan bahwa persentase penduduk desa masih tinggi, dalam lima tahun terakhir persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah sudah memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan. Ini menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan masih lebih tinggi dari persentase penduduk miskinnya dibandingkan dari wilayah perkotaan.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat sudah efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi sudah secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Akan tetapi masih

terdapat hal lain yang yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa yaitu lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

Analisis Relevansi

Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 13,96 pada tahun 2016 menjadi 12,53 tahun 2021. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai september 2021 yaitu di angka 8,27 tahun 2016 menjadi 7,23 persen pada tahun 2021. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumah tangga miskin di desa.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari indikator persentase penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

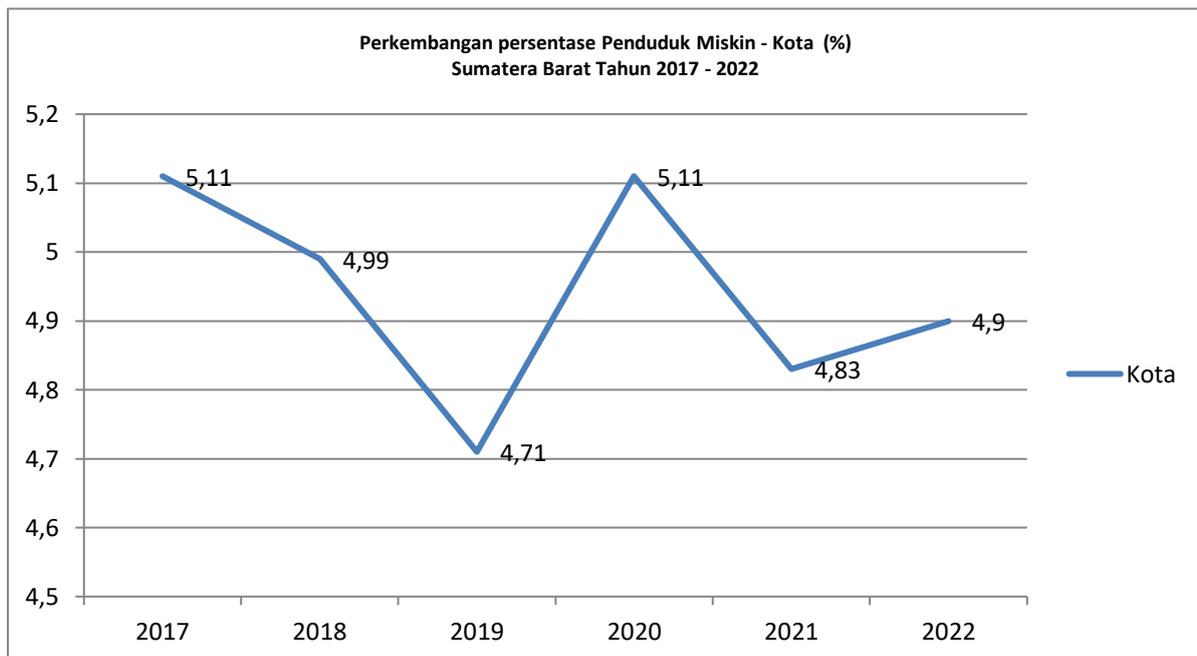
1. Kemiskinan di wilayah perdesaan berkontribusi agak tinggi terhadap masih tingginya persentase masyarakat miskin. Namun demikian, persentase penduduk miskin di perdesaan Sumatera Barat dalam 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan mendekati rata-rata kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.
2. Walaupun persentase kemiskinan di perkotaan Sumatera Barat berada di bawah persentase kemiskinan Nasional di daerah perkotaan, tetapi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tetap berusaha menurunkan angka kemiskinan di daerah perkotaan dengan berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Tingginya persentase masyarakat miskin di perdesaan menunjukkan bahwa intervensi program dan kegiatan selama lima tahun terakhir belum secara signifikan menurunkan angka kemiskinan di desa. Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi dan ekonomi di daerah kantong kemiskinan perdesaan masih kecil kontribusinya dalam menurunkan biaya hidup masyarakat perdesaan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

2.1.1.2 Kemiskinan Perkotaan

Berdasarkan kewilayahan, Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat berada pada posisi 5,11 persen. Pada Tahun 2018 penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat sebesar 4,99 persen menurun jika dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 0,12 persen. Tahun 2019 persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat sebesar 4,71 persen menurun 0,28 persen dibandingkan dengan tahun 2018. Persentase penduduk miskin perkotaan Tahun 2020 sebesar 5,11 persen naik dibandingkan Tahun 2019 sebesar 0,40 persen. Dan persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat Tahun 2021 sebesar

4,83 persen menurun dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 0,28 persen. Persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat Tahun 2022 sebesar 4,90 persen naik dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar 0,7 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin perkotaan Sumatera Barat Tahun 2016 sampai Tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 0,40 persen kemudian naik sebesar 0,28 pada tahun 2020 dan turun sebesar 0,28 persen pada Tahun 2021 dan naik sebesar 0,40 tahun 2022.

Grafik 2.3
Perkembangan persentase Penduduk Miskin-Perkotaan
Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS Sumbar



Analisis Posisi Relatiff

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin kota pada tahun 2021 di Sumatera Barat sebesar 134.530 Jiwa, masih jauh lebih rendah dibanding provinsi di daerah Jawa, Sulawesi dan Papua. Namun dalam skala regional Sumatera, jumlah penduduk miskin kota dan desa di Sumatera Barat masih berada di atas Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Kepulauan Bangka Belitung , namun lebih rendah dibanding dengan kelima provinsi lain di Sumatera. Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi dan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai jumlah penduduk miskin yang paling rendah yaitu sebesar 49.450 Jiwa

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Gambar 3.5 dan 3.6 menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk miskin perkotaan di Sumatera Barat relatif mengalami fluktuatif. Sementara jumlah penduduk miskin di desa cenderung mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di pedesaan mampu memberikan efek penurunan tingkat kemiskinan yang cukup baik, walaupun secara umum belum maksimal.

Analisis Efektivitas

Jika ditinjau dari trend penurunan persentase penduduk miskin pedesaan dalam lima tahun terakhir di Sumatera Barat, dapat dikatakan bahwa program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat sudah efektif. Intervensi program yang dilakukan pemerintah provinsi sudah secara nyata merubah tingkat kesejahteraan masyarakat pedesaan terutama nelayan dan petani. Akan tetapi masih terdapat hal lain yang menyebabkan lambannya penurunan persentase kemiskinan di desa yaitu lambannya pembangunan infrastruktur desa, baik transportasi, listrik, prasarana dan sarana air bersih, dan komunikasi. Kondisi ini menyebabkan alur distribusi dan informasi harga barang kurang lancar sehingga harga output pertanian yang dihasilkan petani dan nelayan relatif rendah dan cenderung berfluktuatif. Di lain pihak harga-harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sosial lain cenderung meningkat.

Analisis Relevansi

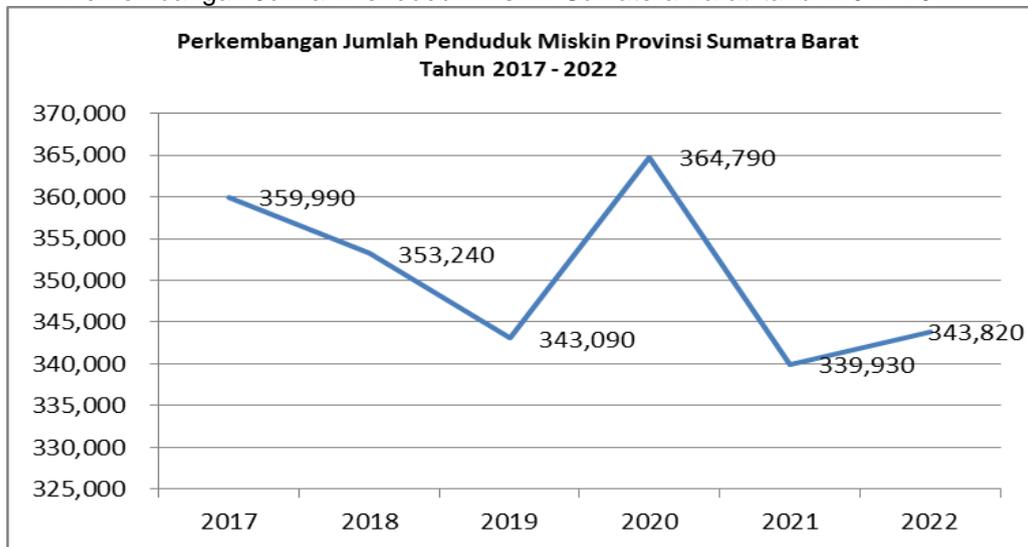
Jika ditinjau dari analisis relevansi, penurunan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat berbanding lurus dengan penurunan persentase penduduk miskin secara nasional. Persentase penduduk miskin Nasional konsisten menurun dari 13,96 pada tahun 2016 menjadi 12,53 tahun 2021. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin desa di Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai september 2021 yaitu di angka 8,27 tahun 2016 menjadi 7,23 persen pada tahun 2021. Diharapkan penurunan persentase penduduk miskin desa ini akan terus sampai periode pemerintahan daerah berikutnya dengan program dan kegiatan yang menyentuh langsung rumah tangga miskin di desa.

2.1.2 Jumlah Penduduk Miskin

Pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 359,990 jiwa, Tahun 2018 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 353,240 atau turun sebanyak 6,750 jiwa. Pada Tahun 2019 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 343,090 jiwa atau turun sebanyak 10,150 jiwa. Pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 363,790 naik sebanyak 21,700 jiwa dari Tahun 2019. Pada Tahun 2021 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 339,930 jiwa atau turun sebanyak 24,860 jiwa. Dan pada Tahun 2022 jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 343,820 naik sebanyak 3,890 jiwa. Dalam periode Tahun 2017 sampai tahun 2019 penduduk miskin Sumatera Barat turun sebanyak 16,900 jiwa, Kemudian naik pada Tahun 2020 sebanyak 21,700 dan turun pada Tahun 2022 sebanyak 20,970 jiwa.

Grafik 2.4

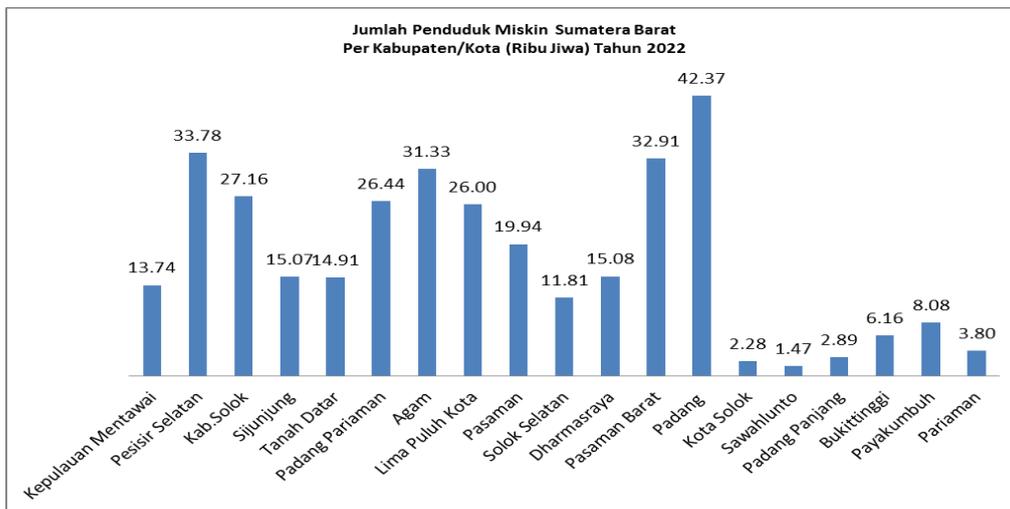
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS Sumbar

Berdasarkan kemiskinan absolutnya atau jumlah penduduk miskin, di Sumatera Barat terdapat 5 Kabupaten/Kota kantong kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang paling banyak ada di Kota Padang dengan jumlah sekitar 42,37 jiwa, selanjutnya yang kedua adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah 33,78 jiwa, yang ketiga adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah 32,91 jiwa, yang keempat ada di Kabupaten Agam dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 31.33 jiwa, dan yang kelima adalah Kabupaten Solok dengan jumlah 27,16 jiwa

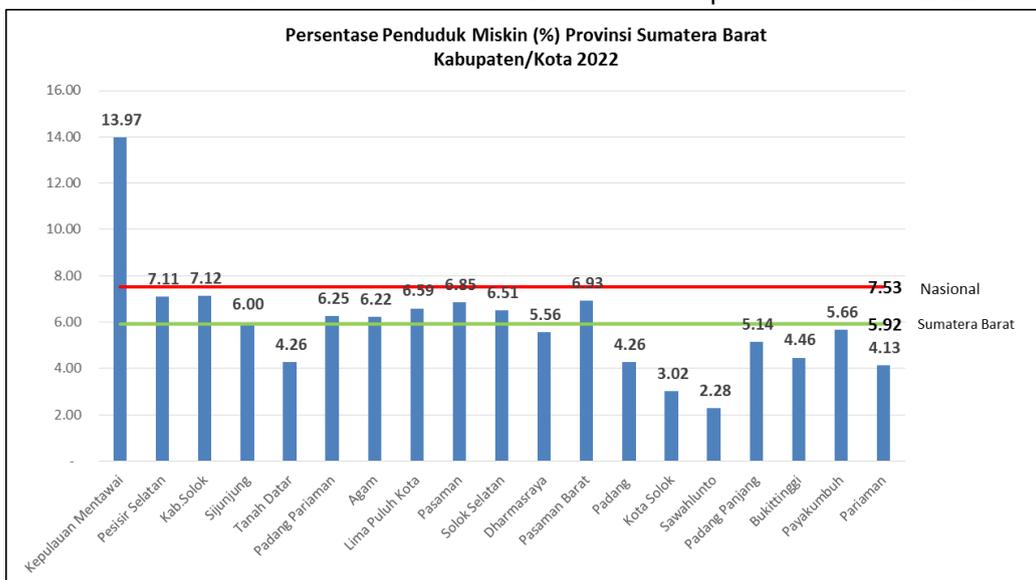
Grafik 2.5
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat (Rib u Ji wa)
Per kabupaten/Kota tahun 2022



Sumber : BPS

Sedangkan jika berdasarkan persentase penduduk miskin kabupaten di Sumatera Barat pada tahun 2022, dengan persentase penduduk miskin yang paling besar adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sekitar 13,97 persen. Sedangkan Kabupaten/kota dengan persentase jumlah penduduk miskin terkecil adalah Kota Sawahlunto sebesar 2,28 persen

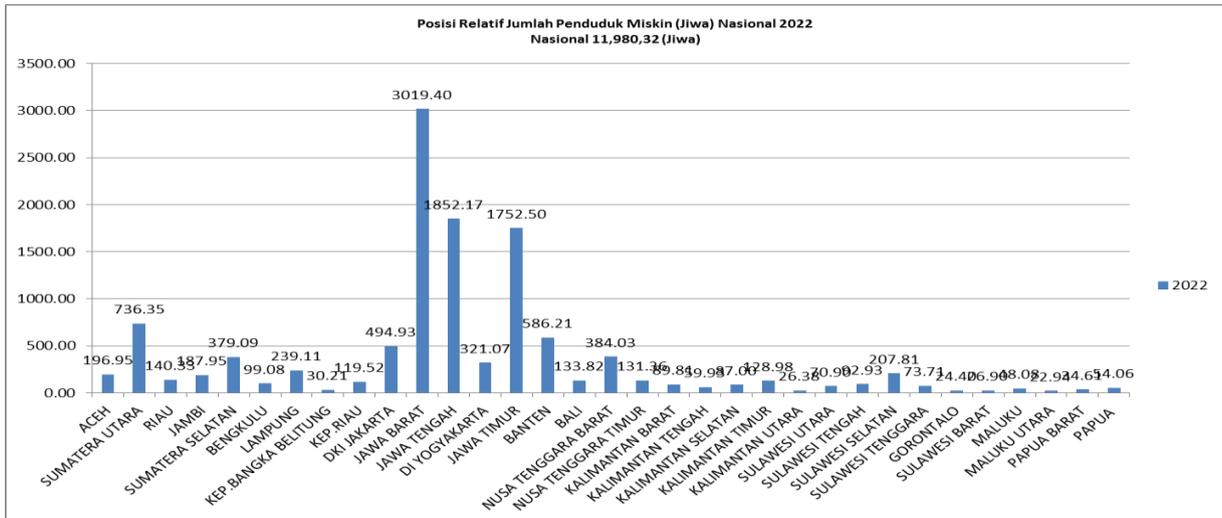
Grafik 2.6
Persentase Penduduk Miskin Sumatera Barat Per kabupaten/Kota tahun 2022



Sumber : BPS Sumbar

Berdasarkan konsep kemiskinan sebelumnya, maka jumlah penduduk miskin adalah banyaknya penduduk (orang) pada suatu daerah dan waktu tertentu yang kondisi taraf hidupnya dianggap lebih rendah dari standar kemiskinan yang dikenal sebagai garis kemiskinan. Hasil analisis permasalahan jumlah penduduk miskin (orang) kota dan desa di Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.4, Gambar 3.5, dan Gambar 3.6.

Gambar 3.4
Analisis Identifikasi Permasalahan Jumlah Penduduk Miskin
Nasional Tahun 2022

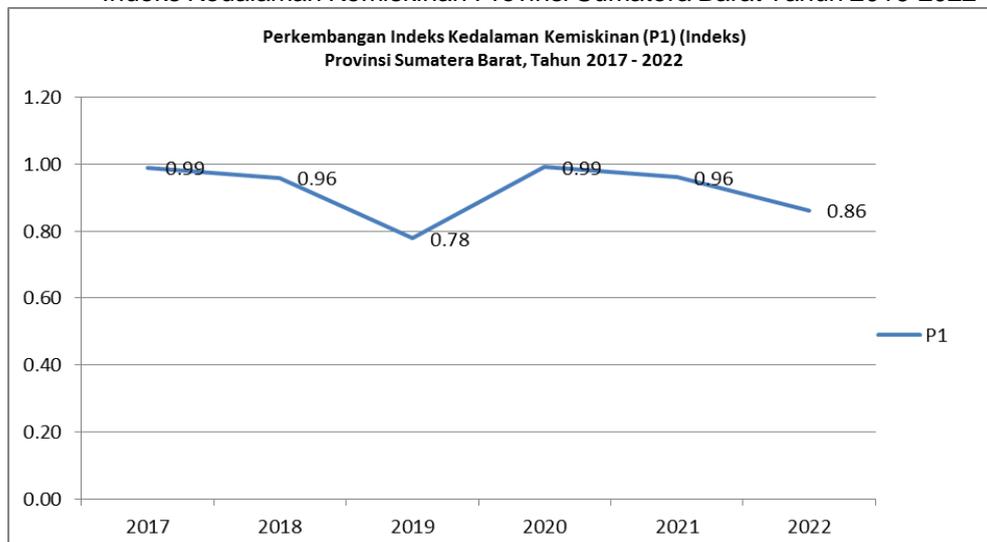


2.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)

Penanggulangan kemiskinan bukan hanya menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tetapi lebih dari itu yang terpenting adalah bagaimana mengatasi kedalaman kemiskinan Sumatera Barat. Kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Sumatera Barat sebesar 0,99 poin. Pada Tahun 2018 tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,96, dan menurun dibandingkan Tahun 2017 sebesar 0,03. Pada Tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat turun sebesar 0,18 menjadi 0,78. Pada Tahun 2020 sebesar 0,99 naik sebesar 0,21 dan pada Tahun 2021 sebesar 0,96 turun sebesar 0,03 dan pada Tahun 2022 tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 0,86 turun sebesar 0,10 dibandingkan dengan Tahun 2021

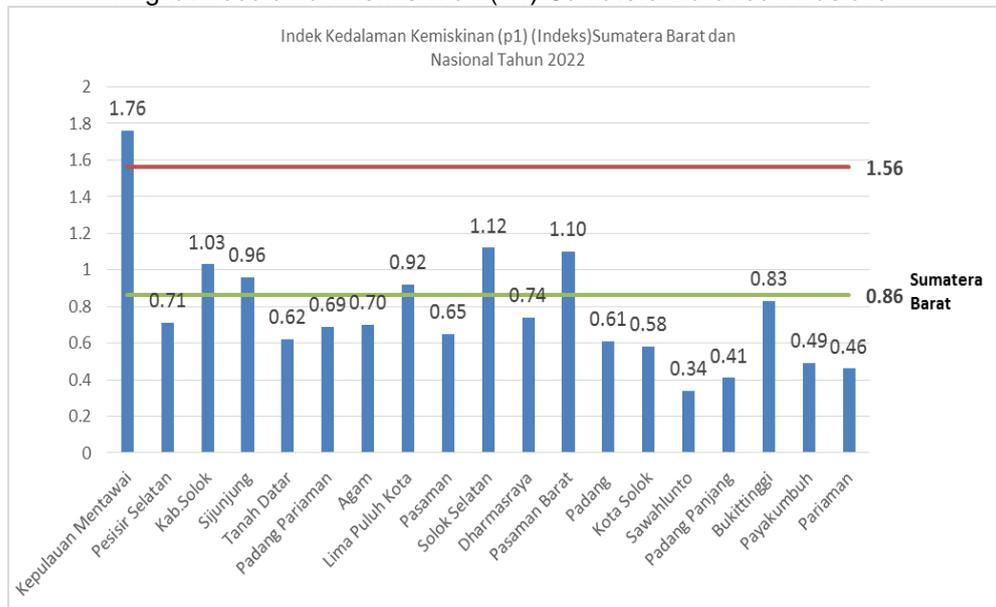
Grafik 2.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022



Sumber : BPS Sumbar

Pada Tahun 2022 Tingkat kedalaman kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,86 sedangkan tingkat Kedalam kemiskinan (P1) Nasional sebesar 1,58. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan nasional lebih tinggi dari Sumatera Barat .

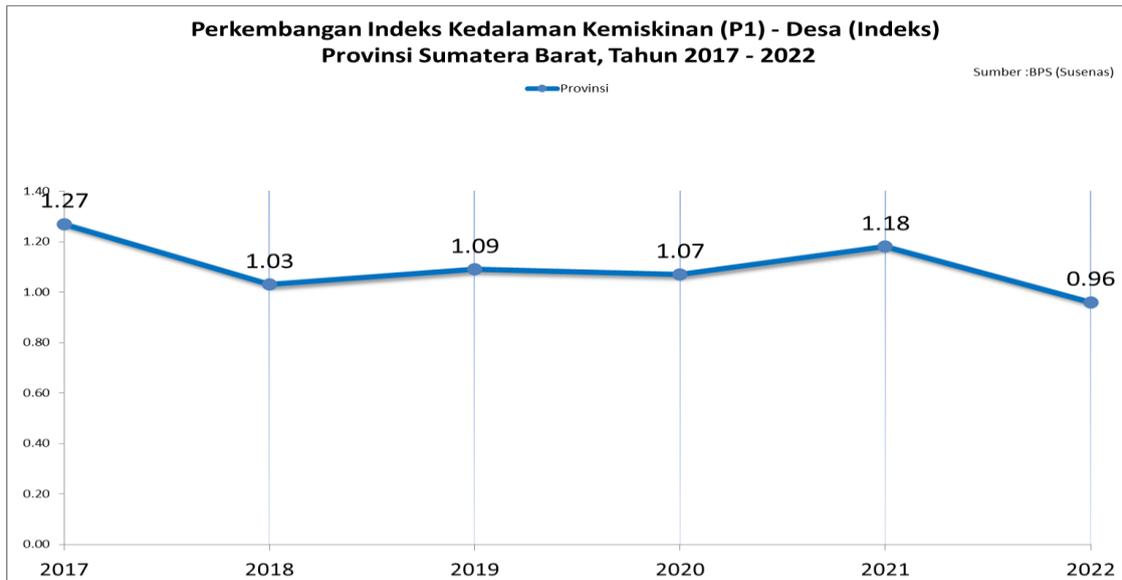
Grafik 2.9
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : BPS

Tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Perdesaan Sumatera Barat sebesar 1,27 dan pada Tahun 2018 sebesar 1,03 turun sekitar 0.24. pada Tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 1,00 naik 0,06 dibandingkan dengan tahun 2018. Pada tahun 2020 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat 1,07 turun sekitar 0,02 dari tahun 2019. Pada tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat sebesar 1,18 naik sekitar 0,11 dari tahun 2020, dan pada tahun 2022 tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat 0,96 turun sekitar 0,22 dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dilihat tingkat kedalaman kemiskinan pedesaan Sumatera Barat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 turun pada angka 0,31.

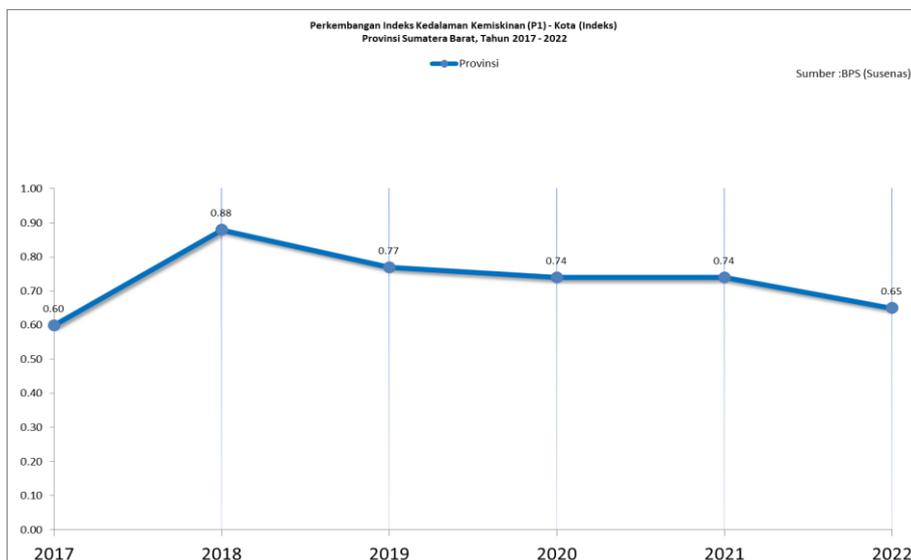
Grafik 2.10
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Desa
Sumatera Barat – Kab/kota tahun 2017-2022



Sumber : BPS

Tahun 2017 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sekitar 1,60 dan pada Tahun 2018 sekitar 0,88 naik sekitar 0,28. Pada Tahun 2019 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat 0,77 turun sekitar 0,11 dibandingkan dengan tahun 2018. Pada Tahun 2020 kedalaman Kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,74 turun 0,03 dibandingkan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat kedalaman kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sekitar 0,74 turun sama dibandingkan dengan Tahun 2020, dan pada Tahun 2022 tingkat kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,65 turun sebesar 0,09 dibandingkan dengan Tahun 2021. Jika dilihat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 tingkat kedalamam kemiskinan perkotaan Sumatera Barat naik sebesar 0,05 point.

Grafik 2.11
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Perkotaan
Sumatera Barat – Kab/kota tahun 2017-2022



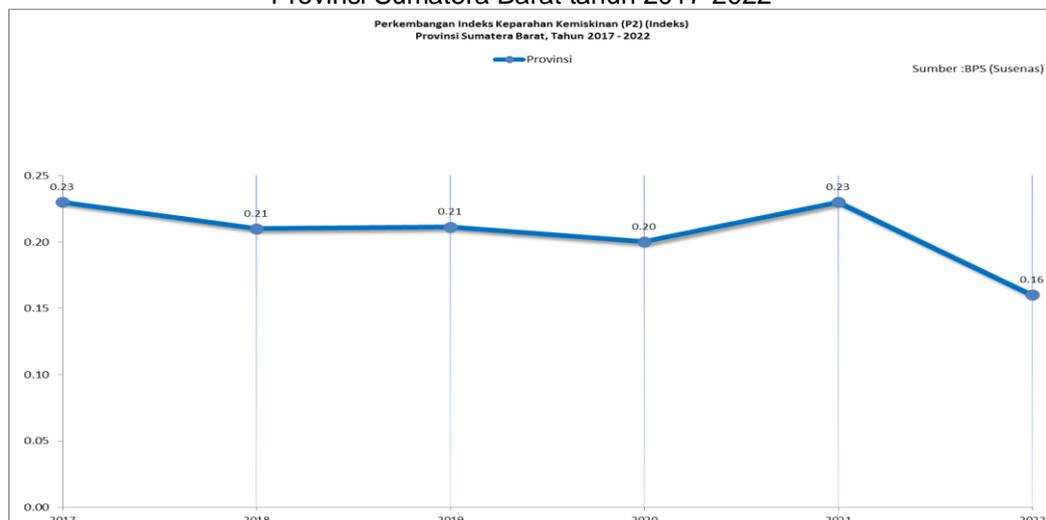
Sumber : BPS

2.1.4 Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)

Tingkat keparahan kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada Tahun 2017 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sekitar 0,23 dan pada Tahun 2018 sebesar 0,21 turun sebesar 0,02. Pada Tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,21 sama dibandingkan Tahun 2018. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,20 turun sebesar 0,01 dibanding dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat sebesar 0,23 turun 0,03 dari Tahun 2020 dan pada tahun 2022 sebesar 0,16 turun sebesar 0,07 dibandingkan dengan tahun 2021. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai 2022 maka tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat turun sekitar 0,07 point.

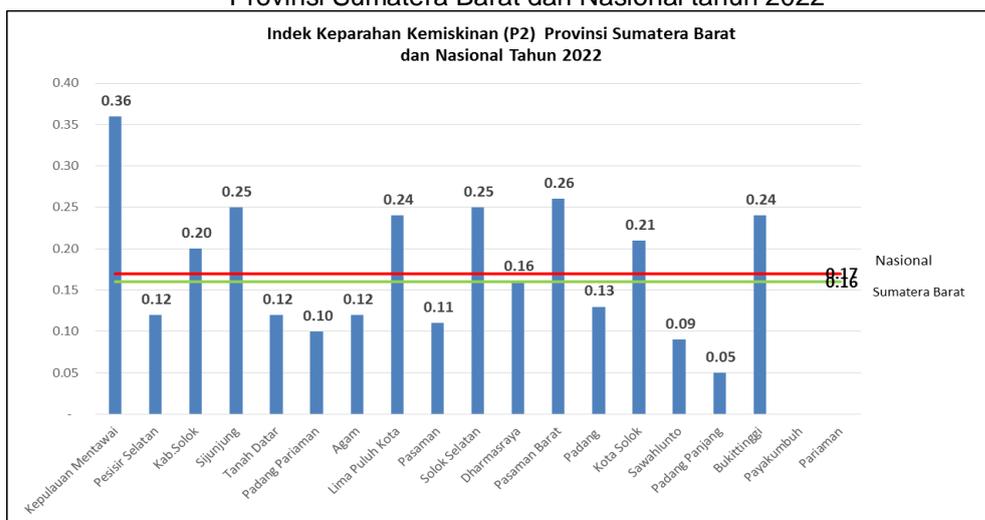
rafik 2.12
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS

Pada Tahun 2022 Tingkat keparahan kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah dari capaian Nasional, yaitu 0,16 sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (P2) Nasional sebesar 0,17.

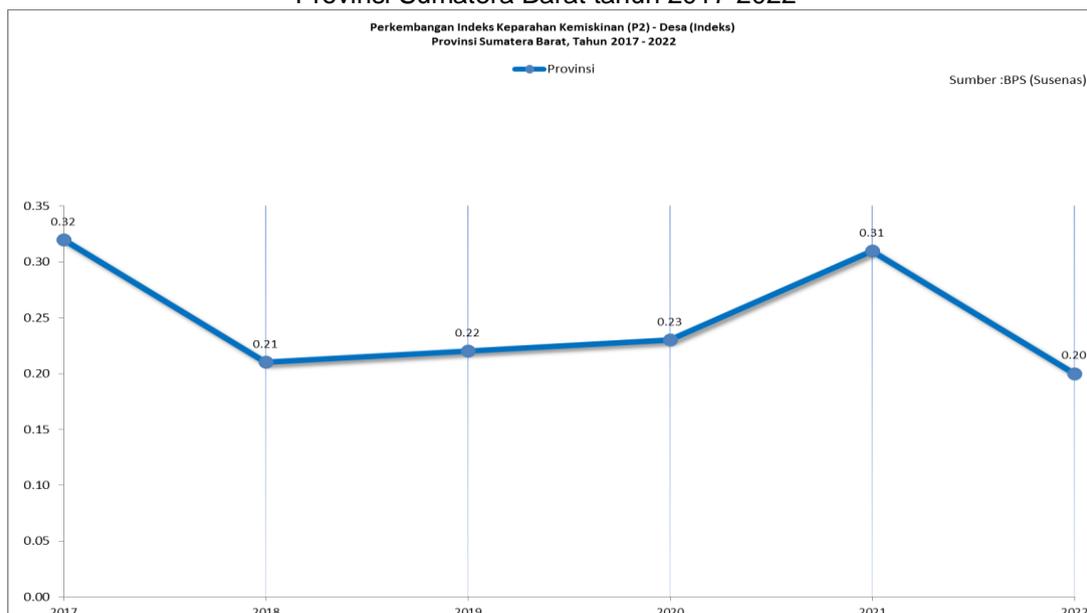
Grafik 2.12
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022



Sumber : BPS

Pada Tahun 2017 tingkat keparahan kemiskinan perdesaan Sumatera Barat sebesar 0,32 dan pada Tahun 2018 sebesar 0,21, turun sebesar 0,11. Pada Tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan perdesaan Sumatera Barat sebesar 0,22 naik sebesar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2018. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan perdesaan Sumatera Barat sebesar 0,23 naik sebesar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan perdesaan Sumatera Barat sebesar 0,31, naik sekitar 0,12 dan pada Tahun 2022 sebesar 0,20 turun sebesar 0,11 dibandingkan dengan Tahun 2021. Jika dilihat dari Tahun 2017 sampai 2022 tingkat keparahan kemiskinan perdesaan Sumatera Barat turun sebesar 0,12

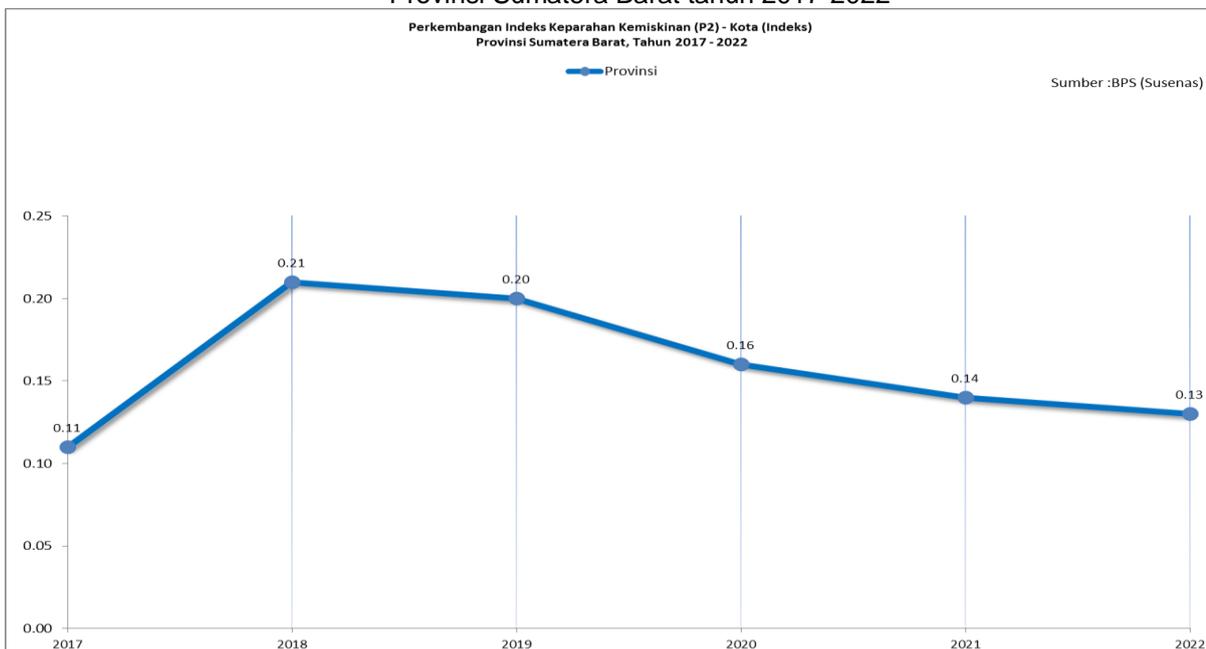
Grafik 2.13
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) - Desa
Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS

Pada Tahun 2017 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,11 dan pada Tahun 2018 sebesar 0,21 naik sekitar 0,10. Pada Tahun 2019 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0.20 turun sekitar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2018. Pada Tahun 2020 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat 0,16 turun 0,04 dibandingkan Tahun 2019. Pada Tahun 2021 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,14 turun sekitar 0,02 dibandingkan Tahun 2020, dan pada Tahun 2022 tingkat keparahan kemiskinan perkotaan Sumatera Barat sebesar 0,13 turun sekitar 0,01 dibandingkan dengan Tahun 2021

Grafik 2.14
Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) - Kota
Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022



Sumber : BPS

2.2 Hasil Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan

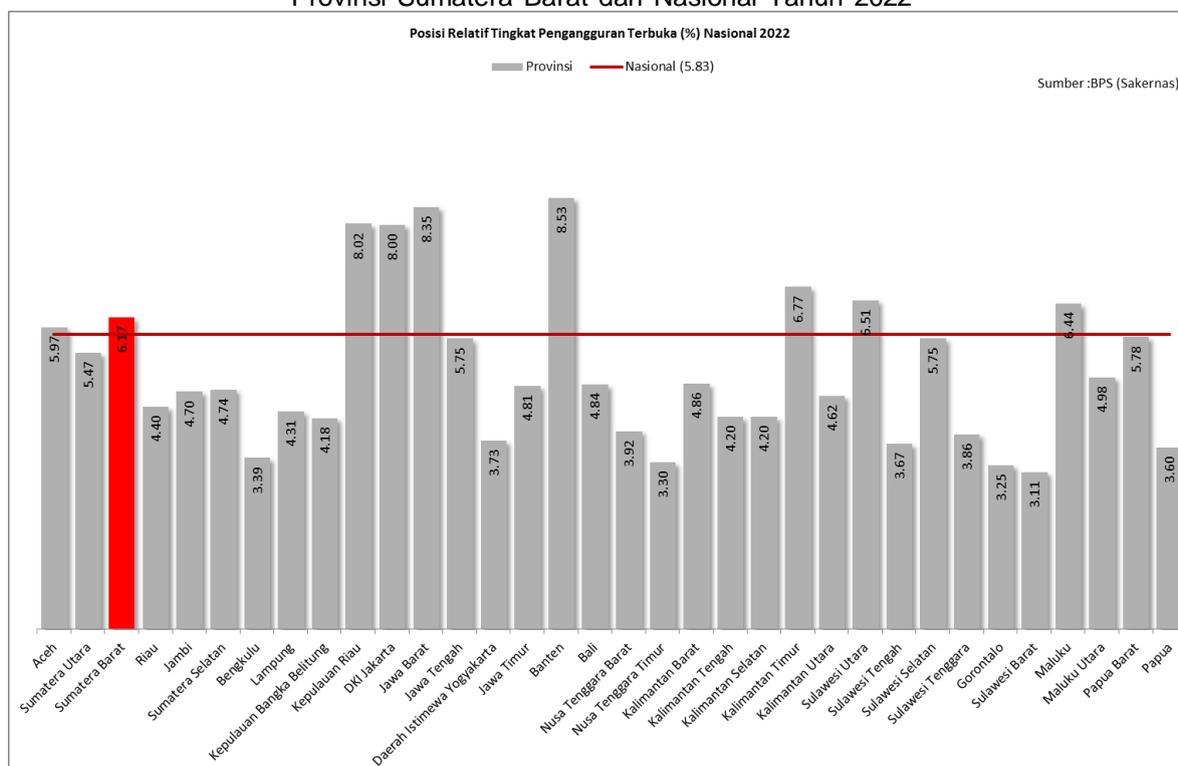
2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Bidang ketenagakerjaan menjadi program prioritas pembangunan Gubernur Sumatera Barat yang merupakan bentuk komitmen kepada rakyat. Program prioritas pembangunan bidang ketenagakerjaan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam visi Gubernur Sumatera Barat yaitu Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan dimana ketenagakerjaan mendapatkan perhatian yang utama dari Gubernur Sumatera Barat, karena ketenagakerjaan merupakan penyumbang terbesar keberhasilan pembangunan. Disisi lain ketenagakerjaan juga merupakan salah satu penyebab penghambat pembangunan, yakni dengan munculnya permasalahan sosial di bidang ketenagakerjaan. Permasalahan sosial yang timbul dari bidang ketenagakerjaan adalah semakin banyaknya pengangguran. Segala bentuk pengangguran inilah menyumbang angka kemiskinan di Sumatera Barat. Pengangguran adalah penduduk berumur 15 tahun atau lebih yang tidak bekerja sama sekali. Pengangguran merupakan salah satu indikator dalam bidang ketenagakerjaan, terutama pengangguran terbuka. Pengangguran Terbuka adalah

angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Beberapa kategori yang termasuk dalam pengangguran terbuka adalah tidak punya pekerjaan dan yang mencari pekerjaan, tidak punya pekerjaan dan yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka, semakin rendah peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong timbulnya permasalahan sosial.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2022 sebesar 6,17 %. Capaian ini menunjukkan TPT Sumatera Barat lebih tinggi sekitar 0,34 % dibandingkan dengan capaian TPT Nasional yang sebesar 5,83 %.

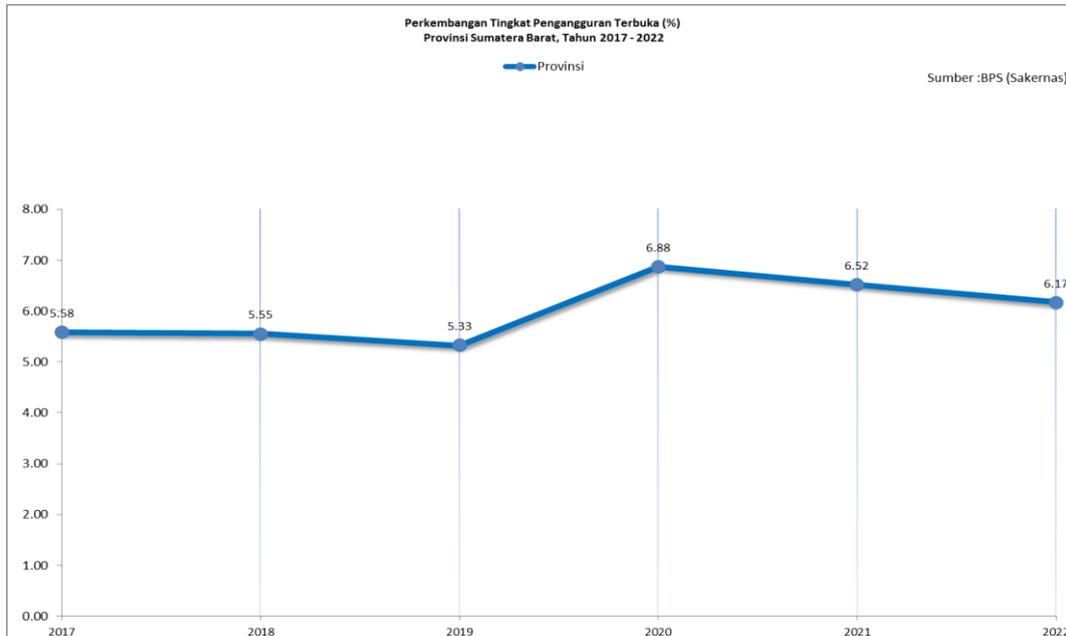
Grafik 2.15
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022



Sumber : BPS

Secara time series atau dari periode 2017-2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat berfluktuasi, dimana pada Tahun 2017 sebesar 5,58 persen, Tahun 2018 turun menjadi 5,55 persen, Tahun 2019 turun menjadi 5,33, pada Tahun 2020 naik menjadi 6,88, Tahun 2021 turun menjadi 6,52 dan pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 6,17 persen secara periode dari Tahun 2017 sampai Tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat sebesar naik 0,59 persen

Grafik 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022



Seiring dengan beberapa kebijakan untuk mengurangi angka pengangguran, maka pada Tahun 2018 persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat kembali mengalami penurunan yaitu berada di titik 5,55 persen. Tren penurunan tersebut terus berlanjut pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019 yang berada pada titik 5,33 %. Namun pada tahun 2020, Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sekitar 1,55 persen dari titik 5,33 persen pada tahun 2019 menjadi 6,88 persen pada tahun 2020. Berfluktuasinya persentase tingkat pengangguran terbuka Sumatera Barat karena adanya program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengurangi jumlah pengangguran yang tepat. Namun pada Tahun 2020 di masa adanya Pandemi Covid 19 dan pemerintah membuat suatu kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar maka berdampak juga pada sektor ketenagakerjaan dengan adanya PHK Buruh dan pengurangan jam kerja sehingga menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi naik.

2.3 Hasil Evaluasi Bidang Kesehatan

Upaya untuk menjaga kesehatan dapat dilakukan melalui upaya promotif dan preventif, dalam rangka mengurangi tindakan kuratif. Itu sebabnya pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pembangunan bidang kesehatan tidak saja secara fisik (sarana dan prasarana kesehatan) tetapi juga peningkatan kualitas layanan kesehatan. Pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan profesional terus dilakukan agar penyediaan

layanan kesehatan tidak hanya terfokus pada wilayah dengan infrastruktur yang sudah baik saja. Indikator kesehatan dapat menunjukkan sejauh mana upaya-upaya kesehatan yang telah dilakukan membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Beberapa indikator yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam bidang kesehatan, dapat digunakan untuk melihat gambaran derajat kesehatan penduduk di Sumatera Barat. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan apakah suatu negara, dalam tataran lebih luas atau provinsi dan kabupaten/kota dalam tataran daerah memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang baik atau tidak. Indikator yang umum dipakai adalah : Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), dan lain-lain.

2.3.1 Umur Harapan Hidup

Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya tercermin dari Angka usia harapan hidup penduduk (UHH). Keberhasilan pembangunan disuatu daerah salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi cerminan keberhasilan bidang kesehatan. Untuk itulah UHH selalu menjadi salah satu indikator untuk menilai keberhasilan itu. Setiap Tahun semua daerah mengumumkan Human Development Indeks/Indeks Pembangunan Manusia. Umur harapan Hidup merupakan salah satu komponen dari IPM, Umur Harapan Hidup masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan IPM suatu daerah akan naik, dan ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

2.4 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan

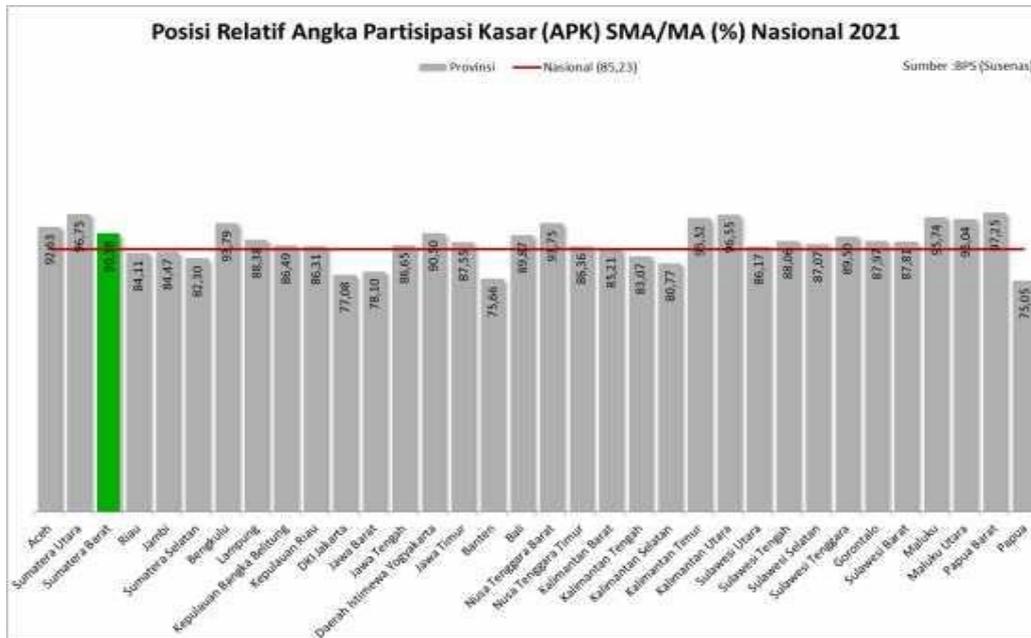
2.4.1 Angka Partisipasi Kasar SMA/MA

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah murid pada tingkat pendidikan SLTA dibagi dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun.

2.4.1.1 Posisi Relatif

Pada Tahun 2021 APK SMA/MA Provinsi Sumatera Barat sebesar 90,38%, capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional yaitu 84,53%. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, Angka Partisipasi Kasar SMA/MA Provinsi Sumatera Barat peringkat 4 dari 10 provinsi di Sumatera. Dan menduduki posisi ke 11 dari 34 Provinsi.

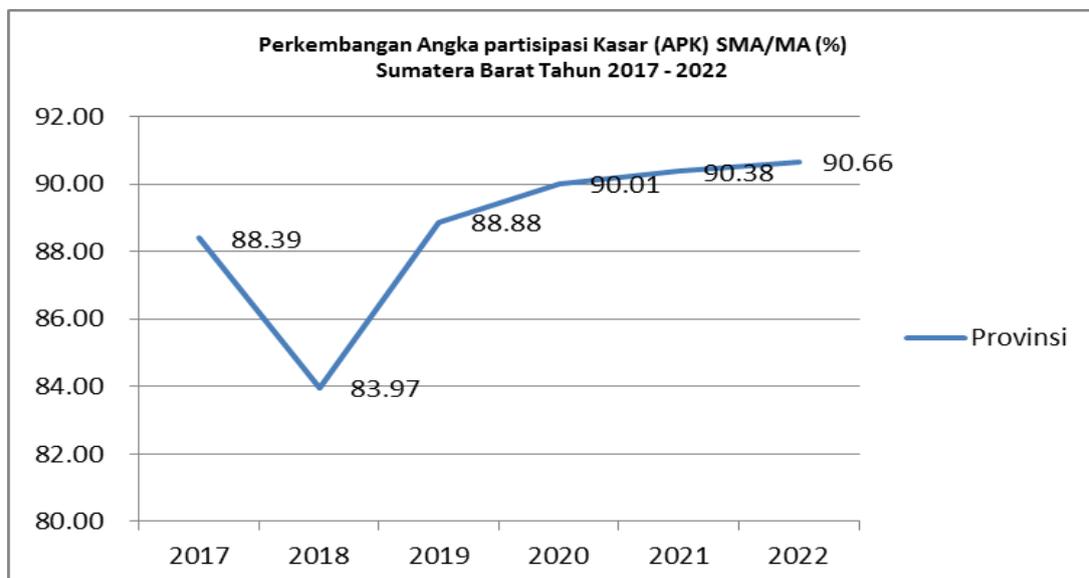
Grafik 2.17
 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA
 Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2021



2.4.1.2 Perkembangan Antar Waktu

Berdasarkan Grafik 2.18 secara time series APK SMA/MA tahun 2017-2022 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 APK SMA/MA Sumatera Barat 88,39 persen, dan turun pada tahun 2018 menjadi 83,97 persen. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 88,88 persen, pada tahun 2020 naik menjadi 90,01 persen. namun Kembali mengalami kenaikan menjadi 90,38 pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 90,66 persen. Dilihat dari periode tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 2,27 persen.

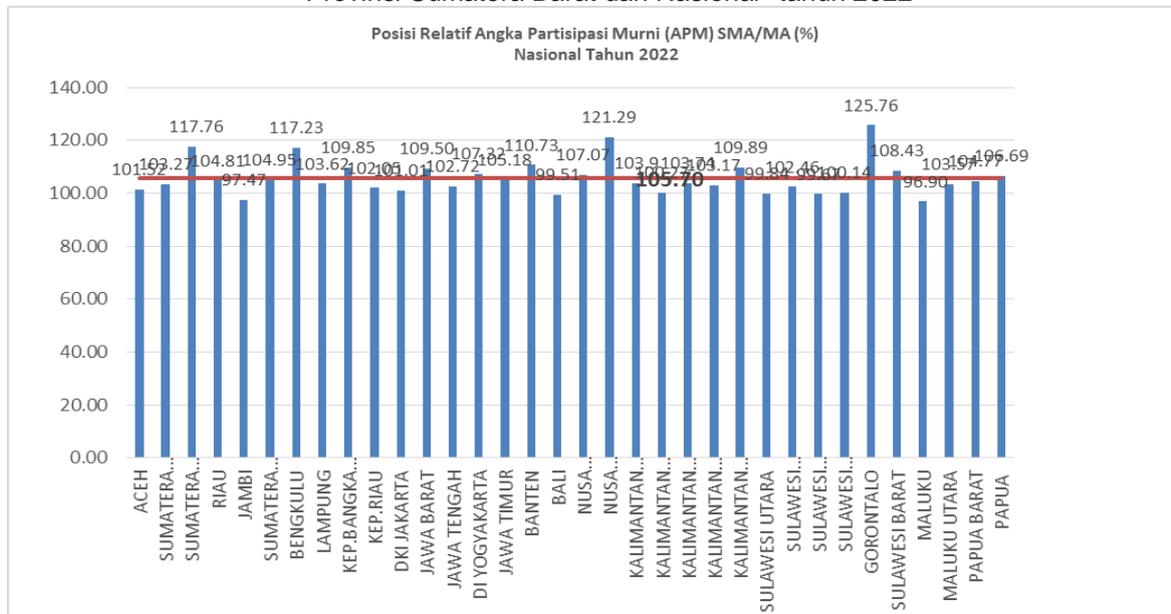
Grafik 2.18
 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (%)
 Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022



2.4.2 Angka Partisipasi Murni SMA/MA

Angka Partisipasi Murni SMA/MA adalah perbandingan penduduk menurut usia pendidikan yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan yang bersesuaian usia 16-18 tahun di SLTA, dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun untuk SLTA.

Grafik 2.19
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2022

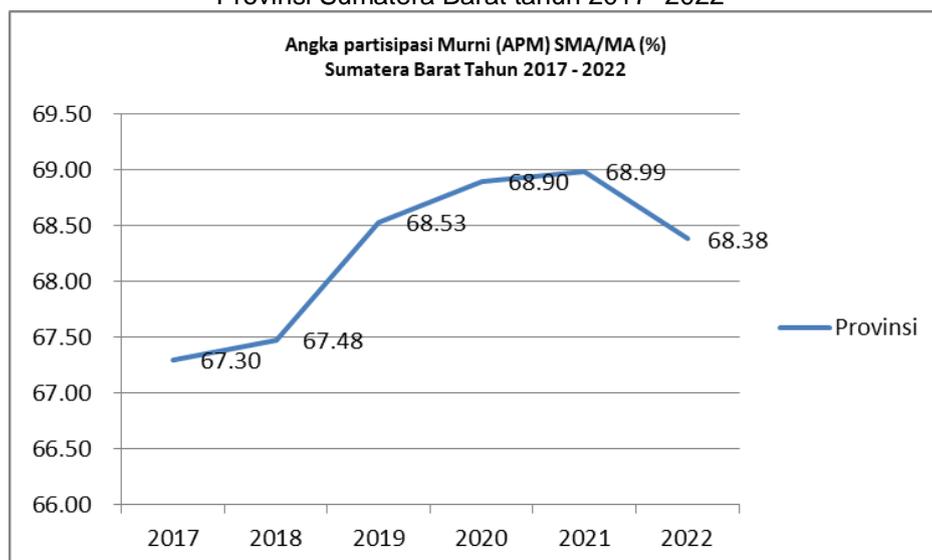


Sumber : BPS

Pada Tahun 2022 capaian APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat sebesar 117,76 persen lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tingkat Nasional sebesar 105,70 persen. Dibandingkan dengan provinsi lain Angka Partisipasi Murni SMA/MA Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 secara Nasional. Dan jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sumatera, capaian APM SMA/MA Sumatera Barat ini tertinggi Ke-3 setelah Provinsi Nusatenggara Timur dan Gorontalo. Secara Nasional capaian APM SMA/MA tahun 2022 tertinggi diduduki oleh Provinsi gorontalo yaitu sebesar 125,76 persen. Sedangkan Provinsi dengan capaian APM SMA/MA terendah tahun 2022 adalah Provinsi Maluku sebesar 96,90 persen.

Berdasarkan Grafik 2.20 Perkembangan APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2022, pada tahun 2017 APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat sebesar 67,30 persen, tahun 2018 sebesar 67,48 persen, naik 0,18 point. Pada tahun 2019 naik menjadi 68,53, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi 68,90 persen. Pada tahun 2021 naik menjadi 68,99 persen dan pada tahun 2022 turun menjadi 68,28 persen. Jika dilihat dari tahun 2017 sampai 2022 perkembangan APM SMA/MA Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar 1,08 persen

Grafik 2.20
 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA (%)
 Provinsi Sumatera Barat tahun 2017- 2022



Sumber : BPS

2.5 Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

Ketersediaan prasarana dan sarana infrastruktur dasar dapat mempengaruhi kualitas kehidupan warga terutama dengan kualitas kesehatan. Prasarana dan sarana infrastruktur yang buruk berpotensi menyebabkan berbagai macam penyakit.

2.5.1 Persentase Rumah Tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak (%)

Sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik (septic tank) atau Instalasi/Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Untuk daerah perdesaan, dikatakan memiliki akses sanitasi layak, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal. Konsep sanitasi layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plengsengan dengan tutup, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tanki septik (septic tank) atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. (BPS).

Rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK Komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Grafik 2.21
 Proporsi Rumah tangga dengan Sanitasi layak (%)
 Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2021



Sumber : BPS

Berdasarkan grafik posisi relatif persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak capaian Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 68,68 persen persen dan dibawah dari capaian nasional sebesar 80,29 persen. Dibandingkan dengan provinsi lain, posisi Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Indonesia. Untuk posisi Provinsi Sumatera Barat bila dibandingkan dengan Provinsi lain di pulau Sumatera, kondisi Sumatera Barat yang rendah dari 10 Provinsi. Provinsi yang memiliki proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak tertinggi adalah DI Yogyakarta sebesar 97,12 persen, kemudian Provinsi Bali sebesar 95,95 persen, sedangkan persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak yang paling rendah adalah Provinsi Papua sebesar 40,81 persen.

Analisis Posisi Relatif

Dalam skala nasional, Tahun 2021 posisi Sumatera Barat terkait akses sanitasi layak masih dibawah rata-rata nasional yakni sebesar 68,68 persen. Bahkan skala regionalpun, posisi Sumatera Barat berada di peringkat terbawah dari 9 propinsi di Sumatera.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dalam kurun waktu tahun 2016-2021, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Sumatera Barat terus mengalami perkembangan positif. Tahun 2016 Proporsi Rumah Tangga dengan sanitasi Layak sebesar 53,24 persen meningkat terus sampai dengan tahun 2021 menjadi sebesar 68,68 persen.

Analisis Efektivitas

Berbagai strategi dan pendekatan selama lima tahun terakhir sudah mulai menunjukkan efektifitas yang semakin membaik untuk menaikkan persentase rumah bersanitasi layak. Sejak tahun 2016 sejumlah 53,24 persen hingga tahun 2021 menjadi 68,68 persen.

Analisis Relevansi

Dibandingkan perkembangan nasional, strategi yang dijalankan oleh propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan kenaikan persentase Nasional namun masih dibawah rata-rata nasional.

Grafik 2.22
Proporsi Rumah tangga dengan Sanitasi layak (%)
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



Sumber : BPS

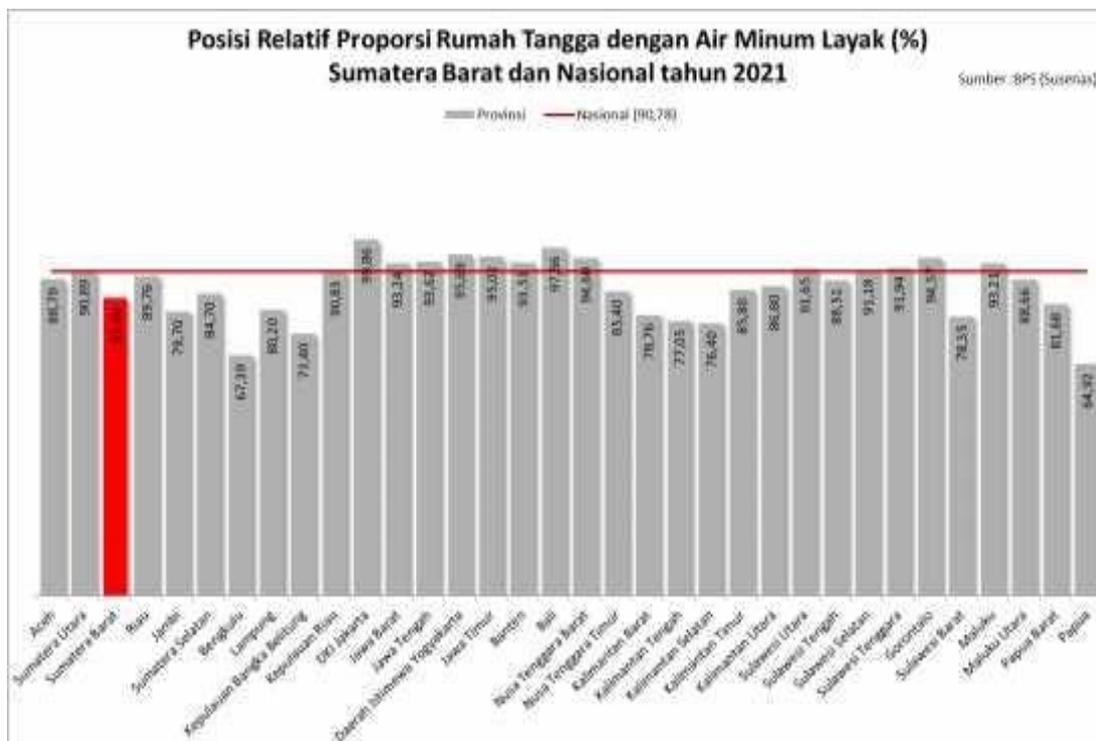
Berdasarkan grafik Perkembangan antar waktu persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak capaian Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan untuk menentukan program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan, sehingga pada periode antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 persentase rumah tangga dengan sanitasi layak meningkat.

2.5.2 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

Rumah tangga dikatakan memiliki akses air minum layak mengacu konsep terbaru tahun 2019 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Merujuk pada konsep ini sumber air minum layak jika sumber air minum utama yang digunakan meliputi ledeng, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari ledeng, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan. Konsep air minum layak mengacu konsep terbaru berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor 661/Dt.2.4/01/2019.

Berdasarkan grafik Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional 2021 menunjukkan capaian Provinsi Sumatera Barat sebesar 83,40 % yang masih dibawah capaian tingkat nasional sebesar 90,78 %. Dibandingkan dengan 34 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat berada pada urutan ke 21. Bila dibandingkan dengan 10 provinsi di pulau Jawa capaian Provinsi Sumatera Barat pada urutan ke 6, sedangkan provinsi yang ada di bawah Provinsi Sumatera Barat ada Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung . Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak (%) yang paling tinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,86 %, sedangkan yang paling rendah capainnya adalah Provinsi Bengkulu Papua sebesar 64,92 %.

Grafik 2.23
Proporsi Rumah tangga dengan Air Minum layak (%)
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2021



Sumber : BPS

Pada Grafik Perkembangan antar waktu persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Provinsi Sumatera Barat data yang tersedia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan bahwa perkembangan antar waktu persentase rumah tangga dengan air minum layak baik Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2018 Persentase rumah tangga dengan air minum layak sebesar 80,50 %, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 81,44 %. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 83,37 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi 83,40 persen Pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 persentase Rumah Tangga dengan air minum layak Provinsi Sumatera Barat naik secara beruntun. Tahun 2018 sampai 2019 naik sebesar 0,94 persen, mengalami kenaikan di tahun 2020 sebesar 1,37 persen dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen, kenaikan ini sangat sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini tentunya akan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melanjutkan kebijakan yang sudah ada dan membuat program yang baru di masa yang akan datang.

Grafik 2.24
Proporsi Rumah tangga dengan air minum layak (%)
Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021



Sumber : BPS

Analisis Posisi Relatif

Posisi Sumatera Barat untuk akses air minum layak sebesar 83,40 persen masih di bawah rata-rata nasional sebesar 90,78 persen. Untuk skala regional Sumatera Provinsi Sumatera Barat berada di posisi ke 4 di atas provinsi Jambi. Provinsi tertinggi untuk akses air minum layak adalah DKI Jakarta sebesar 99,86 persen di atas rata-rata nasional dan Provinsi terendah yaitu Papua sebesar 64,92 persen

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Dari tahun 2018-2021, perkembangan antar waktu capaian akses air minum layak di propinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dimana sejak tahun 2018-2018 mengalami kenaikan dari 80,50 persen pada tahun 2018 menjadi 83,40 persen pada tahun 2021

Analisis Efektivitas

Berbagai strategi dan pendekatan capaian akses air minum layak selama lima tahun terakhir sudah mulai menunjukkan efektivitas yang semakin membaik untuk menaikkan persentase rumah bersanitasi layak. Sejak tahun 2018 sejumlah 80,50 persen hingga tahun 2021 menjadi 83,40 persen

Analisis Relevansi

Pencapaian penanganan akses air minum layak di propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan capaian penanganan nasional. Pada tahun 2021, kenaikan akses air minum layak nasional mencapai 90,78 persen sedangkan provinsi Sumatera Barat mencapai 83,40. Dibandingkan perkembangan nasional, strategi yang dijalankan oleh propinsi Sumatera Barat sudah relevan dengan kenaikan persentase Nasional namun masih dibawah rata-rata nasional

2.6 Analisis Karakteristik Masalah Kemiskinan Non Konsumsi

Secara umum penyebab kemiskinan di Indonesia, selain disebabkan oleh tidak terpenuhinya konsumsi kebutuhan dasar, juga berkaitan erat dengan tidak meratanya akses terhadap ketersediaan lapangan kerja dan kewirausahaan, pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, rentannya kecukupan pangan, serta rendahnya kemampuan keuangan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dan mengalokasikan pendapatan tersebut untuk merealisasikan program dan kegiatan (intervensi kebijakan) penanggulangan kemiskinan

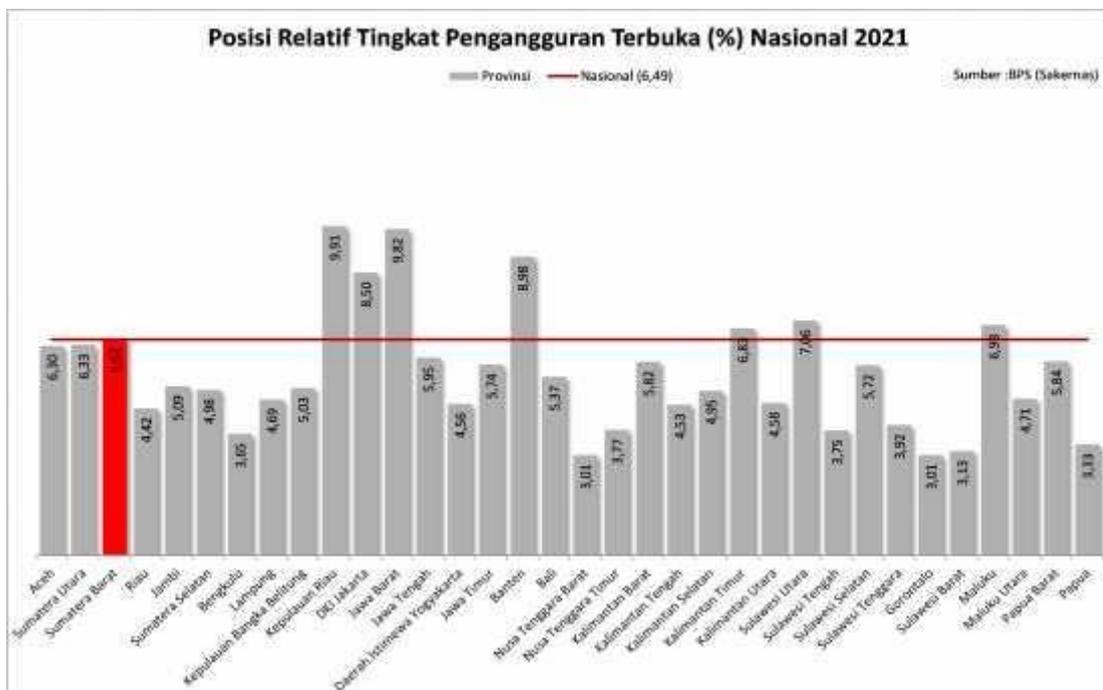
2.6.1. Bidang Ketenagakerjaan

Beberapa indikator yang dibahas dalam mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan ada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Sementara TPak sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Semakin besar jumlah penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja yang mengakibatkan semakin kecil TPak (Simanjuntak, 2005).

2.6.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Hasil analisis masalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14
 Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka
 Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Posisi Relatif

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Barat pada Tahun 2021 sedikit diatas angka TPT nasional yaitu sebesar 6,52% sedangkan TPT Nasional sebesar 6,49%. Provinsi Sumatera Barat termasuk 10 besar tertinggi Angka TPT nya (nomor 8 tertinggi secara Nasional) setelah Kepulauan Riau (9,91%), Jawa Barat (9,82%), Banten (8,98%), DKI Jakarta (8,50%), Sulawesi Utara (7,06%), Maluku (6,98%), dan Kalimantan Timur (6,83%) yang berada diatas rata-rata Nasional . TPT tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau dan TPT terendah berada pada Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan dimensi kemiskinan bidang ketenagakerjaan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selama kurun waktu tahun terakhir 2016-2021 tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,09%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,88% dan pada tahun ini angka tertinggi Tingkat Pengangguran Terbuka untuk Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2021 Teingkat Pengangguran Terbuka menurun lagi di angka 6,52%, tetapi masih diatas rata-rata nasional sebesar 6,49%.

Analisis Efektivitas

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. TPT terendah terjadi pada tahun 2016 yakni sebesar 5,09%, namun kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 6,88%. Peningkatan yang terjadi ditahun 2020 dampak dari Pandemi Covid-19. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat melalui penyediaan lapangan kerja masih belum efektif dan berdampak besar pada serapan tenaga kerja yang terjadi.

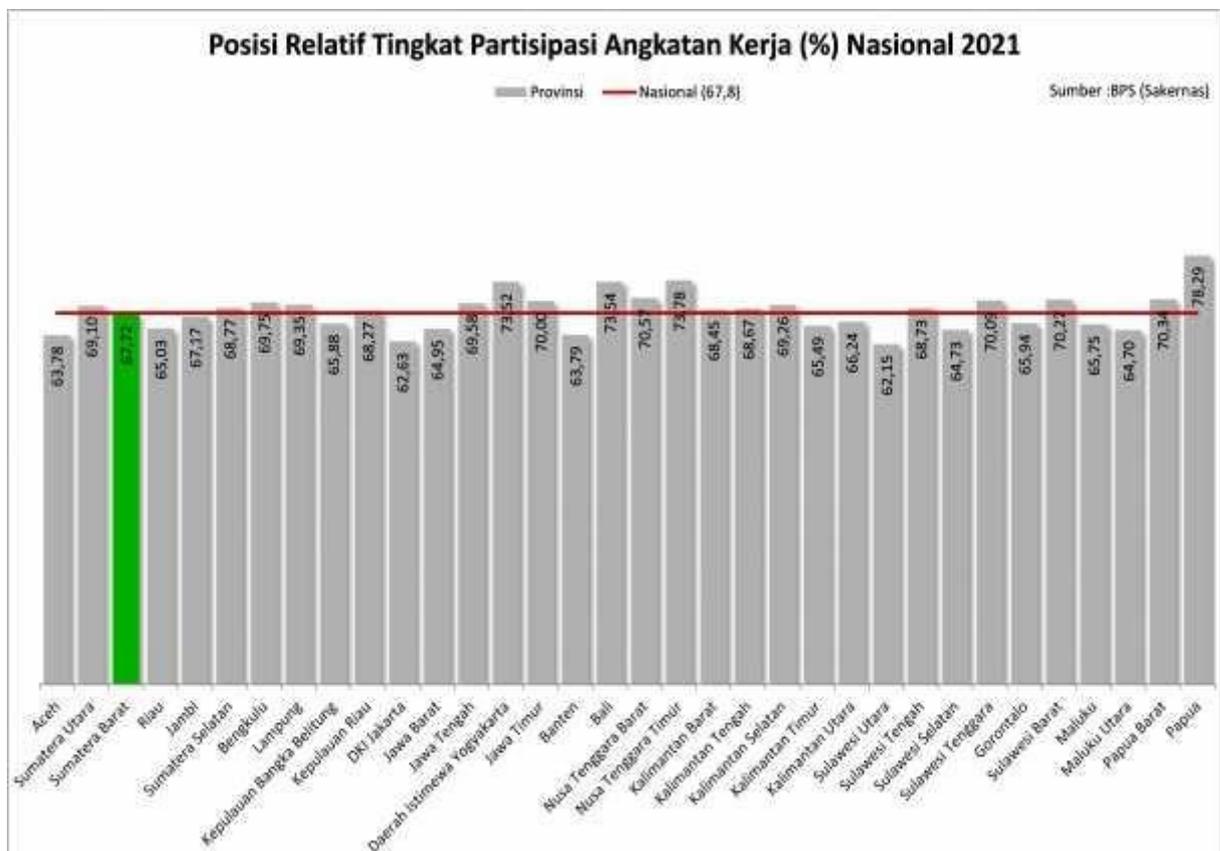
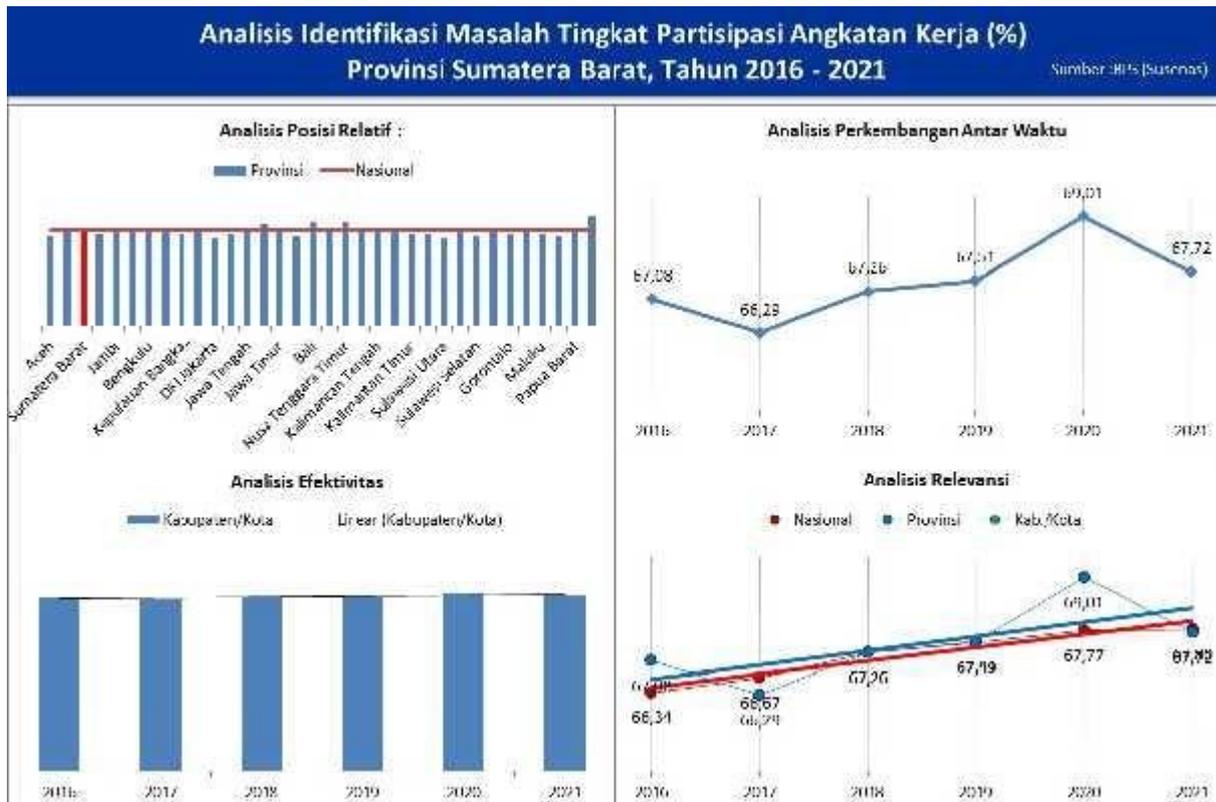
Analisis Relevansi

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat Selama kurun waktu 2016-2021, berdasarkan analisis relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat Selama kurun tahun tersebut, secara umum menunjukkan perkembangan yang baik, namun belum optimal, dimana pada tahun 2016 sebesar 5,09 persen meningkat menjadi 6,52 persen pada Tahun 2021, dari garis *trendline* di atas menggambarkan adanya relevansi dengan tingkat pengangguran secara Nasional kurun waktu 2016-2021 yang perkembangannya sejalan.

2.6.1.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Hasil analisis masalah tingkat partisipasi angkatan kerja Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15
 Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat partisipasi Angkatan Kerja
 Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2021



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa TPAK Sumatera Barat masih lebih rendah dibanding TPAK nasional, dan jika dibandingkan dengan provinsi lain TPAK Sumatera Barat masuk kategori tinggi. Pada tahun 2021 TPAK Sumatera Barat sebesar 67,72% dan TPAK Nasional sebesar 67,8%. TPAK tertinggi ada pada daerah Provinsi Papua sebesar 78,29% dan TPAK terendah ada pada daerah Provinsi DKI Jakarta dengan angka sebesar 62,63%. Dilihat dari posisi relatif ini, angka TPAK Provinsi seluruh Indonesia tidak ada angka yang terlalu ekstrim karena secara rata-rata mendekati angka Nasional.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan Antar Waktu tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (67,08%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (66,29%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 naik turun setiap tahunnya dan meningkat tajam pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,01% dan kemudian turun lagi pada tahun hingga tahun 2021 sebesar 67,72 persen.

Analisis Efektivitas

Perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif, namun cenderung meningkat, dimana pada tahun 2016 (67,08%), namun kembali menurun tajam di tahun 2017 (66,29%) dan adalah yang terendah dalam periode tersebut. TPAK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016- 2021 naik turun setiap tahunnya dan hingga tahun 2020 sebesar 69,01persen dan menurun lagi pada tahun 2021 sebesar 67,72%. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan belum cukup efektif dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.

Kesimpulan TPT dan TPAK

1. Tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat tergolong tinggi dibanding nasional dan regional. Hal ini didukung oleh tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi baik dibanding nasional maupun provinsi lain, kecuali Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Bali.
2. Dari sisi perkembangan antar waktu, baik Sumatera Barat dan nasional terjadi peningkatan pengangguran terbuka pada tahun 2021. Perubahan tingkat pengangguran terbuka nasional lebih tinggi dibanding Sumatera Barat.
3. Peningkatan pengangguran terbuka juga diikuti oleh penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari 67,08 persen tahun 2016 menjadi 67,72 persen tahun 2021.

2.6.1.3. Kesempatan Kerja

Hasil analisis masalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Sumatera Barat disajikan pada Gambar 3.16 sebagai berikut.

Gambar 3.16
Analisis Identifikasi Permasalahan Tingkat Kesempatan Kerja
Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020



Analisis Posisi Relatif

Gambar 3.16 menunjukkan bahwa TKK Sumatera Barat masih lebih tinggi dibanding TKK nasional, dan jika dibandingkan dengan provinsi lain TKK Sumatera Barat berada pada urutan kedua terbesar setelah Provinsi Sulawesi Barat. TKK Kabupaten yang tertinggi dan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Poso adalah yang tertinggi (97,61%), kemudian Kabupaten Banggai (97,58%), Banggai Kepulauan (97,53%), Donggala (97,42%) dan Kabupaten Parigi Moutong (97,30%) serta Kabupaten Tojo Una-Una (97,16%). Sedangkan TKK terendah dibanding kabupaten lain dan Provinsi Sumatera Barat yakni Kota Palu (91,62%). Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi tingkat kemiskinan penduduk, dimana kabupaten seperti Kabupaten Parigi Moutong, Donggala dan Tojo Una-Una yang memiliki persentase kemiskinan yang sangat tinggi dibanding kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

Analisis Perkembangan Antar Waktu

Perkembangan tingkat kesempatan kerja di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang relatif berfluktuatif, namun dengan kisaran perubahan yang relatif sangat kecil, dimana pada tahun 2016 (96,71%), namun menurun pada tahun 2017 (96,19%) lalu mengalami peningkatan sampai tahun 2019 (96,85%). Walaupun TKK mengalami penurunan pada tahun 2020, namun penurunan tersebut belum melewati angka TKK pada tahun 2017.

Analisis Efektivitas

Kondisi tingkat kesempatan kerja yang menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif namun cenderung konstan, dimana nilai perubahan TKK yang terjadi berada pada kisaran angka TKK 96 % atau besarnya perubahan TKK sebesar 0,0294 yang berarti bahwa perubahan TKK yang cenderung menurun hanya 0,0294 %. Dengan demikian pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah di Provinsi Sumatera Barat dalam bidang ketenagakerjaan terutama dalam menyediakan lapangan kerja atau meningkatkan kesempatan bagi masyarakatnya cukup efektif dilaksanakan.

Analisis Relevansi

Berdasarkan analisis relevansi menunjukkan bahwa Tingkat Kesempatan Terbuka (TKK) di Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2016-2020, secara umum menunjukkan adanya kecenderungan penurunan. Kondisi TKK Sumatera Barat memiliki kesamaan dengan penurunan TKK pada tingkat nasional. Hal ini ditunjukkan oleh garis *trendline* yang cenderung menurun yang menggambarkan adanya relevansi antara TKK Nasional kurun waktu 2016-2020 dengan TKK Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian terdapat perbedaan dalam besaran tingkat perubahan keduanya, dimana perubahan TKK di Provinsi Sumatera Barat lebih rendah dibanding perubahan TKK nasional yang mencapai 0,27 %.

Kesimpulan Tingkat Kesempatan Kerja

1. Tingkat kesempatan kerja di Sumatera Barat tergolong tinggi (urutan kedua terbaik) atau di atas TKK nasional dan provinsi lain di Indonesia selain Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini sejalan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang cukup tinggi baik dibanding nasional maupun provinsi lain, kecuali Provinsi Papua, Sulawesi Tenggara dan Bali.
2. Dari sisi perkembangan antar waktu, TKK di Sumatera Barat cenderung mengalami penurunan dengan perubahan yang sangat kecil dibanding TKK nasional perubahannya cenderung lebih tinggi.
3. Berdasarkan analisis relevansi, penurunan TKK nasional tidak berdampak pada penurunan TKK, TPAK dan peningkatan pengangguran terbuka Sumatera Barat.

2.6.2. Bidang Kesehatan

2.6.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Secara nasional, target penurunan angka kematian bayi dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.

2.6.2.2. Angka Kematian Balita (AKBA) (Per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi).

Angka ini merefleksikan tinggi rendahnya angka kematian bayi dan angka kematian anak. Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Secara nasional, target penurunan angka kematian BALITA dalam RPJMN tahun 2024 adalah sebesar 16/1000 kelahiran, sedangkan target global pada tahun 2030 AKB sebesar 12/1000 kelahiran.

2.6.2.3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

2.6.2.4. Balita Pendek dan Sangat Pendek (%)

Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2006. Dalam RPJMN 2020-2024, target penurunan angka stunting adalah 14%

2.6.2.5. Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)

Rasio bidan menunjukkan tingkat ketersediaan tenaga bidan per 100.000 penduduk. Berikut diuraikan gambaran rasio bidan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020.

Gambar 3.21
Analisis Identifikasi Masalah Rasio Bidan (Per 100.000 Penduduk)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Dari tahun 2016-2020, rasio tenaga bidan per 100.000 penduduk terus mengalami perbaikan dengan rasio tertinggi pada tahun 2018 sebesar 188,68% per 100.000 penduduk. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2018 yakni sebesar 164,98% dan berada di atas rata-rata nasional.

Analisis Efektivitas

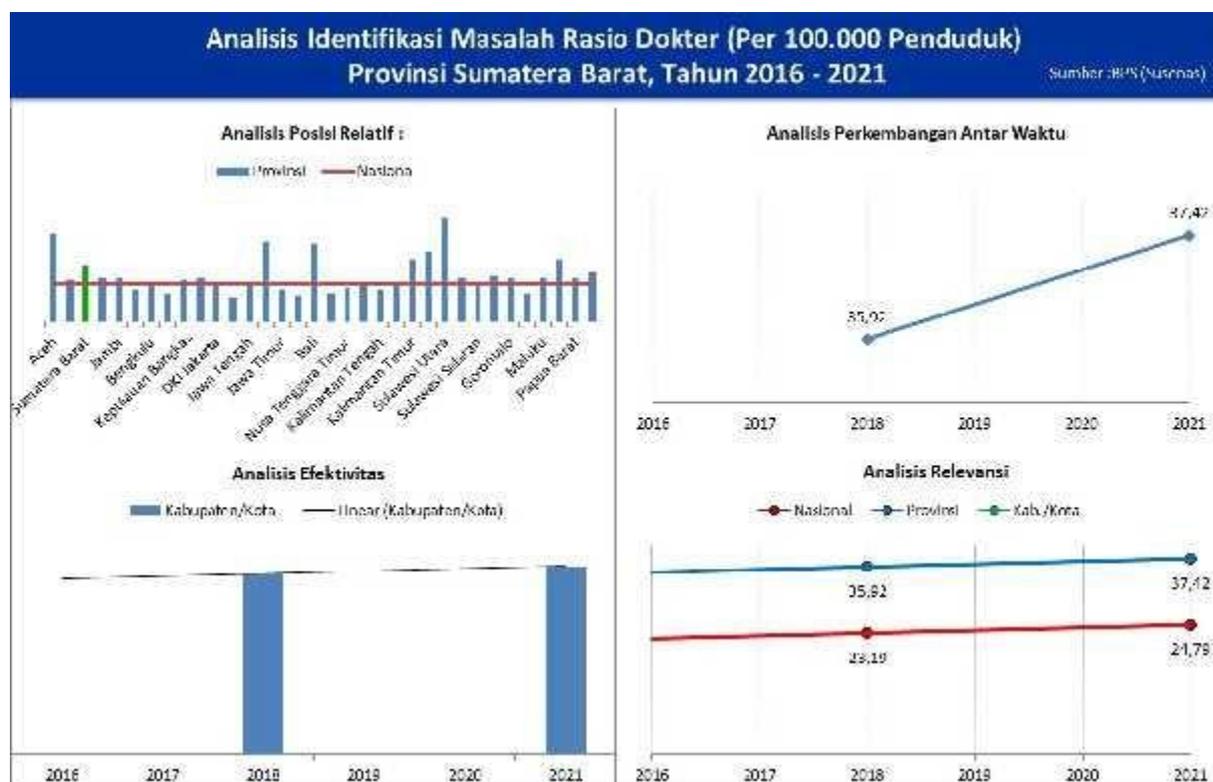
Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terlihat fluktuatif naik-turun namun cenderung meningkat. Pada tahun 2016 rasio bidan sejumlah 130,27 per 100.000 penduduk, hingga tahun 2020 sejumlah 164,98 per 100.000 penduduk.

2.6.2.6. Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)

Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah perbandingan ketersediaan tenaga dokter untuk 100.000 jiwa penduduk. Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai telah ditetapkan target ketersediaan tenaga dokter per 100.000 penduduk hingga tahun 2025 sebanyak 112 orang.

Gambar 3.22

Analisis Identifikasi Masalah Rasio Dokter (Per 100.000 Penduduk)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020



Analisis Posisi Relatif

Secara umum, posisi relatif Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional dari sisi rasio dokter per 100.000 penduduk.

Rasio dokter Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2016-2020 menunjukkan rata-rata peningkatan selama kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2016 rasio dokter per 100.000 penduduk sejumlah 26,56 persen, hingga tahun 2020 sejumlah 42,17 persen.

Analisis Efektifitas

Atas peningkatan rasio dokter selama lima tahun terakhir menunjukkan program-program pendidikan dan penempatan dokter di Provinsi Sumatera Barat terbilang efektif, dan ini perlu terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun mendatang.

Analisis Relevansi

Jika peningkatan rasio dokter di Sumatera Barat menunjukkan trend peningkatan sebesar 4,07%, namun rata-rata nasional justru menunjukkan trend penurunan hingga 6,4%.

3.6.2.6. Penduduk dengan Keluhan Kesehatan (%)

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Semakin tinggi presentase penduduk dengan keluhan kesehatan menunjukkan buruknya derajat kesehatan penduduk tersebut.

3.6.2.7. Penduduk dengan Pengobatan Sendiri (%)

Pengobatan sendiri atau sering disebut swamedikasi adalah upaya pengobatan atau perawatan diri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyakit yang umum diderita, dengan menggunakan obat bebas maupun obat bebas terbatas atau obat wajib apotek yang didapat tanpa resep dokter dan diserahkan oleh apoteker di apotek berdasarkan keterangan obat yang ada di brosur sesuai dengan penyakitnya (Izzatin, 2015).

3.6.2.8. Kelahiran Ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih (%)

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan adalah proses kelahiran yang ditolong oleh tenaga tidak terlatih/tidak terampil.

3.6.2.9. Angka Morbiditas (%)

Angka Morbiditas merupakan angka yang menunjukkan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat (BPS). Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin buruk.

Berdasarkan analisa perbandingan keempat indikator kemiskinan (utama dan pendukung) tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat secara berurutan disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Konsumsi

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% penduduk miskin)	Indikator Pendukung				Prioritas
		Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk Miskin (jiwa)	Jml Pddk miskin-Indeks Kedalaman Kemiskinan	
Kab. Kepulauan Mentawai	Merah	Merah	Merah	Kuning	Kuning	1
Kab. Pesisir Selatan	Merah	Merah	Kuning	Merah	Merah	3
Kab. Solok	Merah	Merah	Merah	Merah	Merah	2
Kab. Sijunjung	Kuning	Merah	Merah	Kuning	Kuning	9
Kab. Tanah Datar	Biru	Biru	Hijau	Biru	Biru	16
Kab. Padang Pariaman	Merah	Kuning	Kuning	Merah	Hijau	8
Kab. Agam	Merah	Kuning	Merah	Merah	Merah	10
Kab. Lima Puluh Kota	Merah	Kuning	Merah	Merah	Merah	6
Kab. Pasaman	Merah	Kuning	Merah	Merah	Hijau	5
Kab. Solok Selatan	Kuning	Kuning	Merah	Kuning	Kuning	7
Kab. Dharmasraya	Kuning	Kuning	Kuning	Kuning	Biru	11
Kab. Pasaman Barat	Merah	Kuning	Kuning	Merah	Hijau	4
Kota Padang	Hijau	Biru	Biru	Hijau	Hijau	15
Kota Solok	Biru	Biru	Hijau	Biru	Biru	18
Kota Sawahlunto	Biru	Biru	Hijau	Biru	Biru	19
Kota Padang Panjang	Biru	Biru	Biru	Biru	Biru	13
Kota Bukittinggi	Biru	Hijau	Biru	Biru	Biru	14
Kota Payakumbuh	Biru	Biru	Biru	Biru	Biru	12
Kota Pariaman	Biru	Biru	Biru	Biru	Biru	17

Sumber: Data BPS dan TNP2K (Diolah), 2021.

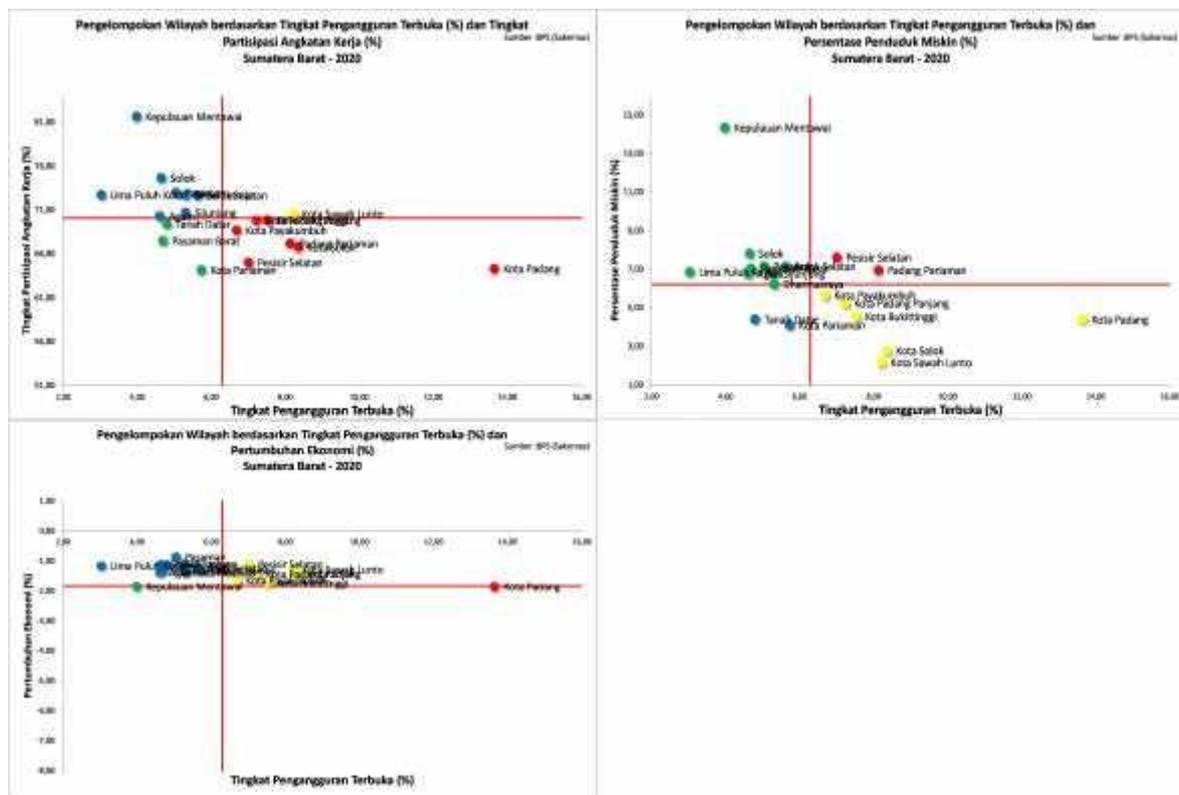
Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang konsumsi, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

Prioritas 1	Lokasi Kabupaten/Kota: Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Sijunjung, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Kota Padang,
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Tanah Datar, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman.

3.1.2. Bidang Ketenagakerjaan

Penentuan lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat disajikan pada Gambar 5.2. sebagai berikut.



Gambar 5.1.

Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Bidang Ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 5.2 menunjukkan bahwa berdasarkan indikator tingkat pengangguran terbuka (indikator utama), kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi ketenagakerjaan di Sumatera Barat adalah Kota Padang, Kota Solok, dan Kabupaten Padang Pariaman. Jika indikator TPAK,

persentase penduduk miskin, pertumbuhan perkapita dan pertumbuhan ekonomi dimasukkan sebagai dasar penentuan wilayah intervensi program, maka terdapat beberapa kabupaten yang prioritas berbeda dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, maka skala prioritas kabupaten/kota yang dilakukan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan dari sisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat secara berurutan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.2.
Penentuan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Utama dan Pendukung Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan

Kabupaten/Kota	Indikator Utama (% TPT)	Indikator Pendukung			Prioritas
		TPAK(%)	Persentase Penduduk miskin(%)	Pertumbuhan ekonomi	
Kab. Kepulauan Mentawai					18
Kab. Pesisir Selatan					7
Kab. Solok					16
Kab. Sijunjung					12
Kab. Tanah Datar					14
Kab. Padang Pariaman					3
Kab. Agam					17
Kab. Lima Puluh Kota					19
Kab. Pasaman					13
Kab. Solok Selatan					11
Kab. Dharmasraya					10
Kab. Pasaman Barat					15
Kota Padang					1
Kota Solok					2
Kota Sawahlunto					4
Kota Padang Panjang					5
Kota Bukittinggi					6
Kota Payakumbuh					8
Kota Pariaman					9

Sumber: Data BPS dan TNP2K (Diolah), 2021.

Keterangan: merah= prioritas 1; kuning=prioritas 2; hijau= prioritas 3 dan biru=prioritas 4

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator pembentuk kemiskinan bidang ketenagakerjaan, maka diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota:

Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Kota Padang, Kota Solok, Kab. Padang Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang Kab. Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Kota Sawahlunto
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Tanah Datar, Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya

3.1.3 Bidang Kesehatan

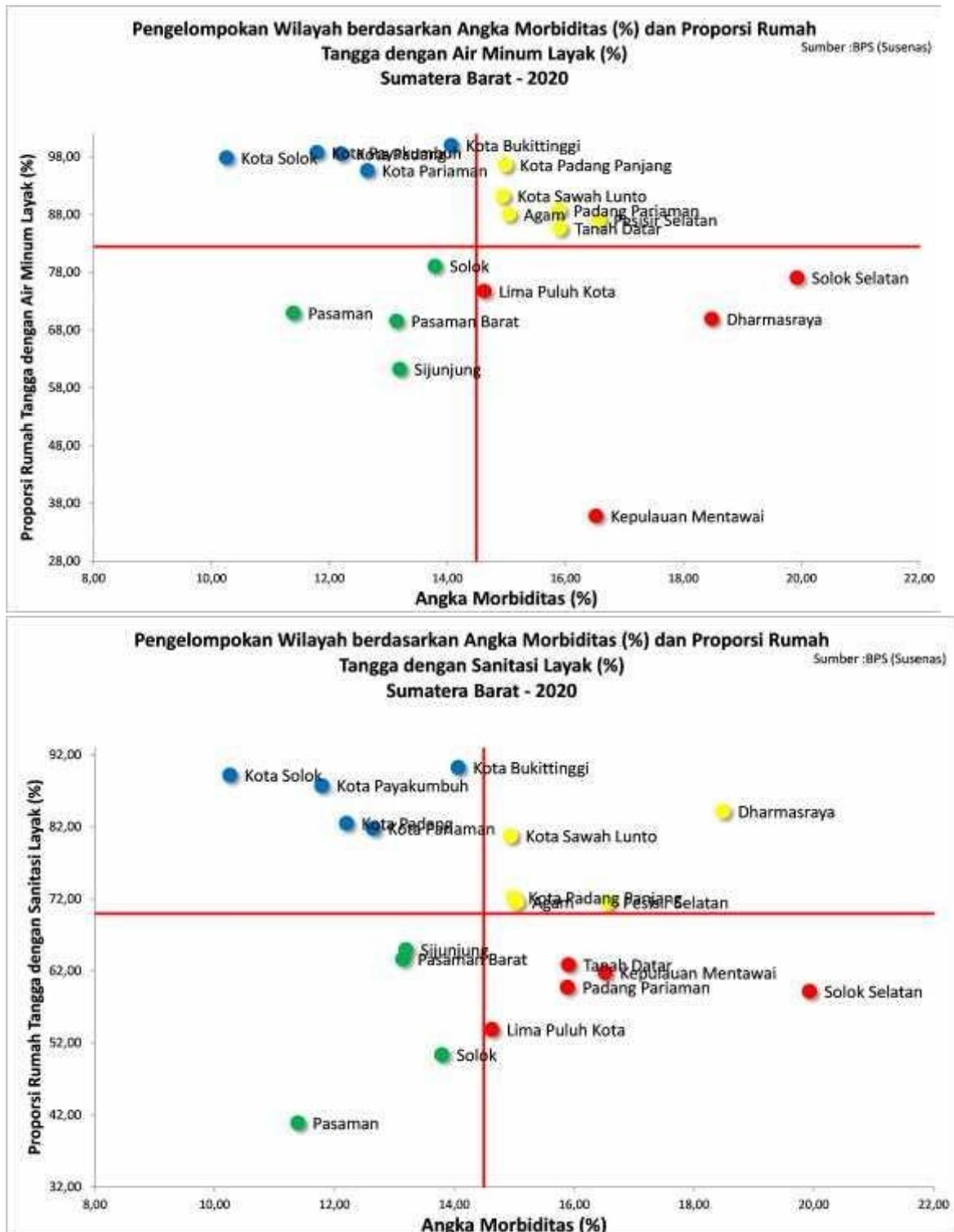
Berangkat dari permasalahan bidang Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka ditetapkan beberapa program dalam upaya perbaikan kualitas kesehatan daerah. Adapun program urusan pemerintahan Bidang Kesehatan diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020, sebagai berikut:

- Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
- Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
- Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Terhadap program-program tersebut, dilaksanakan pada lokasi prioritas program berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah, yang berkolaborasi dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah lain serta pemangku kepentingan, dengan tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap kesehatan.

1. Indikator Utama Angka Morbiditas

Berikut gambaran analisis pengelompokan wilayah berdasarkan angka morbiditas (indikator utama), dan 3 (tiga) indikator pendukung: proporsi rumah tangga dengan air minum layak, proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak, dan persentase penduduk dengan jaminan kesehatan, yang disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 5.2.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah
Berdasarkan Indikator Utama Persentase Angka Morbiditas

Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan indikator utama: angka morbiditas dan hubungannya dengan indikator pendukung, menunjukkan wilayah yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan

berada di wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya. Selengkapnya uraian hasil analisis prioritas berdasarkan indikator utama Angka Mordibitas duraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 5.3.
Penentuan Lokasi Prioritas Berdasarkan Indikator Utama Angka Morbiditas Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten/Kota	Ind. Utama	Indikator Pendukung		Prioritas
	(% Morbiditas)	Air Minum Layak (%)	Sanitasi Layak (%)	
Kab. Kepulauan Mentawai				3
Kab. Pesisir Selatan				5
Kab. Solok				11
Kab. Sijunjung				13
Kab. Tanah Datar				6
Kab. Padang Pariaman				7
Kab. Agam				8
Kab. Lima Puluh Kota				4
Kab. Pasaman				14
Kab. Solok Selatan				1
Kab. Dharmasraya				2
Kab. Pasaman Barat				12
Kota Padang				17
Kota Solok				19
Kota Sawahlunto				10
Kota Padang Panjang				9
Kota Bukittinggi				15
Kota Payakumbuh				18
Kota Pariaman				16

Berdasarkan hasil analisis kuadran dan tabel pemetaan lokasi prioritas intervensi menurut indikator utama Angka Morbiditas dan indikator pendukungnya, diperoleh urutan prioritas satu sampai empat lokasi kabupaten/kota sebagai berikut:

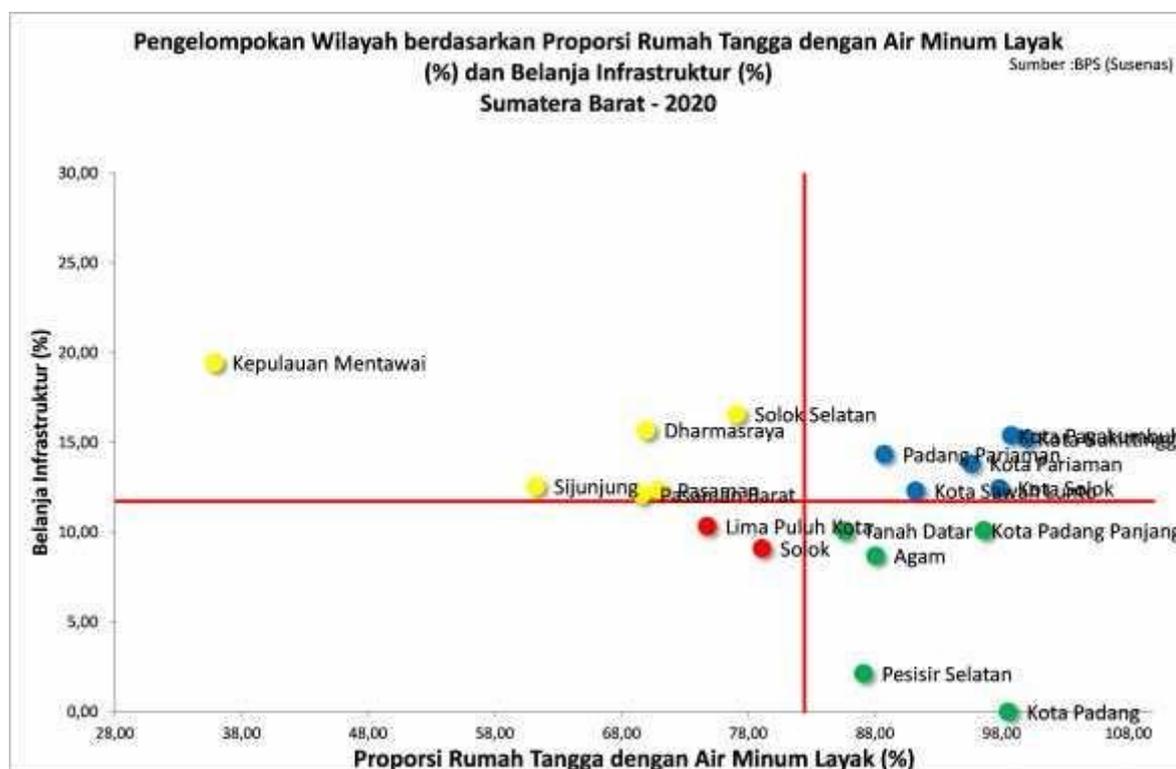
Prioritas 1	Lokasi kabupaten/kota: Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar dan Kab. Padang Pariaman.
Prioritas 2	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Pesisir Selatan, Kab. Agam, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang.
Prioritas 3	Lokasi Kabupaten/kota: Kab. Solok, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat .
Prioritas 4	Lokasi Kabupaten/kota: Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman.

3.1.4. Bidang Infrastruktur Dasar

Berangkat dari permasalahan bidang Infrastruktur Dasar yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dirumuskan beberapa program. Program-program urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur Dasar dimaksud, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri 050-3708 Tahun 2020. Terhadap program-program tersebut, dilaksanakan pada lokasi prioritas berdasarkan analisis kuadran dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, yang disajikan sebagai berikut.

1. Indikator Utama Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak (indikator utama) dan persentase belanja infrastruktur (indikator pendukung) Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut.



Gambar 5.3.

Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

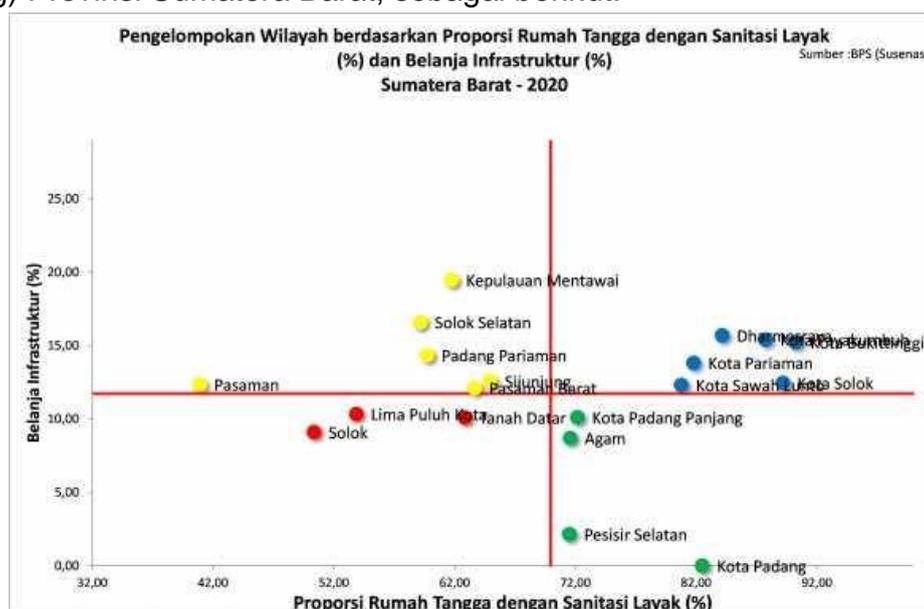
Gambar di atas menunjukkan, bahwa berdasarkan indikator utama dan indikator pendukung, kabupaten yang diprioritaskan untuk intervensi program penanggulangan kemiskinan berada pada wilayah Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi diperoleh urutan prioritas sebagai berikut.

Tabel 5.4.
Penentuan Lokasi Prioritas Peningkatan
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	2	
2.	Kab. Pesisir Selatan	3	
3.	Kab. Solok	1	
4.	Kab. Sijunjung	2	
5.	Kab. Tanah Datar	3	
6.	Kab. Padang Pariaman	4	
7.	Kab. Agam	3	
8.	Kab. Lima Puluh Kota	1	
9.	Kab. Pasaman	2	
10.	Kab. Solok Selatan	2	
11.	Kab. Dharmasraya	2	
12.	Kab. Pasaman Barat	2	
13.	Kota Padang	3	
14.	Kota Solok	4	
15.	Kota Sawahlunto	4	
16.	Kota Padang Panjang	3	
17.	Kota Bukittinggi	4	
18.	Kota Payakumbuh	4	
19.	Kota Pariaman	4	

2. Indikator Utama Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

Berikut gambaran pengelompokan wilayah berdasarkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (indikator utama) dan persentase belanja infrastruktur (indikator pendukung) Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut.



Gambar 5.4.
Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan Indikator Utama
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

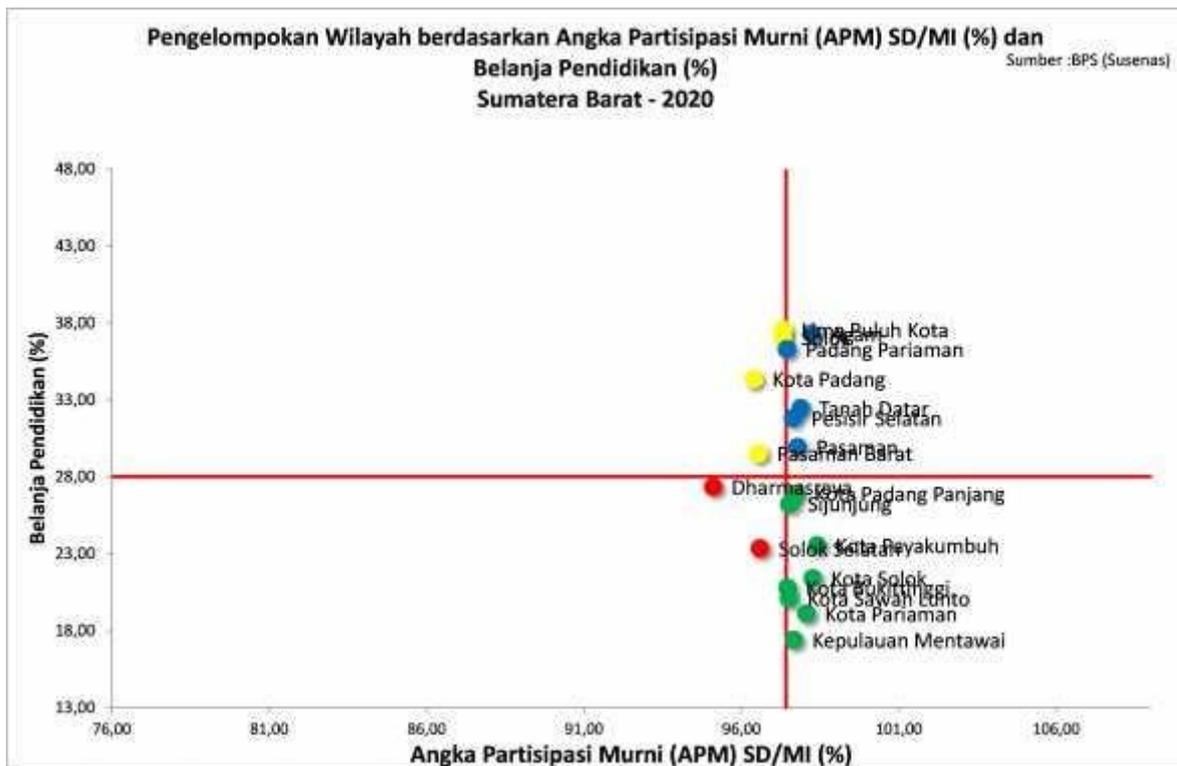
Gambar di atas menunjukkan bahwa berdasarkan indikator utama dan indikator pendukung, kabupaten yang diprioritaskan dalam intervensi program penanggulangan kemiskinan daerah berada pada wilayah Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun hasil analisis kuadran pemetaan lokasi prioritas intervensi diperoleh urutan sebagai berikut.

Tabel 5.5.
Penentuan Lokasi Prioritas Peningkatan
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak

No	Kabupaten/Kota	Prioritas	Keterangan
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	2	Yellow
2.	Kab. Pesisir Selatan	3	Green
3.	Kab. Solok	1	Red
4.	Kab. Sijunjung	2	Yellow
5.	Kab. Tanah Datar	1	Red
6.	Kab. Padang Pariaman	2	Yellow
7.	Kab. Agam	3	Green
8.	Kab. Lima Puluh Kota	1	Red
9.	Kab. Pasaman	2	Yellow
10.	Kab. Solok Selatan	2	Yellow
11.	Kab. Dharmasraya	4	Blue
12.	Kab. Pasaman Barat	2	Yellow
13.	Kota Padang	3	Green
14.	Kota Solok	4	Blue
15.	Kota Sawahlunto	4	Blue
16.	Kota Padang Panjang	3	Green
17.	Kota Bukittinggi	4	Blue
18.	Kota Payakumbuh	4	Blue
19.	Kota Pariaman	4	Blue

3.1.5. Bidang Pendidikan

Beranjak dari identifikasi permasalahan bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, terdapat beberapa program dalam upaya mencapai tujuan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia. Program urusan pemerintahan bidang Pendidikan diuraikan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

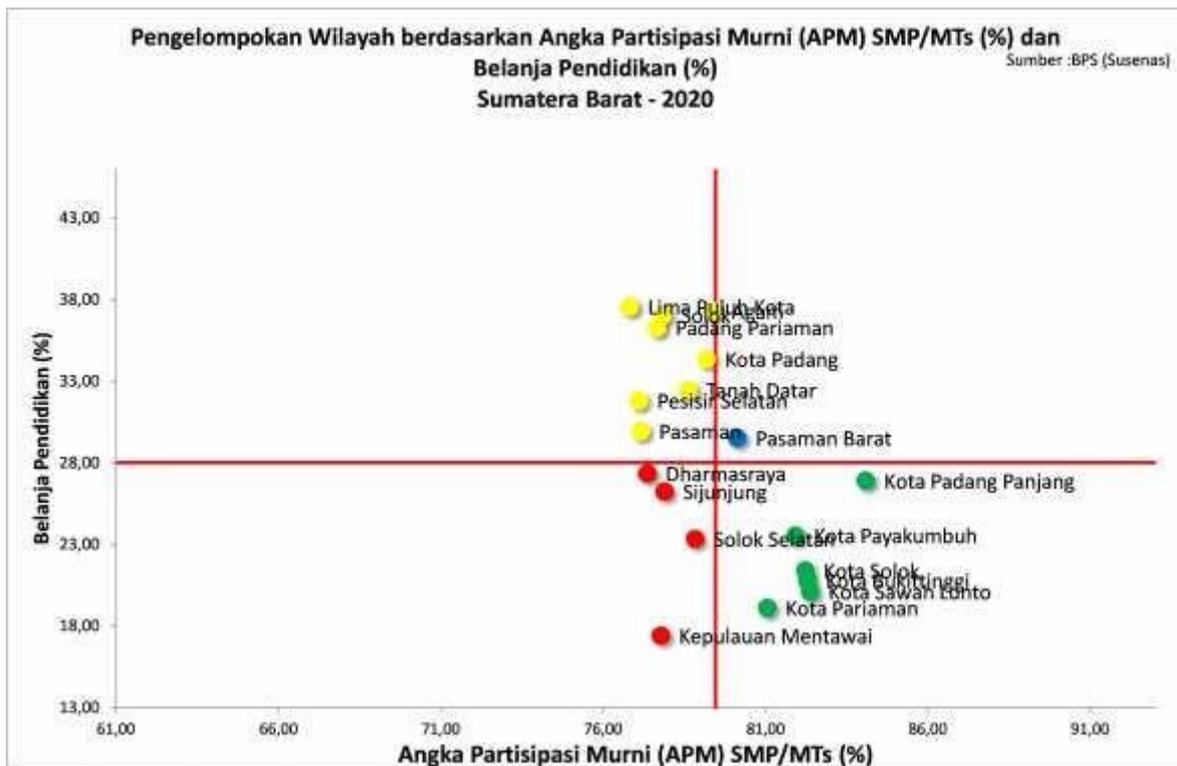


Gambar 5.5.

Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SD/MI dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.6 menunjukkan, berdasarkan indikator utama APM SD/MI dan indikator pendukung belanja pendidikan dengan merujuk data tahun 2020, maka terdapat dua kabupaten kota menempati kwadran pertama dan menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan. Kelima kabupaten kota tersebut angka APM tingkat SD/MI masih dibawah 97 persen dengan anggaran pendidikan bersumber dari APBD belum mencapai 28 persen sebagaimana disyaratkan.

Gambar 5.6 juga menunjukkan pada kwadran kedua, terdapat empat kabupaten capaian belanja pendidikannya diatas 28 persen namun APM yang di capai masih dibawah 90 persen. Keempat Kabupaten tersebut yang perlu mendapat prioritas kedu adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Solok, Kota Padang dan Kabupaten Pasaman Barat.

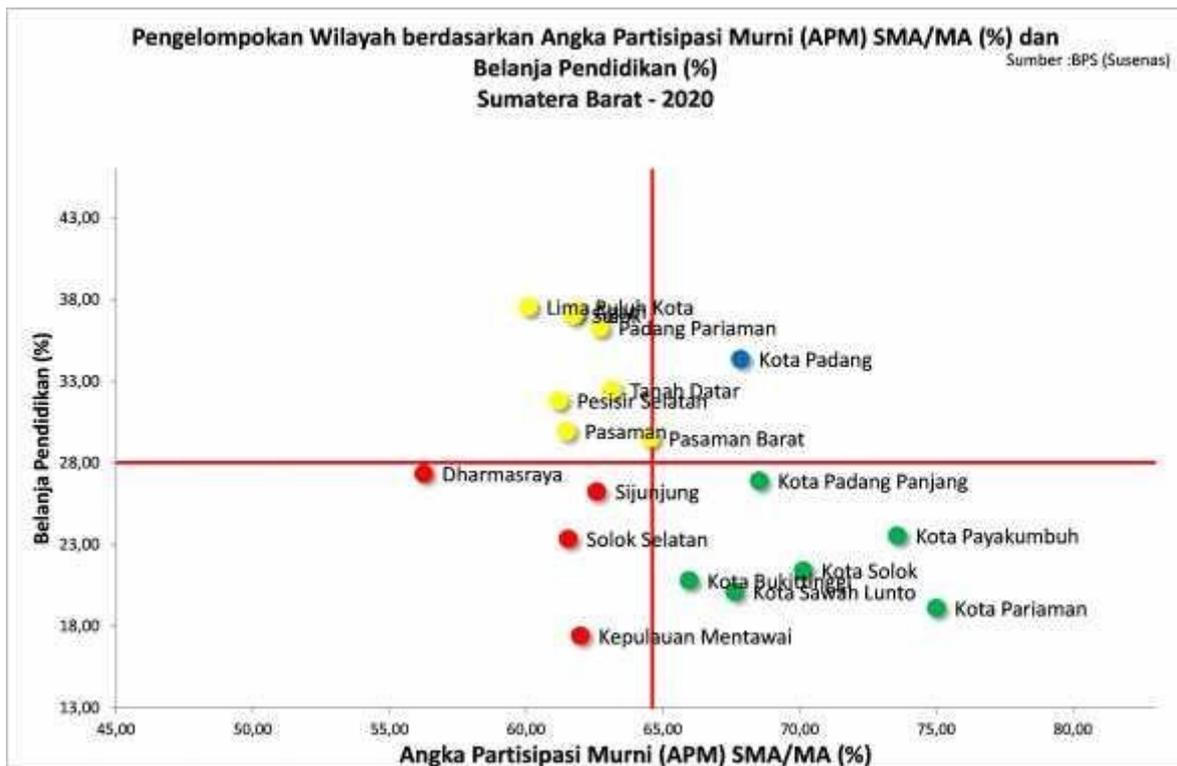


Gambar 5.6.

Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SMP/MTs dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat

Merujuk pada Gambar 3.7. dengan melihat indikator utama APM SMP/MTs dan indikator pendukung belanja pendidikan dengan sesuai data tahun 2020, terdapat empat kabupaten/kota yang menjadi prioritas penanganan, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya. Keempat kabupaten/kota tersebut angka APM yang dicapai untuk tingkat SMP/MTs masih dibawah 80 persen dengan khusus Kabupaten Kepulauan Mentawai anggaran pendidikan bersumber dari APBD kurang dari 20 persen sebagaimana disyaratkan.

Pada gambar 3.7 juga menunjukkan bahwa terdapat delapan kabupaten belanja pendidikannya diatas 28 persen namun capaian APM masih dibawah 80 persen yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 5.7.

Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Berdasarkan APM SMA/MA dan Belanja Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat

Pada Gambar 3.8 memperlihatkan, terdapat empat kabupaten (Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya) perlu mendapat prioritas utama karena jika merujuk pada indikator utama APM SMA/MA, persentase penduduk usia 16-18 tahun yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA/MT masih dibawah 65 persen. Dari aspek dukungan belanja pendidikan, dari keempat kabupaten tersebut terdapat satu kabupaten belanja pendidikannya pada Tahun Anggaran 2020 kurang dari 20 persen, yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Jika diyakini hipotesis bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini pendidikan, maka terdapat delapan kabupaten perlu mendapat penanganan khusus yakni Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Ketiga kabupaten tersebut belanja pendidikannya diatas 28 persen namun capaian APM untuk SMA/MT masih dibawah 65 persen.

3.2 Target Penurunan Persentase Kemiskinan

Kemiskinan merupakan prioritas pembangunan nasional dan daerah yang perlu mendapatkan penanganan secara terkoordinasi dan terencana. Untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penanggulangan kemiskinan di daerah, dibutuhkan penyusunan RPKD. RPKD menjadi bagian RPJMD dalam mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan dan menjadi wadah untuk menguraikan permasalahan kemiskinan yang kompleks di daerah. Dari itu, tujuan penanggulangan kemiskinan daerah disebutkan sebagai berikut:

- Melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- Memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.
- Meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Atas tujuan penanggulangan kemiskinan daerah dimaksud, lebih lanjut diuraikan dalam Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang memuat target persentase penurunan kemiskinan dari kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Barat, selengkapnya disebutkan sebagai berikut.

Tabel 5.6.
Target Capaian Penurunan Persentase Kemiskinan
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

No	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kab. Kepulauan Mentawai	14,83	14,71	14,57	14,44	14,31	14,17
2	Kab. Pesisir Selatan	7,79	7,67	7,55	7,42	7,29	7,16
3	Kab. Solok	8,00	7,88	7,75	7,62	7,49	7,36
4	Kab. Sijunjung	6,93	6,81	6,69	6,56	6,43	6,30
5	Kab. Tanah Datar	4,44	4,32	4,19	4,06	3,93	3,79
6	Kab. Padang Pariaman	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48
7	Kab. Agam	6,90	6,78	6,66	6,53	6,40	6,27
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,02	6,90	6,77	6,65	6,52	6,39
9	Kab. Pasaman	7,33	7,20	7,08	6,95	6,81	6,68
10	Kab. Solok Selatan	7,32	7,20	7,07	6,94	6,81	6,68
11	Kab. Dharmasraya	6,36	6,24	6,12	6,00	5,87	5,74
12	Kab. Pasaman Barat	7,21	7,09	6,96	6,84	6,71	6,58
13	Kota Padang	4,45	4,33	4,22	4,10	3,98	3,85
14	Kota Solok	2,74	2,63	2,51	2,39	2,26	2,14

15	Kota Sawahlunto	2,10	2,05	2,01	1,98	1,96	1,95
16	Kota Padang Panjang	5,32	5,20	5,08	4,96	4,83	4,71
17	Kota Bukittinggi	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99
18	Kota Payakumbuh	5,75	5,64	5,52	5,41	5,29	5,16
19	Kota Pariaman	4,13	4,01	3,89	3,76	3,64	3,51
	Provinsi Sumatera Barat	6,40	6,28	6,16	6,03	5,90	5,77

Sumber: Data Proyeksi

Berdasarkan tabel di atas, diproyeksikan target capaian penurunan persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 sejumlah 6,40, tahun 2022 sejumlah 6,28 persen, tahun 2023 sejumlah 6,16 persen, tahun 2024 sejumlah 6,03 persen, tahun 2025 sejumlah 5,90 persen dan hingga tahun 2026 sejumlah 5,77 persen. Target capaian optimis dimaksud dapat dicapai lewat serangkaian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi lintas perangkat daerah dengan melibatkan pihak terkait utamanya swasta (badan usaha) dan lembaga swadaya masyarakat, lewat wadah bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB IV

RENCANA AKSI TAHUNAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

4.1 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Pembangunan Provinsi Sumatera Barat 2022 tahun diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Sumatera Barat periode 2019-2024. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk tingkat kemiskinan.

Strategi APBD Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat turunnya angka kemiskinan yaitu ada dalam visi dan misi Gubernur Sumatera Barat yang telah dituangkan melalui dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019-2024 yaitu dalam program. Adapun Sasaran menurunnya Angka Kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a) Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan; dan
- b) Meningkatkan Kemandirian PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).

Selanjutnya upaya pengentasan kemiskinan sesuai visi dan misi Gubernur Sumatera Barat senantiasa diarahkan kepada penajaman efektivitas bantuan yang selama ini bersumber dari Pemerintah Pusat, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Dana Desa, karena kemiskinan perdesaan di Sumatera Barat jauh lebih tinggi dari perkotaan. Strategi umum penanggulangan kemiskinan yang digunakan adalah 3S: Suplemen-Sinergi-Sinkronisasi. Suplemen adalah dimana Pemerintah Provinsi menggunakan sumber APBD untuk melengkapi cakupan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang tidak terjangkau dari program pemerintah pusat. Sinergi adalah penyelarasan subyek penerima bantuan dengan program lintas sektor dan lintas hirarki, dimana Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator wilayah. Sinkronisasi adalah upaya mendukung implementasi yang lebih tepat sasaran dengan koordinasi pemangku kepentingan. Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat

Adapun kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, sebagai berikut :

- a. Sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran yang telah ditentukan terutama pada wilayah kantong kemiskinan,
- b. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan,
- c. Memperluas dan meningkatkan kualitas Kelompok Usaha Bersama,
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (3T : Tertinggal, Terluar, Terdalam),

- e. Meningkatkan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa,
- f. Optimalisasi Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan; Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk menurunkan tingkat pengangguran, kemiskinan dan meningkatkan ekonomi di Perdesaan.
- g. Mendukung sistem perlindungan sosial melalui PKH plus, berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin,
- h. Pengembangan dan penguatan kapasitas PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) dalam upaya penanganan penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan dan keluarga rentan.
- i. Intervensi Program Khusus Penanggulangan Kemiskinan di Perdesaan serta Mendorong masuknya investasi di Perdesaan
- j. Memperluas cakupan wilayah program pemberdayaan masyarakat dimana sasaran programnya sebagian besar adalah masyarakat miskin yang berada di Pedesaan;

Salah satu Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah tingginya tingkat kemiskinan perdesaan. Pertimbangan selanjutnya pada aspek perekonomian, dapat dilihat bahwasanya sebagian besar masyarakat miskin di Sumatera Barat memiliki mata pencaharian di sektor pertanian, namun kontribusi sektor pertanian masih rendah, sedangkan Struktur PDRB Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan serta akomodasi dan makanan minuman. Adapun penjabaran dari isu strategis yang dijelaskan di atas antara lain :

- a. Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan antar pusat dan daerah, antar sektor dengan lokasi dan sasaran masyarakat perdesaan;
- b. Peningkatan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka kemiskinan perdesaan melalui usaha ekonomi produktif, pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dan koperasi serta bantuan permodalan dana bergulir;
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Rentan Terhadap Akses terutama wilayah Perdesaan, Tertinggal, Terluar, Terdalam.
- d. Peningkatan kebijakan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa;
- e. Peningkatan penggunaan Dana Desa untuk membantu warga masyarakat desa terutama yang terdampak COVID 19.

4.2 Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Masa Pandemi Covid19

Dalam upaya mengurangi dampak COVID 19 terutama pada penurunan kesejahteraan masyarakat, yang berdampak pada bertambahnya penduduk miskin Sumatera Barat, pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan sinergi program Jaring Pengaman Sosial antara pemerintah dan Provisini Sumatera Barat seperti antara program keluarga Harapan (PKH) dari

pemerintah Pusat didukung program PKH Plus, program perluasan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Pusat didukung oleh Program Suplemen BPNT.

Berkaitan dengan perubahan Beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan RPJMD telah dilakukan pemetaan permasalahan untuk setiap indikator. Hal ini dilakukan agar program prioritas yang direncanakan sesuai dengan kondisi faktual yang sedang dan akan dihadapi. Beberapa permasalahan yang terjadi selama masa Pandemi COVID 19 adalah bertambahnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di Sumatera Barat. Hal ini terjadi karena terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat baik di sektor formal maupun informal. Dampaknya adalah masyarakat kehilangan atau terganggu sumber penghasilannya karena di-PHK, dirumahkan atau terganggu usahanya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka ditetapkan program prioritas penanggulangan kemiskinan dan penanganan pengangguran terbuka. Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut maka ditetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sumatera Barat di masa pandemi Covid19, yaitu :

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, serta sinergitas program antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.
- b. untuk mengatasi pengangguran maka dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan Vokasi dan Pelatihan di Balai Latihan Kerja.
- c. Dalam jangka pendek upaya Pemulihan Ekonomi Sumatera Barat menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi jumlah pengangguran sebagai dampak dari Pandemi COVID 19. Adapun beberapa upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan mulai menggerakkan kembali sektor pariwisata Sumatera Barat, serta menggerakkan sektor perdagangan dan retail yang terganggu selama masa Pandemi.
- d. Fokus menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan dan program perlindungan sosial reguler dengan tidak mengurangi target sasaran maupun alokasi anggaran.

4.3 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senantiasa melaksanakan upaya secara terus menerus untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengentaskan dan mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun, pemerintah memandang penting untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya. Sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya semakin meningkat. Disamping itu ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin (kedalaman dan keparahan kemiskinan) juga merupakan permasalahan kemiskinan Sumatera Barat yang harus diminimalisasi selain menurunkan persentase dan jumlah penduduk miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan sistematis, terpadu dan

menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat, terutama pada masa Pandemi Covid, yang seperti diketahui bersama bahwasanya akibat dari Pandemi ini terutama karena kebijakan PSBB dan PPKM, secara signifikan menurunkan aktifitas perekonomian masyarakat dan mengakibatkan menurunnya daya beli sehingga meningkatkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan. Adapun permasalahan-pemmasalahan yang terjadi antara lain

- a. Masih Belum Pulihnya Ekonomi Nasional Dan Sumatera Barat Pada Tahun 2021,
- b. Belum Pulihnya Usaha Informal serta Masih Belum Optimalnya Pendataan Sektor Informal,
- c. Masih Terdapat Inclusion Error dan Exclusion Error Pada Data Masyarakat miskin - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial,
- d. Masih Terdapat Masyarakat Miskin Dalam DTKS yang Belum Memiliki Identitas Kependudukan (NIK), NIK Salah, NIK Ganda, dan lain-lain,
- e. Potensi Peningkatan Jumlah Penduduk Miskin Sebagai Dampak Ekonomi Akibat Covid-19,
- f. Bertambahnya Jumlah Pengangguran Terbuka sebagai Dampak Pandemi Covid-19,
- g. Verifikasi dan Validasi DTKS yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota Belum Berjalan Dengan Baik,
- h. Belum Semua Masyarakat Miskin Yang Masuk Data masyarakat miskin - DTKS mendapatkan Program.

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan di Sumatera Barat, dan seyogyanya upaya penanggulangannya harus bersifat lintas sektor dan lintas program berkolaborasi lintas pemerintahan baik bersama pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan desa. Selanjutnya dapat disampaikan Program/Kegiatan sampai Sub Kegiatan Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat Sumatera Barat Tahun 2023, sebagaimana disajikan pada lampiran berikut :

LAMPIRAN

Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023

MATRIKS RENCANA AKSI TAHUNAN TAHUN 2023
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGARAH DAN FOKUS TERHADAP KEMISKINAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Dinas Kehutanan	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya pendapatan Petani Hutan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Sarpras Ekowisata 20 Unit	Sarpras Ekowisata di Batu Busuk Kec. Pauh berupa Forest Healing, Tracking, Gazebo	Kelompok Tani Hutan	3.364.078.000,00	APBD DBH DR
									Lokasi Agam dan Bukit Tinggi (Hutan Nagari Simarasok dan Hutan Nagari Pasia Laweh) berupa Sarpras Ekowisata			
									Sarpras Ekowisata di Kota Padang (KTH Shahabat Alam Sungai Bangek dan Air Dingin)			
									Bantuan Sarana Ekowisata - Lokasi di LPHN Sumpur Kudus Nagari Sumpur Kudus berupa sepeda gantung dan flying fox			
									Bantuan Sarana Ekowisata - Disarankan untuk Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan berupa Sarana Prasarana Ekowisata perlengkapan Rafting di Hutan Nagari Sailbutan			
									Sarana Ekowisata berupa Tenda Glamping di KTH Solok Radjo			
									Sarana Ekowisata berupa ATV dan Track, Flying Fox di HKM Sikayan Balumuik Kota Padang			
									Sarana Prasarana Ekowisata di Kab. Pesisir Selatan			
									Sarana Prasarana Ekowisata di Saruaso berupa Gazebo, Tracking, perlengkapan camping			
									Jumlah Sarana Prasarana ekowisata di HKm Beringin Sakti Kab. Pasaman			
									Sarana Prasarana Ekowisata Bukit Sakura berupa Flying Fox, Tracking, cottage - Nagari Baringin, Kec. Palembang, Kab. Agam			
									Sarana Prasarana ekowisata Air Malancar Hutan Nagari Harau berupa Cottage, Tracking, Healing Forest - Kab. Lima Puluh Kota			
									Sarana Prasarana Ekowisata di wilayah kelola KPHL Solok			
									Sarana Prasarana Ekowisata di wilayah kelola KPHL Pesisir Selatan			
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	Pelatihan	Facilitasi KTH (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman	Kelompok Tani Hutan	885.000.000,00	APBD DBH DR
							Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Unit Percontohan 3 Unit	Facilitasi Kelompok Tani Hutan Lokasi Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pasaman (HKm Beringin Sakti : Pinus dan Durian Musang King)			
							Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Sekolah Lapang 5 Lokasi	Facilitasi kelompok tani hutan di selenggarakan di Kota Padang			
									Facilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan)			
									Facilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kab. Pasaman			
									Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota			
						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Facilitasi Kelompok Tani Hutan peningkatan kelembagaan 10 Kelompok	Facilitasi KTH (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman	Kelompok Tani Hutan	915.000.000,00	APBD
									Facilitasi Kelompok Tani Hutan Lokasi Kab. Pasaman Barat dan Kab. Pasaman (HKm Beringin Sakti : Pinus dan Durian Musang King)			
									Facilitasi kelompok tani hutan di selenggarakan di Kota Padang			
									Facilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan)			
									Facilitasi Kelompok Tani Hutan (Kelola kelembagaan, kelola usaha dan kelola kawasan) di Kab. Pasaman			
									Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota			
						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi 50 Kelompok	Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi	Kelompok Tani Hutan	11.309.546.470,00	APBD DAK DBH DR
							Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Usulan Perhutanan Sosial 30 Kelompok	Jumlah Stup Lebah Madu, Kota Padang			
							Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	Forum Perhutanan Sosial	Jumlah Stup Lebah Madu, Kabupaten Dharmasraya			
							Jumlah fasilitasi kewirausahaan	Facilitasi kewirausahaan 50 Kali	Jumlah Stup Lebah Madu, Kota Padang			
							Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang difasilitasi	Alat ekonomi peroduktif 10 Unit	Jumlah Stup Lebah Madu, Kabupaten Solok			
							Jumlah Stup Lebah Madu	Stup lebah madu 3000 Unit	Lokasi di Sijunjung 50 stup dan Dharmasraya sebanyak 100 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di Jorong Ringan - Ringan Nagari Pakandangan Kab Padang Pariaman, sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Facilitasi Kewirausahaan di Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman			
									Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota, (LPHN Harau Air Malancar) sebanyak 100 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di Kab. Pasaman (Kec. Panti dan Kec. Duo Koto) sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di KTH Shahabat Alam Sungai Bangek sebanyak 50 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu - Padang			
									Coaching Clinic di Kota Padang			
									Lokasi di Kab. Dharmasraya sebanyak 65 Stup, dan Sijunjung 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Facilitasi Pengembangan Usaha Kelompok Perhutanan Sosial (Gula Aren, Alpukat)			
									Facilitasi Kelompok Tani Hutan (3 kelompok, 1. Maju Bersama Nagari Kajai Kec. Talamau, Talago Bawah Gunung Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo, 3. Marguna Alam Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan Kab. Pasaman Barat)			
									Stup Lebah Madu - Lokasi di Nagari Sumpur Kudus Selatan dan Nagari Sumpur Kudus sebanyak 150 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
									Lokasi di Kota Padang (KTH Salak Putih Bungus Teluk Kabung) sebanyak 40 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Fasilitasi Kewirausahaan KTH pelaksanaan di Kota Padang			
									Fasilitasi unit ekonomi produktif - Hillirasi HNBK lebah madu (processing propolis dan bee pollen)			
									Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 41 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di Kota Payakumbuh dan Kab. Lima Puluh Kota sebanyak 60 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Anggota perhutanan sosial yang mengikuti forum padang pariaman - Forum Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari diselenggarakan di Pariaman peserta Perhutanan Sosial Sumatera Barat			
									Fasilitasi Kewirausahaan diselenggarakan di Pariaman peserta Perhutanan Sosial Sumatera Barat			
									Lokasi di Hutan Nagari Sungai Buluh Timur Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman sebanyak 40 Stup, Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di Kab. Solok (Hutan Nagari Sirukam, KTH Solok Radjo, KTH Taruang-taruang) 50 Stup			
									Lokasi di Kab. Solok Selatan (Lik) 100 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di Hutan Nagari Kamang Mudiak, Hutan Nagari Simarasok, Hutan Ngaro Tigo Koto Silungkang, HN Baso, HN Paninjauan Kab. Agam sebanyak 40 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Unit Ekonomi Produktif di Kab. Agam			
									Fasilitasi Usulan Pembentukan Perhutanan Sosial di Kel. Limau Manis Selatan Kota Padang			
									Unit Ekonomi Produktif berupa pengemasan air mineral/minum di KTH Sikayan baluik			
									Stup Lebah madu sebanyak 100 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu di Kota Padang			
									Stup Lebah Lokasi di Kambang Timur Kab. Pesisir Selatan sebanyak 25 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di Kab. Pasaman sebanyak 120 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial yang Difasilitasi			
									Lokasi di Kab. Pasaman sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Lokasi di Kab. Agam sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Fasilitasi Kelompok Perhutanan Sosial di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota			
									Fasilitasi Usulan Pehutanan Sosial di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota			
									Jumlah Kelompok PS di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota yang mengikuti forum			
									Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota			
									Unit Ekonomi Produktif di Kab. Lima Puluh Kota Wilayah Kelola KPHL Lima Puluhkota			
									Lokasi di Kab. Sijunjung sebanyak 50 Stup Meliputi Sosialisasi, Bimtek dan Monev lebah madu			
									Fasilitasi kewirausahaan di Kab. Pesisir Selatan Wilayah Kelola KPHL Pesisir Selatan			
		Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan (DBH DR)	Peningkatan SDM Kehutanan 4 Kali	Wilayah kerja KPHL Pasaman Raya, KPHL Lima Puluh Kota, KPHL Agam Raya		1.945.890.000,00	APBD DBH DR	
						Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	Pelatihan 200 Orang					
						Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Sekolah Lapang 10 Unit					
						Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh	Milenial Entrepreneur 500 Orang					
						Penas Tani 2023	Penas Tani 1 Kegiatan					
						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	Wilayah kerja KPHL Pasaman Raya, KPHL Lima Puluh Kota, KPHL Agam Raya, KPHL Bukit Barisan, KPHL Sijunjung, KPHL Solok, KPHL Hulu Batanghari, KPHL Dharmasraya, KPHL Mentawai	Kelompok Tani Hutan	1.586.165.000,00	APBD	
						Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Fasilitasi Kelompok Tani Hutan peningkatan kelembagaan 10 Kelompok					
						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Wilayah kerja KPHL Pasaman Raya, KPHL Lima Puluh Kota, KPHL Agam Raya, KPHL Bukit Barisan, KPHL Sijunjung, KPHL Solok, KPHL Hulu Batanghari, KPHL Dharmasraya, KPHL		10.737.388.732,00		
						Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	Jumlah Alat Ekonomi Produktif 20 Unit					
						Supervisi dan fasilitasi pengembangan PS	Supervisi fasilitasi Perhutanan Sosial 10 KPH					
						Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Pengadaan Stup Lebah Madu 3000 Unit					
						Fasilitasi usulan izin PS (DBH DR)	Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial 30 Kelompok					
						Pertemuan pengelola ekowisata (DBH DR)	Pertemuan 1 Kali					
						Pelatihan pengembangan kewirausahaan (DBH DR)	Pelatihan 5 Kali					

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat, dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
			Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIBIDANG KEHUTANAN	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah kegiatan penguatan kapasitas dan kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan yang dilaksanakan (DBH DR)	Peningkatan SDM Kehutanan 10 Kali			600.000.000,00	APBD DBH DR
							Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	Pelatihan 200 Orang				
							Jumlah masyarakat yang mengikuti Bimtek / Diklat manajemen pengelolaan Perhutanan Sosial / Jambore Penyuluh	Milenial Entrepreneur 500 Orang				
						Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kegiatan penguatan dan pendampingan kelembagaan Kelompok Tani Hutan yang dilaksanakan	Penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan 10 Kali			500.000.000,00	APBD
							Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Fasilitasi Kelompok Tani Hutan peningkatan kelembagaan 100 Kelompok				
						Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas wilayah perhutanan sosial yang dikembangkan	Pengembangan wilayah Perhutanan Sosial 5000 Ha			9.513.520.000,00	APBD DBH DR
							Jumlah Unit Ekonomi Produktif yang disediakan	Jumlah Alat Ekonomi Peroduktif 20 Unit				
							Jumlah Stup Lebah Madu yang disediakan	Supervisi fasilitasi Perhutanan Sosial 10 KPH				
							Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Pengadaan Stup Lebah Madu 3000 Unit				
							Fasilitasi usulan izin PS (DBH DR)	Fasilitasi usulan Perhutanan Sosial 30 Kelompok				
							Pertemuan pengelola ekowisata (DBH DR)	Pertemuan 1 Kali				
							Pelatihan pengembangan kewirausahaan (DBH DR)	Pelatihan 5 KUPS				
								Total			41.356.588.202,00	
2	Dinas Koperasi dan UMKM	Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pendapatan UKM dan Volume Koperasi)	1. Persentase peningkatan aset koperasi 2. Persentase peningkatan volume usaha koperasi 3. Persentase Koperasi RAT 4. Jumlah UKM Yang Bermitra	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang mendapatkan kapasitas kompetensi perkoperasian	Pelatihan Peningkatan Manajemen Keuangan Bagi Pengurus Koperasi	Kota Bukittinggi	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	400.000.000,00	APBD
								Pelatihan Pengawasan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi	Kota Padang	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	75.175.600,00	APBD
								Pelatihan Penyusunan SOM, SOP dan Persus Koperasi	Kota Padang	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	75.175.600,00	APBD
								Pelatihan Perkoperasian Pola Syariah	Kota Padang	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	74.375.600,00	APBD
								Pelatihan Sertifikasi Dewan Syariah Bagi KSPPS/USPPS Koperasi	Kota Padang	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	317.890.400,00	APBD
								Pelatihan Simulasi RAT	Kota Padang	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	75.175.600,00	APBD
								Pelatihan Teknis Akuntansi Bagi Koperasi Berbasis IT	Kota Padang	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	78.611.600,00	APBD
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penataan manajemen, 94 koperasi	1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi 2. Pembenahan Koperasi Tidak Aktif 3. Sosialisasi dan Peningkatan Peran Koperasi dalam Pengembangan Kelompok Usaha Strategis 4. Sosialisasi Perkoperasian di Lokasi TMMD/N	16 klab/kota 7 kab/kota 9 kab/kota 4 kab/kota	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	48.767.500,00 31.182.600,00 58.435.200,00 48.233.150,00	APBD APBD APBD APBD
							Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pemasaran usaha koperasi syariah	1. Bimtek penataan manajemen usaha koperasi syariah	Kab Solok, Ko Payakumbuh	75.659.150,00	APBD
							Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan manajemen usaha 30 koperasi	2. Bimtek Peningkatan Akses Pasar Usaha Koperasi Sektor Rill	Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	70.695.800,00	APBD
							Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan produktifitas dan nilai tambah 30 koperasi	3. Pembinaan dalam rangka Peningkatan Akses Pasar Usaha Koperasi Sektter Rill	10 kab/kota	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	34.833.200,00	APBD
							Jumlah koperasi yang difasilitasi restrukturisasi usaha 30 koperasi	4. Bimtek Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Koperasi	Kab Sijunjung, Kab 50 Kota	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	287.030.200,00	APBD
							Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan/permodalan 30 koperasi	5. Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Koperasi	10 kab/kota	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	43.210.000,00	APBD
								6. Belanja Subsidi kepada BUMD	19 Kab/Kota	Pelaku UMKM	6.500.000.000,00	APBD

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
								7. Bimtek Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Rill Menuju Restrukturisasi Usaha	Kab Agam, Kab Pasaman	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	106.272.000,00	APBD
								8. Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Sektor Rill Menuju Restrukturisasi Usaha	10 kab/kota	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	34.600.000,00	APBD
								9. Bimtek Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan	Kab Solok Selatan Kab Pasaman Barat	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	75.779.600,00	APBD
								10. Pembinaan dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	10 kab/kota	Pengurus/Pengawas/Anggota Koperasi	36.410.000,00	APBD
			Jumlah UKM Yang Bermitra	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan usaha pemula 5 lembaga	1. Fasilitas Penumbuhan Millenial Enterprenur	Kab Pesisir Selatan Kab Tanah Datar Kab Padang Pariaman Kab Agam Kota Payakumbuh	Pelaku UMKM	272.436.400,00	APBD
							Jumlah lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UKM dan usaha pemula 4 lembaga	2. Koordinasi dan Sosialisasi Pendaftaran Merk dan Sertifikat Halal	Kota Padang	Pelaku UMKM	73.200.000,00	APBD
							Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan 400 orang	3. Sosialisasi Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non Bank	Kab Kep Mentwai Kab Agam Kab 50 Kota Kota Padang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh	Pelaku UMKM	434.712.450,00	APBD
							Jumlah pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan 200 orang					
							Jumlah pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari lembaga perbankan dan non perbankan 150 orang					
							Jumlah UMKM yang difasilitasi akses keuangan perbankan dan non perbankan melalui sosialisasi 540 orang					
							Terfasilitasinya pendaftaran merk 20 merk					
							Terfasilitasinya penerbitan sertidikasi halal 40 sertifikat					
							Terlaksananya sosialisasi fasilitasi penumbuhan milenial entrepreneur 800 UMKM					
							Terlaksananya sosialisasi pendaftaran merk dan sertifikat halal 60 orang					
							Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah UMKM yang meningkat kapasitas kewirausahaannya 825 orang	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi UMKM	Kota Padang Kota Bukittinggi	225.000.000,00	APBD
								Pelatihan Motivasi Dan Inovasi Dalam Pencapaian 100 Ribu Entrepreneur Bagi Tenaga Pendamping UMKM	Kota Bukittinggi	Pelaku UMKM	162.000.000,00	APBD
								Pelatihan Pengembangan Usaha Bagi UMKM	Kota Bukittinggi	Pelaku UMKM	227.674.800,00	APBD
								Pelatihan Peningkatan Teknologi Digital Bagi UMKM	Kota Bukittinggi Kab Agam	Pelaku UMKM	950.000.000,00	APBD
								Pelatihan Penumbuhan Kewirausahaan Yang Inovatif Dalam Persaingan Global	Pindah Pemb Kop	Pelaku UMKM	225.160.000,00	APBD
								Pelatihan Digital Entrepreneurship Bagi Generasi Milenial	Kota Bukittinggi Kab Agam	Pelaku UMKM	350.000.000,00	APBD
								Pelatihan Digital Marketing	Kota Padang	Pelaku UMKM	188.840.000,00	APBD
								Pelatihan Kreatifitas Dan Inovasi Bagi Wirausaha Pemula	Kota Padang	Pelaku UMKM	154.973.200,00	APBD
								Pelatihan Manajemen Pemasaran Bagi UMKM	Kota Padang	Pelaku UMKM	400.000.000,00	APBD
								Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Bagi Pelaku UMKM	Kota Padang	Pelaku UMKM	61.321.900,00	APBD
								Pelatihan Peningkatan Sumberdaya Pelaku UMKM	Kota Bukittinggi Kab Agam	Pelaku UMKM	74.050.000,00	APBD
											269.865.800,00	APBD
			Jumlah UKM Yang Bermitra	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	Jumlah entrepreneur baru tercipta melalui Bimtek peningkatan kewirausahaan 150 orang	Bimbingan teknis Pemasaran Produk UMKM secara Digital	Kota Padang	Pelaku UMKM	864.497.500,00	APBD

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat, dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
					Menjadi Usaha Menengah	serta Desain dan Teknologi	Jumlah entrepreneur baru tercipta melalui Bimtek peningkatan kualitas kemasan label dan paper bag 100 orang	Partisipasi Promosi Produk UMKM	Kota Padang DKI Jakarta	Pelaku UMKM	223.025.800,00	APBD
							Jumlah entrepreneur yang fasilitasi pengembangan pemasaran produk UMKM (bazaar ramadhan dan pameran) 104 orang	Bimtek Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan	Kota Padang Kota Bukittinggi	Pelaku UMKM	2.550.162.950,00	APBD
							Jumlah peserta bimtek pengembangan UMKM kerajinan 100 orang	Bimtek Perkuat Produk UMKM	Kota Padang Kota Bukittinggi	Pelaku UMKM	202.416.200,00	APBD
							Jumlah peserta temu bisnis dalam rangka Penas Tani 70 orang					
							JumlahUMKM yang difasilitasi prototype, kemasan, label dan paper bag 50 orang					
							Jumlah UMKM yang mendapatkan bimtek pemasaran produk UMKM secara digital 100 orang					
								Total			16.456.849.800,00	
3	Dinas Pangan	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- 122 KWT - 52 KWT - 12 kelompok	Bantuan terhadap Kelompok Wanita Tani sebanyak 186 Kelompok	19 Kabupaten/Kota	Kelompok Wanita Tani	9.109.001.000,00	APBD
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	- 3 kategori - 80 unit PPK	Bantuan Revitalisasi Penggilingan Pati Kecil sebanyak 80 unit	19 Kabupaten/Kota	Kelompok Tani	9.334.671.500,00	APBD
		Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat yang terdampak dan beresiko rawan pangan dan gizi serta stunting yang dibantu	Bantuan paket sembako sebanyak 7948 Paket	19 Kabupaten/Kota	Masyarakat / by name by address	4.323.556.000,00	APBD
								Total			22.767.228.500,00	
4	Dinas Pariwisata	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya rata-rata pengeluaran wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi		Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	1. Terbinanya desa wisata berbasis agro 2. Terlaksananya apresiasi desa wisata 3. Terlaksananya implementasi CHSE 4. Terlaksananya sertifikasi CHSE Mandiri DTWU Provinsi 5. Tersusunnya profil desa wisata 6. Terlaksananya subsidi sertifikasi halal bagi usaha pariwisata 7. Terlaksananya sosialisasi WTBOB 8. Tersedianya papan informasi pada DTWU Provinsi	- Pembinaan desa wisata melalui sosialisasi dan memberikan penghargaan kepada desa wisata sesuai kriteria yang ditetapkan - Memfasilitasi pengurusan sertifikat CHSE kepada DTWU	Kota Padang, Kota Pariaman	3.840.766.000,00	APBD
			Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sumbar		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	1. Terlaksananya sertifikasi CHSE Mandiri untuk Homestay 2. Terlaksananya sosialisasi TDUP dan sertifikasi CHSE	- Memfasilitasi pengelola homestay mendapatkan sertifikat CHSE - Menyebarkan informasi terkait pentingnya pengurusan TDUP dan sertifikasi CHSE kepada pelaku usaha pariwisata	Kota Padang Panjang dan Kab. Tanah Datar	327.676.000,00	APBD
			Meningkatnya produktifitas industri ekonomi kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif		Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Mata Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Terlaksananya sosialisasi akses per	Meningkatkan pengetahuan pelaku ekraf atas akses permodalan dan pemasaran produk ekraf melalui pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan narasumber yang kompeten	Kota Pariaman, Kota Sawahlunto	126.487.100,00	APBD
					Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		Pengembangan Sistem Pemasaran	1. Terlaksananya sosialisasi sistem informasi pemasaran pelaku ekraf 2. Tersedianya video film dokumenter ekonomi kreatif 3. Tersedianya video profil ekonomi kreatif Sumatera Barat	1. Meningkatkan pengetahuan pelaku ekraf atas sistem pemasaran produk ekraf melalui pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan narasumber yang kompeten 2. Mempromosikan produk dan profil pelaku ekraf melalui pembuatan video	Kota Padang	371.055.500,00	APBD
							Fasilitasi Kekayaan Intelektual	1. Terlaksananya fasilitasi pendaftaran HKI Produk Ekraf Berbasis MDI 2. Terlaksananya fasilitasi pendaftaran HKI Produk Ekraf Berbasis Seni Budaya 3. Terlaksananya sosialisasi UU HKI Berbasis MDI 4. Terlaksananya sosialisasi UU HKI Berbasis Seni Budaya	1. Fasilitasi pelaku ekraf dalam pendaftaran HKI produk yang dihasilkan 2. Meningkatkan pemahaman pelaku ekraf akan arti penting HKI produk ekraf	Kota Padang	296.239.000,00	APBD

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	1. Terlaksananya pembinaan pokdarwis 2. Terlaksananya workshop sadar wisata	Meningkatkan pemahaman masyarakat dan anggota pokdarwis akan arti penting Sapta Pesona dalam pariwisata	Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar	679.146.000,00	APBD
							Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan	Terlaksananya pelatihan kompetensi bidang homestay dan pemandu wisata	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku usaha homestay dan pemandu wisata melalui pelatihan	Kota Padang, Kota Bukittinggi	690.230.600,00	APBD
							Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terlaksananya sertifikasi kompetensi tenaga kerja pariwisata	Memfasilitasi pemandu wisata mendapatkan sertifikasi kompetensi	Kota Padang	785.770.000,00	APBD
							Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terlaksananya workshop bagi pelaku ekonomi kreatif	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku ekraf melalui workshop	Kota Padang	441.497.000,00	APBD
							Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan kompetensi SDM Ekraf	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku ekraf melalui workshop	Kota Padang, Kab. Tanah Datar, Kota Bukittinggi, Kab. Agam, Kota Solok, Kota Payakumbuh	5.469.452.000,00	APBD
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya workshop pelaku ekraf untuk tingkat pemula	Meningkatkan kompetensi dan kapasitas pelaku ekraf melalui bimtek	Kota Padang, Kota Bukittinggi	944.760.000,00	APBD
							Total				13.973.079.200,00	
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Memningkatnya produksi peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain yang disediakan	Pengadaan bantuan ternak, pakan dan obat-obatan yang disebar ke kelompok tani ternak di Kab/Kota, pengawalan dan pendampingan kelompok	19 Kab/Kota	480 Kelompok Tani Ternak	47.543.654.205,00	APBD
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya status kesehatan hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis yang dilakukan	Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis melalui rapat koordinasi, pembelian obat-obatan, vaksin, pembayaran biaya operasional vaksinasi di Kab/Kota,	19 Kab/Kota	Masyarakat/ kelompok tani ternak di 19 Kab/kota	1.740.280.000,00	APBD
							Total				49.283.934.205,00	
6	Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Kelompok Tani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jenis Benih/Bibit Hortikultura yang diawasi, disediakan / diadakan baru dan diedarkan/dialurkan	Pengadaan benih hortikultura berikut dengan bimbingan teknis/ sosialisasi/ pendistribusian, pengawasan dan Good Agriculture Practices	Kab/Kota kawasan Hortikultura	Kelompok Tani	4.217.333.159,00	APBD
						3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jenis Benih/Bibit Tanaman Pangan yang diawasi, disediakan / diadakan baru dan diedarkan/dialurkan	Pengadaan benih tanaman pangan berikut dengan bimbingan teknis/ sosialisasi/ pendistribusian, pengawasan Good Agriculture Practices	Kab/Kota kawasan tanaman	Kelompok Tani	4.189.139.200,00	APBD
						3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jenis Benih/Bibit Perkebunan yang diawasi, disediakan / diadakan baru dan diedarkan/dialurkan	Pengadaan benih perkebunan berikut dengan bimbingan teknis/ sosialisasi/ pendistribusian, pengawasan Good Agriculture Practices	Kab/Kota kawasan perkebunan	Kelompok Tani	10.159.300.000,00	APBD
					Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1. Jumlah pengawasan terhadap sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian yang dilakukan 2. Jumlah laporan pengawasan terhadap sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian yang disusun	Pengadaan alsintan berikut dengan bimbingan teknis/ sosialisasi/ pendistribusian, pengawasan	19 Kab/Kota	Kelompok Tani	14.243.560.750,00	APBD
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengelolaan Jalan Usaha Tani yang dilakukan 2. Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengelolaan Jalan Usaha Tani yang disusun	Pengadaan jalan usaha tani mulai dari perencanaan, fisik dan pengawasan berikut dengan bimbingan teknis/ sosialisasi dll	19 Kab/Kota	Kelompok Tani	57.966.847.500	APBD
						Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dilaksanakan 2. Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi terhadap Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang disusun	Pengadaan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (tiersier) mulai dari perencanaan, fisik dan pengawasan berikut dengan bimbingan teknis/ sosialisasi dll	19 Kab/Kota	Kelompok Tani	16.034.175.000,00	APBD

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Jumlah pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dilakukan 2. Jumlah laporan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang disusun	Gerakan pengendalian berbasis lokasi terhadap OPT komoditi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	19 Kab/Kota	Kelompok Tani	37.240.000,00	APBD
								Total			48.880.748.109,00	
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat Meningkatnya nilai produksi industri kecil dan menengah	Perencanaan dan Penguasaan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						
							Jumlah IKM yang mendapatkan bimtek Diversifikasi Produk	Pelatihan Diversifikasi Produk Dari Pelatihan Diversifikasi Olahan Makanan Ringan Dan Bantuan Peralatan Bantuan Mesin Peralatan : - Oven Gas : 8 unit	Kota Padang Nagari Guguk VIII Koto, Kec. Guguk, Kab. Lima Puluh Kota	124.147.000,00 75.000.000,00	22 IKM 13 orang dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 APBD 2023 (Pokir)
							Jumlah Wirausaha Baru yang mendapatkan pelatihan manajemen dan teknis di sektor agro dan non agro	Pelatihan Peningkatan Mutu Batik Dan Bantuan Peralatan Bantuan Peralatan: 16 Unit mesin jahit	Nagari Ampuan Lumpo, Kec. IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan	475.000.000,00	16 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)
							Pelatihan Menjahit Dan Bantuan Alat (Kapur IX) Bantuan Peralatan: 11 Unit mesin jahit	Nagari Muaro Paiti, Kec. Kapur IX, Kab. Limapuluh Kota	108.870.500,00	11 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)	
							Pelatihan Pengembangan Desain Tenun Dan Bantuan Alat (Halaban) Bantuan Peralatan: 25 lusin benang lusi 12,5 Lusin benang penguin polos 12,5 Lusin benang double penguin 25 lusin benang emas 12,5 lusin benang penguin	Nagari Ampalu, Kec. Lareh Sago Halaban, Kab. Limapuluh Kota	192.874.000,00	25 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)	
							Pelatihan Pengembangan Desain Bordir Dan Bantuan Alat Bantuan Peralatan: 12 Unit mesin jahit 2 Unit mesin obras	Kota Padang	130.000.000,00	24 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)	
							Pelatihan Menjahit Dan Bantuan Alat (Harau) Bantuan Peralatan: 20 Unit mesin jahit	Nagari Koto Tuo, Kec. Harau, Kab. Limapuluh Kota	144.948.600,00	20 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)	
							Pelatihan Keterampilan Menjahit Beserta Bantuan Mesin Jahit Bantuan Peralatan: 38 Unit mesin jahit 2 Unit mesin obras	- Nagari Batu Banyak, Nagari Bukik Sileh Kab. Solok - Kelurahan Pasar Ambacang, Kec. Kuranji, Kota Padang	382.849.200,00	40 IKM dari 3 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)	
							Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Produksi Menjahit			200.000.000,00		APBD 2023 (Pokir)
							Pelatihan Pembuatan Tas Kulit Dengan Kombinasi Songket		- Kota Padang	352.224.100,00	25 IKM	APBD 2023 (Pokir)
							Pelatihan Dan Bantuan Alat (Usaha Bunda) Bantuan Peralatan: 14 Unit mesin jahit	- Nagari Batu Balang, Kec. Harau, Kab. Limapuluh Kota	117.733.600,00	14 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)	
							Lomba Desain Busana Muslimah Dan Lomba Desain Batik Minang Se Sumatera Barat		Kota Padang	227.046.000,00	19 Lembaga Dekranasda	APBD 2023

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
								Bimbingan Teknis Pengolahan Kuliner Dan Bantuan Peralatan Bantuan Peralatan : - Mixer : 60 unit - Timbangan Duduk : 60 unit	Kota Padang dan Kab. Solok	594.000.000,00	104 orang	APBD 2023 (Pokir)
								Bimbingan Teknis Pengolahan Makanan Dan Minuman	Kota Padang	250.000.000,00	150 orang	APBD 2023 (Pokir)
								Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Mesin Pembuat Kerupuk Dan Pengereng Bantuan Mesin Peralatan : - Mesin Penumbuk Ubi : 1 unit - Mesin Pencetak : 1 unit - Mesin Pengereng : 1 unit	Nagari Kamang Mudiak Kab. Agam	100.000.000,00	19 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)
								Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Peralatan Pemerah Santan Dan Penggiling Cabe Bantuan Mesin Peralatan: 1. Mesin Penggiling Cabai, 1 (satu) unit; 2. Mesin Pres Kelapa, 1 (satu) unit;	Nagari Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota (Kelompok IKM Maju Bersama)	69.000.000,00	5 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)
								Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Peralatan Pemerah Santan Dan Penggiling Cabe Di Kab. Lima Puluh Kota Bantuan Mesin Peralatan: 1. Mesin Penggiling Cabai, 1 (satu) unit; 2. Mesin Pres Kelapa, 1 (satu) unit;	Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota (Kelompok Usaha Rumah Tangga Bunda Saiyo)	49.000.000,00	5 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)
								Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Peralatan Pemerah Santan Bantuan Mesin Peralatan: Mesin Pres Kelapa, 1 (satu) unit	Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota (KUPP Melati)	35.500.000,00	5 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)
								Bimtek Pengolahan Kelapa Menjadi Minyak Kelapa Murni Bantuan Mesin Peralatan : - Mesin Pamarut : 2 unit - Mesin Peras Santan : 2 unit - Mesin Pendingin Santan : 2 unit - Mesin Pemanas : 2 unit - Mesin Sentrivugal : 2 unit - Mesin Filter Gravitasi : 2 unit	Nagari Rantau Simalenang Kab. Pesisir Selatan	200.000.000,00	20 IKM dari 2 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
								Sosialisasi Cara Produksi Cara Olahan Pangan Yang Baik Dan Bantuan Peralatan (Sari Lamak) Bantuan Paket Peralatan: Baskom 6 Buah Blender 1 Unit Cetakan Peyek Kecil 12 Pack Kompor Gas 1 Tungku 5 Unit Plastik 10 kg Regular gas tekanan rendah 5 Unit Saringan Halus 5 buah Saringan Kasar 5 buah Sealer 1 Unit Sendok Sayur 5 buah Spatula/sendok menggoreng 5 buah Tabung Gas LPG 5 Tabung Talam/Nampan 12 Buah Timbangan Duduk 1 buah Wajan Besi 5 buah Bantuan Paket Bahan: Bawang Putih 5 kg Garam 5 Bungkus	Jorong Air Putih, NagariSarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota (Kelompok IKM Mutiara)	32.000.000,00	5 IKM dari 1 kelompok usaha	APBD 2023 (Pokir)
								Pelatihan Dan Bimtek Enterpreneur Di Kab. Agam	Kab. agam	150.000.000,00	52 IKM	APBD 2023 (Pokir)
								Pelatihan Dan Bantuan Peralatan Pengolahan Makanan Ringan	Kab. Pesisir Selatan	180.000.000,00	60 orang	APBD 2023 (Pokir)
								Bantuan Peralatan : - Freezer : 2 unit - Choper : 16 unit - Ampia : 16 unit - Spiner : 4 unit - Hand Sealer : 4 unit - Mixer : 16 unit - Kualii : 3 buah - Kompor Gas : 2 unit				
								Pelatihan Teknis Peningkatan Kualitas Pengolahan Gambir	- Nagari Sarilamak Kab. 50 Kota - Nagari Koto Taratak Kab. Pesisir Selatan	120.661.200,00	50 orang	APBD 2023
								Penumbuhan Enterpreneur Baru Di Kab. Lima Puluh Kota	Kota Padang	200.000.000,00	80 IKM	APBD 2023 (Pokir)
								PENUMBUHAN WIRA USAHA BARU	1. Hotel Pesona Alam Sangir, Kab. Solok Selatan 2. Hotel Emersia, Kab. Tanah Datar	279.338.800,00	100 IKM	APBD 2023
							Jumlah IKM yang mendapatkan sertifikasi dan standardisasi produk industri (sertifikasi halal)	Sosialisasi Dan Fasilitasi Sertifikasi Halal Di Kota Padang Paket Sertifikasi Halal 50 buah	Hotel Pangeran City, Padang	250.000.000,00	50 IKM	APBD 2023
							Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi teknologi tepat guna	Sosialisasi Prototipe Teknologi Tepat Guna	3 Kabupaten/Kota (Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan)	253.958.000,00	150 IKM	APBD 2023
							Jumlah wirausaha baru atsiri yang mendapatkan bimtek pengolahan atsiri	Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Minyak Atsiri Bagi Kab/Kota Diversifikasi Produk Turunan Minyak Atsiri Bagi Wirausaha Baru Kab/Kota Sumatera Barat	Kab. 50 Kota, Kab. Dharmasraya Kota Padang	136.584.350,00 108.415.650,00	50 IKM 20 IKM	APBD 2023 APBD 2023
				Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil, menengah dan Aneka	Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah		Bimtek Pengolahan Makanan Ringan bagi IKM di Kab. Kep. Mentawai	Kep. Mentawai	80.000.000,00	20 IKM	APBN 2023
						Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi, Pendaftaran HKI/Merk, Desain Kemasan dan Fasilitasi dalam rangka OVOP		Pendampingan IKM OVOP Sumatera Barat	Pendampingan IKM di 18 Kab / Kota di Sumatera Barat Sosialisasi di Bukittinggi, Solok dan Padang	545.851.000,00	78 IKM	APBN 2023
			Meningkatnya jumlah pelaku Industri Kecil dan Menengah di Sumatera Barat	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah aparat dan pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis SKA Jumlah dokumen penerbitan Surat Keterangan Asal Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terhadap layanan penerbitan SKA yang dilakukan	Bimtek SKA	Padang	65.000.000,00	50 Eksporir	APBD 2023

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
				Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilitas Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar/pasar murah yang dilaksanakan	Pasar Murah	Kota Padang (4 lokasi), Kota Payakumbuh dan Kab. Sijunjung	132.882.400	masyarakat di 6 lokasi	APBD 2023
					Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di kab/kota Jumlah pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi yang dilakukan	Monitoring distribusi pupuk bersubsidi di Kab/kota	Kab. 50 kota, Kab. Agam, Kab. Solok, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh (7 lokasi)	57.347.250	-	APBD 2023
				Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Pameran Dagang Internasional/Nasional Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	- Jumlah pameran dagang internasional/nasional yang terikuti Jumlah calon eksportir yang mengikuti bimtek ekspor Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	Pameran Luar Negeri Pameran TEI Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Norwegia Tangerang Padang	200.000.000 75.944.000 50.688.000	4 IKM 2 IKM 50 orang	APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah promosi produk industri kecil menengah Sumatera Barat yang diikuti dan dilaksanakan	Penastani Bazar Ramadhan Pameran GBN Pameran Medan (HUT Dekranasda) Pameran Inacraft I Pameran Kriya Nusa Rakernas Dekranasda Pameran Inacraft II Minangkabau Heritage	Padang Padang Jakarta Medan Jakarta Jakarta Jakarta Padang Jakarta	108.100.000 157.000.000 36.389.150 90.146.000 154.650.690 86.350.000 12.946.000 150.000.000 144.500.000	214 IKM	APBD 2023
					Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi marketing digital	Bimbingan teknis digital marketing	Padang, Pasaman	329.000.000	210 IKM	APBD 2023
				Program Perdagangan Luar Negeri	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	Pelatihan, Pengembangan Produk dan Promosi Kepada UKM		Partisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI)	Jakarta	100.996.000	2 IKM	APBN 2023
				Program Perdagangan Dalam Negeri	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	Pelaksanaan Pasar Murah Partisipasi Pameran Pangan Nusa		Pasar Murah Partisipasi Pameran Pangan Nusa	Kota Padang (2 lokasi) Jakarta	31.150.000 48.000.000	masyarakat di 2 lokasi 2 IKM	APBN 2023 APBN 2023
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	Pengujian lab untuk komoditi, pengambilan contoh (PPC), kegiatan yang terkait dengan akreditasi lab (uji banding, audit internal, kaji ulang manajemen, asesment)	Sumatera Barat	114.235.750	313 sertifikat mutu dan Lembar hasil analisa dan kelanjutan akreditasi lab pengujian	APBD 2023
Total										8.310.327.240,00		
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah laut sampai dengan 12 mil : 1. Tersedianya mesin kapal perikanan 37 unit 2. Tersedianya mesin kapal perikanan (mesin tempel 15 PK) 480 unit 3. Tersedianya mesin kapal perikanan (mesin tempel 40 PK) 52 unit 4. Tersedianya mesin kapal perikanan (mesin tempel 8 PK) 12 unit 5. Tersedianya mesin longtail 8,5 PK 30 unit 6. Tersedianya sarana alat tangkap gillnet bagi nelayan 104 unit	Gillnet, 374 Unit	7 Kabupaten/ Kota wilayah pantai	Kelompok nelayan	5.011.600.000,00	APBD
								Fish box 200 ltr, 150 unit			146.850.000,00	
								Fish box 100 ltr, 800 unit			598.880.000,00	
								Mesin longtail 8,5 PK			598.880.000,00	
								Mesin tempel 15 PK, 149 unit			3.888.900.000,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan peanganan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang tersedia di wilayah perairan darat : 1. Terlaksananya pelestarian sumberdaya perairan umum (reservat) 2 unit 2. Terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum 300.000 ekor) 3. Tersalurnya sarana penangkapan bagi perairan umum (Gillnet) Maninjau dan Singkarak 195 unit 4. Tersalurnya sarana penangkapan bagi perairan umum (mesin longtail 8,5 PK) 50 unit 5. Tersalurnya sarana penangkapan bagi perairan umum (mesin tempel 2,5 PK) 150 unit	Gillnet Maninjau, 25 Unit	Kab Agam	Kelompok Nelayan	99.687.500,00	APBD
								Gillnet Singkarak (Solok), 50 Unit	Kab Solok		135.750.000,00	
								Gillnet Singkarak (Tanah Datar), 40 Unit	Kab Tanah Datar		110.000.000,00	
								Mesin longtail, 8,5 PK, 30 Unit			271.204.800,00	
								Mesin Tempel 2,5 PK, 30 unit			3.060.000.000,00	
								Perahu fiber, 20 unit			483.600.000,00	
								Tramel Net, 30 unit			276.750.000,00	
					Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terbayarkan asuransi nelayan/jaminan sosial ketenagakerjaan nelayan 4109 orang	Iuran Jaminan/Asuransi Nelayan/Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nelayan	10 Kab/Kota	Nelayan	743.848.024,00	APBD
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudayaan Ikan di laut	Penyediaan Sarana pembudayaan ikan di air payau dan air tawar yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah dan / atau manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kab/kota	1. Terlaksananya bantuan ikan nila untuk kegiatan TMMN 120.000 ekor 2. Terlaksananya budidaya rumput laut 1 paket 3. Terlaksananya paket bantuan budidaya udang vaname dan percontohan budidaya lobster 1 kegiatan	Bibit ikan nila dan mas, 500.000 ekor		Kelompok Pembudidaya	12.650.000,00	APBD
					Penjaminan Ketersediaan Sarana pembudidayaan ikan di laut	Budidaya rumput laut, 7.200 bh	Jumlah sarana pembudidayaan ikan di laut			Kelompok Pembudidaya	144.000.000,00	APBD
								Benih kerapu bebek, 11.500 ekor			322.000.000,00	
								Benih kerapu bebek, 15.000 ekor			270.000.000,00	
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberian insentif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan lintas daerah Kab/Kota alam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya sarana pemasaran hasil perikanan (SPG roda 3 = 2 unit, Fish box ik 100 Liter = 85 unit)			Kelompok Pengolah dan Pemasar		APBD
								Fish box 100 Ltr, 83 unit			62.133.800,00	
								SPG Roda 3, 2 unit				
								Total			16.236.734.124	
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan (PEP)	Kab. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Padang	1. Perempuan kepala keluarga (PEKA) 2. Perempuan yang belum mempunyai pekerjaan 3. Perempuan yang ingin mengembangkan usahanya 4. Perempuan korban kekerasan 5. Perempuan pemula usaha ekonomi	4.283.912.700,00	APBD

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2	3	4	6	8	9	10	11		13	14	15
		Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan provinsi yang tersedia	Bimbingan Teknis Peningkatan Ekonomi Perempuan (PEP)	Kab. Agam, Kab. Sijunjung, Kab. 50 Kota, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Sawahlunto	1. Perempuan kepala keluarga (PEKA) 2. Perempuan yang belum mempunyai pekerjaan 3. Perempuan yang ingin mengembangkan usahanya 4. Perempuan korban kekerasan 5. Perempuan pemula usaha ekonomi	1.451.657.650,00	APBD
								Total			5.735.570.350,00	
10	Dinas Pendidikan	Akses Layanan Pendidikan	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Provinsi Sumatera Barat	sekolah	8.000.000.000	APBD
		Akses Layanan Pendidikan				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Provinsi Sumatera Barat	sekolah	4.870.000.000	APBD
		Akses Layanan Pendidikan				Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Pembangunan Asrama Sekolah	Pembangunan Asrama Sekolah	Provinsi Sumatera Barat	sekolah	4.825.565.000	APBN-DAK FISIK APBD
		Akses Layanan Pendidikan				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Provinsi Sumatera Barat	sekolah	12.920.831.000	APBN-DAK FISIK APBD
		Akses Layanan Pendidikan				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Provinsi Sumatera Barat	sekolah	452.300.000	APBN-DAK FISIK
		Akses Layanan Pendidikan				Rehabilitasi Asrama Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Asrama Sekolah	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Provinsi Sumatera Barat	sekolah	93.000.000	APBD
		Bantuan Peralatan Sekolah kepada siswa				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (seragam, tas dan sepatu)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (seragam, tas dan sepatu)	Provinsi Sumatera Barat		2.640.000.000	APBD
		Bea Pendidikan Gratis				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pemberian beasiswa dana rajawali	Pemberian beasiswa dana rajawali	Provinsi Sumatera Barat		5.000.000.000	APBD
		Akses Layanan Pendidikan				Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Honor Guru Non PNS)	Jasa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Honor Guru Non PNS)	Provinsi Sumatera Barat		20.147.191.016	APBD
		Bea Pendidikan Gratis				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Penyaluran BOS (DAK Non Fisik) SMA	Penyaluran BOS (DAK Non Fisik) SMA	Provinsi Sumatera Barat		237.146.150.000	APBN-DAKNON FISIK
		Akses Layanan Pendidikan	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Provinsi Sumatera Barat		8.000.000.000	APBD
		Akses Layanan Pendidikan				Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Provinsi Sumatera Barat		3.001.710.000	APBN-DAK FISIK
		Akses Layanan Pendidikan				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Provinsi Sumatera Barat		5.185.526.000	APBN-DAK FISIK APBD
		Bantuan Peralatan Sekolah kepada siswa				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (seragam, tas dan sepatu)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (seragam, tas dan sepatu)	Provinsi Sumatera Barat		1.900.530.300	APBD
		Bea Pendidikan Gratis				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Penyaluran BOS (DAK Non Fisik) SMK	Penyaluran BOS (DAK Non Fisik) SMK	Provinsi Sumatera Barat		146.832.120.000	APBN-DAKNON FISIK
		Akses Layanan Pendidikan	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Provinsi Sumatera Barat		4.000.000.000	APBD
		Akses Layanan Pendidikan				Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Provinsi Sumatera Barat		2.620.664.000	APBN-DAK FISIK APBD
		Bantuan Peralatan Sekolah kepada siswa				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (seragam, tas dan sepatu)	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik (seragam, tas dan sepatu)	Provinsi Sumatera Barat		700.000.000	APBD
		Bea Pendidikan Gratis				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Penyaluran BOS (DAK Non Fisik) SLB	Penyaluran BOS (DAK Non Fisik) SLB	Provinsi Sumatera Barat		40.149.720.000	APBN-DAKNON FISIK
								Total			508.485.307.316	
11	Dinas Sosial			Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Bantuan untuk panti swasta (orang di dalam panti)- hibah uang dibelanjakan barangnya harus di lokasi panti- untuk mengungkit ekonomi lokal				1.416.253.400,00	
						Penyediaan Sandang	Bantuan untuk panti swasta (orang di dalam panti)- hibah uang dibelanjakan barangnya harus di lokasi panti- untuk mengungkit ekonomi lokal				758.336.000,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	penunjang panti swasta				616.525.000,00	
						Penyediaan Alat Bantu	alat untuk disabilitas				69.510.000,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	pengadaan obat non lansia (penyiapan P3K)				30.090.000,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	keterampilan- keterampilan teknis				300.128.800,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
					Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	Bantuan untuk panti swasta (orang di dalam panti)- hibah uang dibelanjakan barangnya harus di lokasi panti- untuk mengungkit ekonomi lokal				15.905.647.800,00	
						Penyediaan Sandang	Bantuan untuk panti swasta (orang di dalam panti)- hibah uang dibelanjakan barangnya harus di lokasi panti- untuk mengungkit ekonomi lokal				6.054.035.800,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	penunjang panti swasta				7.380.488.366,00	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	bimbingan rohani, agama,				500.000.000,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	keterampilan- keterampilan teknis				1.332.678.500,00	
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Koordinasi dgn Dukcapil Kabupaten/Kota (untuk pendataan misal ada anak terlantar tidak ada KTP, akta kelahiran)				5.344.599.700,00	
					Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Bantuan untuk panti swasta (orang di dalam panti)- hibah uang dibelanjakan barangnya harus di lokasi panti- untuk mengungkit ekonomi lokal				204.138.200,00	
						Penyediaan Sandang	Bantuan untuk panti swasta (orang di dalam panti)- hibah uang dibelanjakan barangnya harus di lokasi panti- untuk mengungkit ekonomi lokal				65.852.000,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	penunjang panti swasta				116.350.000,00	
						Penyediaan Alat Bantu	alat untuk disabilitas				63.700.000,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	keterampilan- keterampilan teknis				15.750.000,00	
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi		Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem menurut data P3KE yang telah dilakukan asesmen data desil 1 (asesmen penduduk miskin 22 nagari)- 1.100 orang di Kota Padang, Payakumbuh, Dharmasraya 450 org				719.535.415,00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Sabai Nan Aluh" Sicingin)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Penyediaan kebutuhan pokok WBS sesuai gizi minimal berupa makan 3 kali sehari sesuai dengan menu yang telah disetujui oleh ahli gizi dari Dinas Kesehatan				1.405.250.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan dasar berupa pakaian dan kebutuhan kebersihan diri WBS berupa pasta gigi, sabun mandi, shampo, sikat gigi, dan odol				335.632.600,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program pelayanan panti				370.620.800,00	
						Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan alat bantu dan alat bantu peraga untuk kesehatan WBS				99.538.000,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan alat/ bahan kesehatan WBS dan obat-obatan WBS				200.846.571,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Penyediaan bahan praktek pelatihan BLK, jasa tenaga kesehatan pada panti sosial, psikiater, honor instruktur bimbingan kesehatan, jasa peningkatan mental/fisik aparatur, penceramah agama acara SKPD, uang saku iompo/grahita				391.400.000,00	
						Pemulasaraan	Pelaksanaan penguburan/ pemulasaran jenazah serta kegiatan terminasi WBS kepada pihak keluarga/ penanggung jawab				29.000.000,00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) "Tri Murni" Padang Panjang)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	Penyediaan kebutuhan pokok kelayan sesuai gizi minimal berupa makan 3 kali sehari sesuai dengan menu yang telah disetujui oleh ahli gizi dari Dinas Kesehatan				1.277.500.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan dasar berupa pakaian dan kebutuhan kebersihan diri kelayan				417.982.900,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program pelayanan panti				83.580.000,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan alat/ bahan kesehatan kelayan dan obat-obatan kelayan				33.270.250,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Penyediaan bahan kegiatan kelayan berupa bahan keterampilan menjahit dan bordir, alat-alat tela boga, bahan-bahan tela boga, honor instruktur, sewa kendaraan untuk rekreasi, uang saku, retribusi dan uang pemangglan dan pemulangan kelayan				339.285.600,00	
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyediaan biaya pendidikan dan kesehatan kelayan serta perlengkapan sekolah				395.825.500,00	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelaksanaan penelusuran keluarga berupa kegiatan seleksi dan home visit kelayan				41.760.000,00	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelaksanaan kegiatan pertemuan orangtua/wali kelayan dengan pegawai panti				11.040.000,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
						Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Pelaksanaan pengasuhan kepada kelayan oleh keluarga pengganti / petugas asrama				24.000.000,00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) "Harapan" Padang Panjang)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	Penyediaan kebutuhan pokok kelayan sesuai gizi minimal berupa makan 3 kali sehari sesuai dengan menu yang telah disetujui oleh ahli gizi dari Dinas Kesehatan				1.277.500.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan dasar berupa pakaian dan kebutuhan kebersihan diri kelayan				289.690.000,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program pelayanan panti				186.795.000,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan alat/ bahan kesehatan kelayan dan obat-obatan kelayan				8.828.550,00	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Penyediaan bahan kegiatan kelayan berupa bahan keterampilan menjahit dan membordir, alat-alat tata boga, bahan-bahan tata boga, honor instruktur, sewa kendaraan untuk rekreasi, uang saku, retribusi dan uang pemanggilan dan pemulangan kelayan				610.545.337,00	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelaksanaan penelusuran keluarga berupa kegiatan seleksi dan home visit kelayan				26.540.000,00	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pelaksanaan kegiatan pertemuan orangtua/wali kelayan dengan pegawai panti				476.259.000,00	
						Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Pelaksanaan pengasuhan kepada kelayan oleh keluarga pengganti / petugas asrama				16.800.000,00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) "Budi Utama" Lubuk Alung)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Makanan	Penyediaan kebutuhan pokok kelayan sesuai gizi minimal berupa makan 3 kali sehari sesuai dengan menu yang telah disetujui oleh ahli gizi dari Dinas Kesehatan				1.812.125.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan kebutuhan dasar berupa pakaian dan kebutuhan kebersihan diri kelayan				155.294.950,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program pelayanan panti				390.346.500,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Penyediaan alat/ bahan kesehatan kelayan dan obat-obatan kelayan				8.673.100,00	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Penyediaan bahan kegiatan kelayan berupa bahan keterampilan menjahit dan membordir, alat-alat tata boga, bahan-bahan tata boga, honor instruktur, sewa kendaraan untuk rekreasi, uang saku, retribusi dan uang pemanggilan dan pemulangan kelayan				917.200.000,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Penyediaan petugas pangkas rambut, uang saku anak asuh, transportasi pemanggilan dan pemulangan kelayan panti				170.761.600,00	
						Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Penyediaan biaya pendidikan dan kesehatan kelayan serta perlengkapan sekolah				724.770.000,00	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pelaksanaan penelusuran keluarga berupa kegiatan seleksi dan home visit kelayan				41.760.000,00	
						Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Pelaksanaan pengasuhan kepada kelayan oleh keluarga pengganti / petugas asrama				28.800.000,00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Tuna Netra (PSBN) "Tuah Sakato" Padang)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanaan	Penyediaan Permakanaan				638.750.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang				176.918.700,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				105.286.629,00	
						Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu				14.900.000,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				6.532.900,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				683.491.461,00	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				36.980.000,00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) "Andam Dewi" Solok)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanaan	Penyediaan Permakanaan				511.000.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang				217.993.178,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				579.671.873,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				27.289.400,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				365.221.650,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Tuna Grahita (PSBG) "Harapan Ibu" Padang)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan				1.277.500.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang				402.600.100,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				174.397.000,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				12.322.500,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				577.474.306,00	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				12.760.000,00	
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				20.220.000,00	
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL (Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) "Kasih Sayang Ibu" Tanah Datar)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan				894.250.000,00	
						Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang				245.684.654,00	
						Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses				231.288.550,00	
						Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu				65.564.000,00	
						Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial				45.854.255,00	
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial				177.616.400,00	
						Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari				94.780.000,00	
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				18.960.000,00	
						Pemulasaraan	Pemulasaraan				22.500.000,00	
								Total			61.130.647.795,00	
12	Dinas Kesehatan			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Pembayaran Premi peserta JKN yang terdaftar pada segmen kepesertaan PBI-JK (Kontribusi Provinsi) dan JKSS (Sharing Premi dengan Kab/Kota se-Sumatera Barat)				105.286.873.000,00	
						Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Melakukan Pembinaan Persiapan Ke kabupaten /Kota dalam rangka persiapan Akreditasi Puskesmas sebanyak 280 Puskesmas untuk meningkatkan akses layanan fasyankes				159.872.400,00	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Peningkatan Pencapaian PIS-PK dan intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas di seluruh wilayah kerja Puskesmas se-Sumatera Barat				187.755.500,00	
								Total			105.634.500.900,00	
13	Dinas Perhubungan			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Perluinya melakukan Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis ke Pelabuhan Singgah di Kabupaten Kepulauan Mentawai guna membuka daerah terisolir dan terpencil Melakukan kunjungan ke Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagai daerah yang disinggahi oleh Kapal Angkutan Laut Perintis.				67.082.550,00	
								Total			67.082.550,00	
14	Dinas Kebudayaan			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian anak nagari sawahlunto-sijunjung Pentas seni anak nagari agam-bukittinggi pentas seni anak nagari pesisir selatan penastani hibah				1.158.105.465,00	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN (UPTD Taman Budaya)	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Workshop Kriya				714.259.637,00	
								Total			1.872.365.102,00	
15	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman				1.940.000.000,00	
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun				8.103.665.758,00	
						Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang terbangun				19.365.435.513,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara				1.846.197.486,00	
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang dibina dan diberdayakan				534.367.550,00	
						Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				100.478.660,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat, dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya				709.886.720,00	
						Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai yang dibangun				8.972.061.223,00	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang tersusun				1.363.295.505,00	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				33.270.541.820,00	
						Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi				3.471.002.750,00	
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan				103.000.000,00	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH SELATAN)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				258.660.096,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara				100.000.000,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dipelihara				25.000.000,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara				25.000.000,00	
						Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				941.085.500,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara				50.000.000,00	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				4.636.918.498,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				1.825.706.823,00	
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan				1.966.678.100,00	
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) (UPTD BALAI SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI WILAYAH UTARA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara				114.709.800,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara				255.586.900,00	
						Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi				1.266.635.893,00	
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara				634.512.016,00	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				6.849.403.298,00	
						Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				2.465.033.268,00	
						Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan				2.561.348.445,00	
								Total			103.756.211.622,00	
16	Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Penyusunan Dokumen Lingkungan pada Kegiatan SPAM Regional Kab.50 Kota dan Kota Payakumbuh				885.001.600,00	
						Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota	1) Pendampingan Penyiapan SPAM Regional Provinsi Sumatera Barat 2) Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)				94.391.780,00	
						Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Pengadaan tanah untuk pembangunan SPAM Regional Agam- Bukittinggi. Kegiatan dibatalkan pada DPA Perubahan 2023				2.816.908.845,00	
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Supervisi Pembangun/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1) Pendampingan Penjaminan Kualitas Data SPM Air Minum dan Sanitasi Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat 2) Percepatan Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP) / Pendampingan Penyusunan dan Implementasi Dokumen SSK Kabupaten/Kota				411.915.480,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				525.711.685,00	
						Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat				194.745.483,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1. penyusunan dokumen amdal Alahan Panjang- Kiliran Jao (segmen 3). 2. Penyusunan dokumen Amdal Sasak-Maligi 3. DELH Jalan Koto Mambang Balingka. 4. DELH Jalan Sicincin-Kurai taji. 5. DELH Jalan Lubuk-Basung - Sei Limau 6. Pemantauan Pengelolan Lingkungan Jalan Provinsi 7. Studi Kelayakan Jalan Malialak-Sei Batant 8. Kajian studi fungsi Pengembangan Laringan Jalan Sumatera Barat 9. Survey PIPPIB 10. Penataan Blok dan PKS JALAN PROVINSI				5.879.212.287,00	
						Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pendampingan Penyiapan Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol				5.819.000.311,00	
						Pengelolaan Leger Jalan	Penyusunan Dokumen Leger Jalan Provinsi				974.715.000,00	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Status Ruas Jalan Provinsi Sumatera Barat				600.000.000,00	
						Pembangunan Jalan	1. Pekerjaan Penanganan Longsegment Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104) DAK (Perkerasan beton semen dengan anyaman tulangan tunggal fc' 20 Mpa, lapis pondasi bawah beton kurus untuk badan jalan) 2. Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I ((galian biasa, galian batu, timbunan pilihan, agregat kelas B, agregat kelas A, laston lapis antara (AC-BC) untuk pekerjaan badan jalan)), (pasangan batu mortar, pasangan batu untuk pekerjaan saluran), (beton fc'15 Mpa untuk bahu jalan) 3. Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket II ((galian biasa, galian batu, timbunan pilihan, agregat kelas B, agregat kelas A, laston lapis antara (AC-BC) untuk pekerjaan badan jalan)), (pasangan batu mortar, pasangan batu untuk pekerjaan saluran), (beton fc'15 Mpa untuk bahu jalan) 4.Pekerjaan Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Suranthi - Kayu Aro - Langgai (P.086) (beton fc'15 Mpa, timbunan pilihan untuk pekerjaan badan jalan), (pasangan batu mortar dan pasangan batu untuk pekerjaan saluran dan penahan tebing)				40.491.534.150,00	
						Pelebaran Jalan Menuju Standar	1. Penanganan Longsegment Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) DAK (Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala Aspal AC-WC sepanjang 0,55 Km dan Pelebaran Badan Jalan sepanjang 0,4 Km) 2. Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) Lingkup Pekerjaan AC- BC dan AC- WC Sepanjang 625 Meter Pasangan Batu, Timbunan Biasa, Urungan Pilihan, Klas A dan B 3. Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Palembang CS Lingkup Pekerjaan Klas A Sepanjang 585 Meter, Aspal AC-WC Sepanjang 1.585 Km, Bronjong,Urungan Pilihan, Jalan Beton fc. 20, meter, Bahu Jalan 4. Pelebaran Jalan Menuju Standar pada Ruas Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090) Lingkup Pekerjaan Klas A dan AC-WC Sepanjang 997 Km, Bronjong Sepanjang, Urungan Pilihan, Beton fc 15 Mpa untuk Bahu Jalan 5. Pelebaran Jalan Menuju Standar Pada Ruas Simpang Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Suman (P.092) (Berkala Aspal AC-WC, Pelebaran jalan 650m, Pasangan batu dan urugan pilihan)				24.375.050.000,00	
						Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Pelebaran Jalan Menambah Lajur Jalan Provinsi di Ruas Padang Sawah Kumpulan (P.068) (Raising Kelas A dan AC- BC untuk Badan Jalan, kerb pra cetak untuk median Jalan dengan lebar masing-masing lajur 4,5 m)				4.270.641.800,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
						Rekonstruksi Jalan	1. Penanganan Longsegment Jalan Guguk Cino - Sawah Lunto (Lapangan Segitiga) (P.038.2) DAK (Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan Rutin sepanjang 30,6 Km dan Pemeliharaan Berkala sepanjang 2,9 Km) 2. Rekonstruksi Jalan Provinsi Di Ruas Pangkalan Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076) (Lingkup Pekerjaan segmen 1 rabat beton lebar 4,5 m tebal 20 cm, Segmen 2 timbunan pilihan lebar 6,5 m sepanjang 200 m, Pekerjaan bronjong STA 231+000, STA 240+300, STA 240+750) 3. Rekonstruksi Jalan Provinsi Di Ruas Purus - Bandara Internasional Minangkabau (P.099) Cs (Lingkup Pekerjaan terdiri dari 4 segmen yaitu, segmen 1 pekerjaan Trotoar sepanjang 25 m, segmen 2 overlay sepanjang 465 m, segmen 3 overlay 350 m, segmen 4 pekerjaan Bronjong) 4. Rekonstruksi Jalan Provinsi Di Ruas Simp. Koto Mambang - Balingka (P.078) (Lingkup Pekerjaan, Segmen 1 box culvert sepanjang 11 m, segmen 2 Pelebaran dan aspal sepanjang 147 m, segmen 3 pengaspalan 75m 5. Penanganan Longsegment Jalan Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093) DAK (Lingkup pekerjaan terdiri Pemeliharaan Rutin sepanjang 38 Km dan Pemeliharaan Berkala sepanjang 1,6 Km) 6. Rekonstruksi Jalan Provinsi Di Ruas Sitangkai - Tj. Ampalu (P.040) (Lingkup Pekerjaan Overlay sepanjang 2 Km)				28.747.770.000,00	
						Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Jalan Provinsi di Ruas Lubuk Basung - Sei. Limau (P.072), Penanganan Longsegment Jalan Rao Rokan - Batas Riau, Penanganan Longsegment Jalan Sicincin - Kural Taji				28.172.874.000,00	
						Pembangunan Jembatan	Pembangunan Jembatan RS. Unand (Konstruksi Rangka Baja Kelas B Panjang Bentang 40m*50m, bangunan bawah beton Fc 30 MPa dinding penuh, pondasi Box Caisson)				9.307.900.000,00	
						Penggantian Jembatan	1. Penggantian Jembatan Bt. Tomak (P.097) (Konstruksi Bangunan Atas Girder Kelas A, Panjang Bentang 30 m, Bangunan Bawah Pondasi Dinding Penuh Fc 20 MPa, Pondasi Box Caisson) 2. Penggantian Jembatan Kurambik (P.025) (Konstruksi Box Culvert 6 x 7 m, Beton Fc 30 MPa)				10.794.050.000,00	
						Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Perencanaan teknis Kebinamargaan, Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam				100.000.000,00	
						Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pengawasan Perizinan Utilitas Jalan (yang terdampak dari pembangunan pipa, telkom) terkait izin teknisnya				128.328.000,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Workshop dan Peralatan)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Perencanaan teknis Kebinamargaan, Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam				1.148.159.900,00	
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA (UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung)	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Meningkatkan pemahaman ASN PUPR Kab/Kota yang berkaitan dengan regulasi/aturan tentang penataan bangunan khususnya Bangunan Gedung melalui Bimtek/Workshop/Sosialisasi secara berkelanjutan				270.280.452,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pengawasan Perizinan Utilitas Jalan (yang terdampak dari pembangunan pipa, telkom) terkait izin teknisnya				1.202.351.000,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Drainase dan Bahu Jalan diruas Panti - Simpang Empat				200.000.000,00	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan rutin ruas jalan Provinsi UPTD Wilayah I				7.023.700.000,00	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan rutin jembatan Provinsi UPTD Wilayah I				320.600.000,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan Propinsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II				964.788.919,00	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPTD Wilayah II, Pengendalian Kasi Jalan dan Jembatan Wilayah II				5.910.951.081,00	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Wilayah II				247.296.000,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III				968.104.209,00	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPTD Wilayah III				4.511.848.791,00	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Wilayah III				61.397.000,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPTD Wilayah IV				5.959.900.000,00	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Wilayah IV				160.800.000,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pengendalian dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi UPTD Wilayah V				4.798.760.000,00	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan UPTD Wilayah V				172.100.000,00	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI				501.000.000,00	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi UPTD Wilayah VI				5.697.000.000,00	
						Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah VI				164.500.000,00	
								Total			204.873.287.713,00	
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Pelaksanaan kerja sama pemagangan dengan perusahaan di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan pelaksanaan seleksi pencari kerja untuk magang ke Jepang.				227.979.000,00	
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan mengenai pengenalan dan peluang dunia kerja dan pengenalan potensi diri				10.000.000,00	
						Perluasan Kesempatan Kerja	Peluang peningkatan tenaga kerja mandiri atau enterpreneur (informal)				570.000.000,00	
						Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	informasi pasar kerja melalui daring			33.300.000,00	
						Job Fair/Bursa Kerja	Pameran peluang kerja yg mempertemukan pencari kerja dan industri yg butuh tenaga kerja				96.500.212,00	
				Program Hubungan Industrial	Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat				17.868.000,00	
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Memverifikasi data penduduk disekitar kawasan transmigrasi yg memiliki tanah dan rumah yang berpotensi untuk menjadi calon transmigran				27.253.200,00	
						Pelatihan Transmigrasi	Memberikan pelatihan keterampilan kepada warga transmigrasi				95.089.800,00	
						Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Melaksanakan monitoring dan evaluasi di kawasan transmigrasi				100.000,00	
				Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Pelaksanaan pelatihan keterampilan teknis bagi warga transmigran bekerja sama dengan OPD di penda wilayah transmigran				33.623.200,00	
						Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Pelaksanaan pelatihan teknis bagi warga transmigran (pelatihan pengolahan lahan dan pengendalian hama tanaman)				30.124.800,00	
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (UPTD BLK Payakumbuh)	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan				2.135.000.000,00	
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (UPTD BLK Padang Panjang)	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan				4.405.000.000,00	
								Total			7.681.838.212,00	
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Melakukan pembangunan infrastruktur konservasi energi yang terdiri dari: Pembangunan PLTS Irigasi sebanyak 2 Unit dan Pemasangan PLTS Atap/rooftop sebanyak 1 Unit				1.914.921.520,00	
				PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Melakukan koordinasi, verifikasi, monitoring lapangan, dan penetapan Penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu				2.347.210.000,00	
								Total			4.262.131.520,00	
19	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Perbaikan 57 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Kota Padang				1.300.000.000,00	
								Total			1.300.000.000,00	
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa Tertinggal, Verifikasi data Indeks Desa Membangun Tahun 2026				98.474.467,00	

No	Sektor/ Urusan/ OPD Pelaksana	Kebijakan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub- Kegiatan	Indikator Sub-Kegiatan	Jenis/ Bentuk kegiatan yang dilaksanakan	Lokasi (Kabupaten/ Kecamatan/Nagari/Desa/Kelurahan)	Kinerja	Pagu/ Alokasi Anggaran (Rp)	Sumber Pendanaan (APBN/ APBD/ LSM/ Swasta/ Masyarakat,dll)
1	2		4	6	8	9	10	11		13	14	15
						Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Fasilitasi TMMD & TMMN ke 116/117/125				893.566.585,00	
						Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Fasilitasi kerja sama antar desa dalam rangka percepatan transformasi UPK dana bergulir masyarakat eks PNPMPd menjadi BUMdes bersama				184.993.503,00	
				Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Bimtek Peningkatan Entrepreneur Milenial di Nagari/Desa Angkatan VI, VII, VIII, IX dan X, Bimtek kelembagaan Lumbung Pangan Masyarakat, Bimtek penguatan budidaya maggot, Bimtek Manajemen pengelola pasar desa/nagari, Bimtek pengembangan Prukades				1.565.668.690,00	
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Bimtek Bumdes (dengan perbankan), Pembuatan badan hukum, penilaian bumrag, kerja sama dengan universitas (magang) ke bumdes				1.202.294.464,00	
								Total			3.944.997.709,00	

“BASAMO MANGKO MANJADI”

2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl Khatib Sulaiman No. 1, Kecamatan Padang Barat, Padang (26222)
Telp. 0751-7055676, 7052223, Fax : 0751-7055676